



VISI, MISI & PROGRAM KERJA

Indonesia Adil
Makmur untuk Semua

ANIES RASYID BASWEDAN

ABDUL MUHAIMIN ISKANDAR



PAWA TAN
KETIKA M
RU. BERKIN
MATO HOM
DA PEMU
LAGI. DE
SUASA
NGAN
BERGE

SEBALI 19 SEPTEMBER 1945 . . .
ELIHAT BENDERA MERAH PUTIH-BI-
BAR KEMBALI DI HOTEL DRANYE (YA-
TEL). KEMARAHAN RAKYAT DAN PEMU-
JUA DI SURABAYA TIDAK TERTAHAN
ENGAN SEREMPAK RAKYAT BERGERAK
NA MENJADI PANAS. JALAN TUNJU-
MENJADI LAUTAN MANUSIA YANG
ELORA . . .

TERJADILAH . . .
INSIDEN BENDERA, FAJAR PERMULAAN MELE-
TUSNYA API REVOLUSI, KARENA RAKYAT HA-
NYA MENGHENDAKI SUPAYA SANG DWI WARNA ME-
RAH-PUTIH SAJA YANG BERKIBAR DI ANGKASA
INDONESIA, SEDANG SI-TIBA WARNA HARUS TURUN . . .

KEMUDIAN . . .
BERKIBARLAH SANG DWI WARNA HINGGA DETIK SEKA-
RANG DAN UNTUK SETERUSNYA SEBAGAI LAMBANG KE-
MEGAHAN DAN KEJAYAAN NUSA DAN BANGSA INDONESIA.

1

**FONDASI
DAN ARAH
PERUBAHAN**

HAL. 2

2

**VISI:
INDONESIA ADIL
MAKMUR UNTUK SEMUA**

HAL. 13

Daftar Isi

PADA TAH
KETIKA M
RU, SERKIN
MATO HON
DA PEMER
LAGI, DI
SUASANA
NGAN DAN
BERGUNA



3

MISI:

8 JALAN PERUBAHAN

HAL. 15

MISI 1: Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah melalui Kemandirian Pangan, Ketahanan Energi, dan Kedaulatan Air	17	MISI 5: Mewujudkan Manusia Indonesia yang Sehat, Cerdas, Produktif, Berakhhlak, serta Berbudaya	59
MISI 2: Mengentaskan Kemiskinan dengan Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Kerja, Mewujudkan Upah Berkeadilan, Menjamin Kemajuan Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Pemerataan, serta Mendukung Korporasi Indonesia Berhasil di Negeri Sendiri dan Bertumbuh di Kancah Global	23	Misi 6: Mewujudkan Keluarga Indonesia yang Sejahtera dan Bahagia sebagai Akar Kekuatan Bangsa	69
MISI 3: Mewujudkan Keadilan Ekologis Berkelanjutan untuk Generasi Mendatang	41	MISI 7: Memperkuat Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, serta Meningkatkan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kancah Politik Global untuk Mewujudkan Kepentingan Nasional dan Perdamaian Dunia	73
MISI 4: Membangun Kota dan Desa Berbasis Kawasan yang Manusiawi, Berkeadilan dan Saling Memajukan	49	MISI 8: Memulihkan Kualitas Demokrasi, Menegakkan Hukum dan HAM, Memberantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih, serta Menyelenggarakan Pemerintahan yang Berpihak pada Rakyat	81

4

AGENDA STRATEGIS
**8 SAYAP
KEMAJUAN**

HAL. 89

5

AGENDA KHUSUS
**28 SIMPUL
KESEJAHTERAAN**

HAL. 101

6

PENUTUP

HAL. 133

7

LAMPIRAN
**TARGET AMIN
2025-2029**

HAL. 136



VISI, MISI & PROGRAM Anies Baswedan & Muhammin Iskandar

Fondasi dan Arah Perubahan

Indonesia Emas 2045! Ini bukan slogan indah yang hampa. Ini adalah cita-cita tentang masa depan yang gemilang buat seluruh anak bangsa. Kita harus mencapai kegemilangan itu, ketika usia Proklamasi Kemerdekaan RI mencapai 100 tahun. Negeri tercinta kita ini akan mencapai tujuan utamanya, yaitu mewujudkan negara yang maju, merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Bangsa Indonesia tumbuh dari perjuangan. Keberhasilan perjuangan melawan penjajah mengandung hikmah yang dalam tentang karakter kita sebagai bangsa. Kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dikaruniai semangat juang, percaya pada kerja keras, serta selalu menekankan pentingnya kecerdasan yang matang secara emosional dan spiritual.

Sejarah para leluhur kita adalah sejarah perlawanan terhadap kezaliman. Dari gelora Laksamana Malahayati yang memimpin 2.000 Inong Balee (pasukan janda pahlawan Aceh) melawan armada laut Portugis (1599), hingga pekik takbir Pangeran Diponegoro yang membuat bangkrut bala tentara Belanda di medan Perang Jawa (1825-1830).

Dari keberanian Sultan Hasanuddin, Ayam Jantan dari Timur yang memimpin Perang Makassar (1666-1669), ketangguhan I Gusti Ketut Jelantik mempertahankan Pulau Dewata dari gempuran Belanda (1849), hingga keteguhan hati rakyat Papua untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi (1969).

Para leluhur kita adalah para pejuang yang sadar sesadar-sadarnya akan hak dan tanggung jawab atas tanah airnya. Kesadaran dan rasa tanggung jawab inilah yang diwariskan turun-temurun kepada anak, cucu hingga generasi kita sekarang. Perjuangan harus terus berlanjut, tidak boleh surut.

Satu Bangsa, Satu Negara, Satu NKRI dan Satu Tanah Air

Ketika tekanan dan penderitaan akibat penjajahan berkelanjutan, para pendahulu kita mengambil satu langkah besar yang sangat instrumental: berserikat! Pelan-pelan, kalangan terpelajar mengubah gaya perjuangan, menggeser identitas kedaerahatan dan bersatu melalui tajamnya pisau organisasi dan pemikiran.

Lahirlah Boedi Oetomo (1908), diikuti Sarekat Dagang Islam (1911) yang bertransformasi menjadi Sarekat Islam, lalu para pelajar mendirikan Perhimpoenan Peladjar-Peladjar Indonesia atau PPPI (1926). PPPI inilah yang menggelar Kongres Pemuda I (1926) dan Kongres Pemuda II (1928) di Batavia. Di Kongres Pemuda II itulah Wage Rudolf Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya dan para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda: bertumpah darah yang satu, Tanah Indonesia. Berbangsa yang satu, Bangsa Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menandai lahirnya kita sebagai **SATU BANGSA**.

Satu Bangsa



1928

"Negara Indonesia merdeka yang akan kita bangun itu, apa dasarnya?" tanya ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dr. Radjiman Wedyodiningrat, akhir bulan Mei 1945. Pertanyaan ini teramat fundamental, menyoal ruh yang akan ditupuk ke badan republik sedari awal. Pertanyaan itu merupakan awal pembicaraan panjang mengenai dasar dan konstitusi negara kita.

Satu dari sedikit anggota yang tampil menguraikan dasar negara atau "*philosofische grondslag*" di muka sidang ialah Bung Karno. Pidato 1 Juni 1945 sang penyambung lidah rakyat dibalas tepuk tangan yang riuh bergemuruh. Esensi pidato itulah yang akhirnya "ditumbuk" bersama panitia kecil sehingga melahirkan Pancasila, dasar berdirinya negara kita. Rangkaian pertemuan, musyawarah dan perjuangan para pendiri bangsa ini terkulminasi dalam proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang melahirkan Indonesia sebagai

SATU NEGARA.

Satu Negara



1945

Tapi Belanda belum rela, mereka ingin menghidupkan kembali pendudukan dengan mendorong konsep negara persemakmuran. Mereka hanya mengakui kedaulatan RI untuk wilayah Jawa, Sumatra dan Madura. Melalui serangkaian upaya, Belanda merayu para perwakilan dari berbagai wilayah Indonesia untuk mendukung pembentukan negara federal dengan taktik lama, *divide et impera*.

Belanda menggunakan dua strategi sepanjang 1947-1949, yaitu diplomasi serta agresi militer. Kepiawaian para tokoh Indonesia mengundang simpati masyarakat internasional dan berhasil melibatkan PBB untuk menengahi. Dalam Konferensi Meja Bundar (1949), pemerintah Indonesia secara taktis menyetujui dibentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), yang terbagi dalam tujuh negara bagian dan sembilan satuan kenegaraan.

Berbulan-bulan Mohammad Natsir, melobi para pimpinan fraksi di parlemen dan menemui tokoh-tokoh di daerah. Misinya tunggal: mendirikan negara kesatuan melalui prosedur parlementer. Pada 3 April 1950, Natsir menyampaikan Mosi Integral di parlemen yang berisi desakan untuk mengembalikan sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka negara kesatuan. Wakil Presiden sekaligus Perdana Menteri Mohammad Hatta menerima dengan baik Mosi Natsir dan bahkan menyebutnya sebagai "Proklamasi Kedua". April hingga Mei 1950, satu persatu negara bagian dan satuan kenegaraan menggabungkan diri kepada Republik Indonesia. Mosi Integral Natsir menandakan lahirnya kita sebagai

SATU NKRI.

Tetapi, sebagai negara kepulauan, Indonesia hanya menguasai wilayah daratan pulau-pulau dan wilayah perairan yang hanya tiga mil dari garis pantai, mengacu pada *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnatie 1939*. Indonesia telah bersatu dalam kerangka NKRI, tapi kapal-kapal asing bebas melintas perairan kita di luar batas tiga mil. Pulau-pulau bukan direkatkan tapi dipisahkan oleh laut, kedaulatan kita belum sempurna.

Pada 13 Desember 1957, Djoeanda Kartawidjaja membuat pernyataan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki corak sendiri. Oleh karena itu, wilayah Indonesia mencakup laut sekitar, di antara, dan di dalam kepulauan Indonesia, semua menyatu dalam kesatuan kedaulatan wilayah NKRI. Pada awalnya, Deklarasi Djuanda ini tidak mendapatkan dukungan dunia, diperlukan perjuangan 25 tahun lamanya, hingga akhirnya dunia internasional mengakui Indonesia sebagai Negara Kepulauan melalui Konvensi PBB tentang Hukum Laut II 1982 (UNCLOS 1982); Mochtar Kusumaatmadja merupakan tokoh kunci dibalik sukses ini.

UNCLOS memberikan pengakuan atas Laut Teritorial Indonesia sejauh 12 mil dari garis pantai serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan. Djoeanda tak sempat melihat langsung mimpiya menjadi kenyataan karena wafat pada 1963 dan perjuangannya dilanjutkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Deklarasi Djuanda 1957 menjadi awal dari munculnya UNCLOS 1982, menandakan kelahiran Indonesia sebagai **SATU TANAH AIR**.

Satu NKRI



1950

Satu Tanah Air



1957-1982

Belum Satu Kemakmuran

Belum Satu Kemakmuran

Tahun ini kita telah memasuki usia kemerdekaan yang ke-78. Kedaulatan sudah bulat dan penuh di tangan, berbagai capaian pun telah diraih sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo. Kendati pun kita masih memiliki begitu banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan.

Kita berhasil menjadi satu bangsa, satu negara, satu NKRI dan satu tanah air. Namun, ada satu hal yang masih samar dalam mozaik perjalanan Indonesia, **Satu Kemakmuran**. Masih banyak rakyat yang sulit mendapatkan akses kesehatan dan pendidikan yang layak dan terjangkau. Kemiskinan masih sangat kasat mata, pengangguran ada di mana-mana. Di lain sisi, ketimpangan ekonomi dan kesempatan masih sangat menganga.

Rakyat di Pulau Jawa secara umum mendapatkan kebutuhan pokok dengan mudah dan dengan harga lebih terjangkau dibandingkan dengan rakyat di luar Jawa, apalagi di kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman. Mereka yang tinggal di gugusan kepulauan nusantara harus merantau demi mendapatkan pendidikan yang berkualitas, faktanya 9 dari 10 kampus terbaik Indonesia ada di Pulau Jawa. Banyak daerah kehilangan talenta terbaik mereka karena tersedot oleh kesempatan yang dijanjikan kota-kota besar, terutama di Jawa; padahal idealnya mewujudkan mimpi dapat dilakukan tanpa harus meninggalkan kampung halamannya.

Tuhan Maha Pemurah, Ia mengkaruniai Indonesia alam yang indah, ramah dan kaya. Pangan, migas, kelapa sawit, batu bara, mineral, hasil laut

dan sederet hasil alam lainnya membuat dunia terpesona. Sayangnya, manfaat dari kekayaan alam itu tidak dirasakan secara adil dan merata. Mereka yang tinggal di sekitar kekayaan alam itu berada, seringkali tidak ikut terlibat dalam rantai pasok ekonomi, walau mereka ikut merasakan dampak lingkungan yang diakibatkan. Di atas kertas, laut menyatukan pulau-pulau kita, tetapi realitanya, mengirimkan hasil bumi dari Kalimantan, Sumatra, Sulawesi dan Papua ke Jawa atau pulau-pulau lainnya, jauh lebih mahal daripada mengirimkan produk yang sama dari Australia, Tiongkok, India, atau Pakistan.

Kualitas hidup di desa hampir selalu lebih buruk daripada di kota dan hubungan antara kota dan desa cenderung eksplotatif. Sektor pertanian dan kelautan yang teramat penting dan mempekerjakan sekitar 30% tenaga kerja kita, justru menjadi simpul kemiskinan. UMKM dan Koperasi yang semestinya menjadi motor kesejahteraan masyarakat, tidak mampu berperan karena belum diperankan.

Para pendiri bangsa dan pemimpin-pemimpin terdahulu telah menanamkan fondasi yang kuat. Tugas kita ke depan adalah mewujudkan keadilan sosial yang sebenarnya, melalui **Satu Kemakmuran**. Kondisi di mana kesejahteraan diwujudkan secara berkeadilan. Kondisi di mana negara membarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kondisi di mana setiap keluarga berkecukupan dalam kebutuhan dasar, bisa menabung dan bisa merencanakan masa depan.



“

Keadilan Sosial bagi
Seluruh Rakyat
Indonesia.

Sila Ke-5 Pancasila

”

Pentingnya Kualitas Manusia

Kekuatan terbesar bangsa ini untuk mewujudkan kemajuan adalah manusianya. Dari segi jumlah, Indonesia masuk lima besar populasi dunia. Saat ini, jumlah penduduk Indonesia sekitar 278 juta, di bawah India dan Tiongkok (masing-masing sekitar 1,4 miliar), dan Amerika Serikat (340 juta). Jumlah populasi ini membuat Indonesia berpengaruh secara geopolitik dan geostrategis.

Sensus penduduk tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) mencapai 191 juta jiwa atau 70,7% dari total penduduk. Besarnya porsi penduduk usia muda ini disebut "bonus demografi", kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk non-produktif. Persoalannya, bonus demografi akan menjadi keuntungan jika kita berhasil mewujudkan generasi muda terdidik dan berkualitas. Jika tidak, ia akan berubah menjadi "tsunami demografi".

Faktanya, generasi muda belum mendapatkan pendidikan bermutu, bahkan mayoritas hanya lulusan SD. Sekitar 80% populasi Indonesia berpendidikan terakhir SMP, hanya 6,4% yang

mengenyam pendidikan tinggi. Dari segi kompetensi, menilik Skor PISA (Program for International Student Assessment) terakhir tahun 2018, siswa kita bahkan menunjukkan penurunan skor di semua area, yaitu membaca, matematika, dan sains. Dalam peringkat Global Talent Competitiveness Index 2022, Indonesia berada di urutan ke-82 dari 133 negara di dunia, di bawah negara tetangga ASEAN lainnya.

Indonesia harus melakukan investasi yang serius untuk menaikkan kualitas dan akses pendidikan. Laboratorium sains, bengkel kerja, dan perpustakaan harus dibangun di semua sekolah yang membutuhkan. Anggaran dan daya saing riset perlu ditingkatkan. Guru dan tenaga kependidikan yang menjadi kunci perbaikan kualitas pendidikan penting untuk diperbaiki kompetensi dan kesejahteraannya, termasuk dengan mengangkat guru honorer yang menunjukkan kinerja yang baik.



Kemiskinan, Pengangguran dan Ketimpangan

Kemiskinan adalah masalah berat berikutnya. Sekitar 7 dari 10 (68%) orang Indonesia atau 187 juta warga tidak mampu membeli makanan dengan gizi seimbang. Sekitar 8 dari 10 petani Indonesia tergolong petani gurem dan kecil dengan penguasaan lahan di bawah 2 hektar. Karena kemiskinan pula, 1 dari 5 balita Indonesia mengalami *stunting*. Kesehatan fisik dan mental masih menjadi masalah. Keduanya kebanyakan berakar dari isu kemiskinan, sehingga mengatasi kemiskinan artinya mengatasi banyak masalah di masa mendatang.

Persoalan kemiskinan erat hubungannya dengan masalah pengangguran yang kian hari kian mengkhawatirkan. Fakta menunjukkan bahwa saat ini terdapat sekitar 8 juta orang di Indonesia yang menganggur. Angka ini pun problematik, karena diukur dengan kriteria pengangguran yang sangat longgar, di mana orang dianggap bekerja apabila dalam seminggu terakhir bekerja minimal 1 jam, baik dibayar atau tidak. Realitasnya, angka pengangguran melejit di atas 50 juta jika kriteria bekerja dinaikkan menjadi 35 jam seminggu dan dibayar.

Sekitar 76% pengangguran adalah lulusan SD dan SMP, ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan keahlian yang mereka miliki. Hal ini perlu segera diatasi dengan intervensi di dalam sekolah melalui perbaikan sarana praktikum ataupun di luar sekolah melalui kelas industri dan balai pelatihan kerja yang modern. Proses pendidikan dan pelatihan harus relevan dengan perkembangan dunia usaha dan industri.

Masalah kemiskinan dan pengangguran membuka lebar jurang ketimpangan antara si kaya dan si miskin. Kota-kota besar di Indonesia menjadi tempat di mana ketimpangan sosial dan ekonomi tergambar jelas. Kota adalah tempat di mana orang-orang dengan kekayaan melimpah dapat hidup dengan nyaman, sementara di sudut-sudut kota, banyak keluarga miskin berjuang untuk sekadar hidup. Negara harus hadir untuk memitigasi ketimpangan sosial agar tidak menjadi friksi dan konflik antar kelas.

Di tingkat nasional, ketimpangan tercermin dalam distribusi pendapatan dan kekayaan. Menurut World Inequality Report 2021, rasio ketimpangan pendapatan di Indonesia mencapai 1 banding 19, artinya populasi yang berada di kelas ekonomi paling atas memiliki pendapatan rata-rata sebanyak 19 kali lipat daripada pendapatan

populasi yang berada di kelas ekonomi terbawah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan negara seperti Amerika Serikat, yang memiliki tingkat rasio 1 banding 17, serta Rusia, Tiongkok, Korea Selatan, dan Nigeria dengan rasio 1 banding 14.

Sementara itu, dalam hal distribusi kekayaan, 10% dari penduduk dengan tingkat kekayaan tertinggi menguasai sekitar 60% dari seluruh kekayaan rumah tangga. Lebih lanjut, 1% dari penduduk dengan kekayaan tertinggi menguasai sekitar 29,4% dari total kekayaan tersebut. Laporan Credit Suisse tahun 2022 bahkan mengungkapkan fakta yang lebih dramatis, bahwa 10% penduduk dengan kekayaan tertinggi menguasai sekitar 67% total kekayaan nasional, sedangkan 40% terbawah hanya menguasai 2,1% saja.

Belum lagi muncul fenomena baru yang berpotensi memperparah ketimpangan, yakni fenomena generasi sandwich. Generasi sandwich adalah pekerja produktif yang tidak bisa menikmati hasil kerjanya secara utuh karena harus menanggung penghidupan keluarganya. Sensus Penduduk tahun 2020 menunjukkan 71,6 juta jiwa atau 26,5% penduduk Indonesia adalah generasi sandwich. Dampaknya, generasi ini akan sulit mendapatkan penghidupan yang layak bagi dirinya sendiri sehingga rentan jatuh ke dalam kemiskinan, dan memperparah ketimpangan.

“

Negara harus
hadir untuk
memitigasi
ketimpangan
sosial

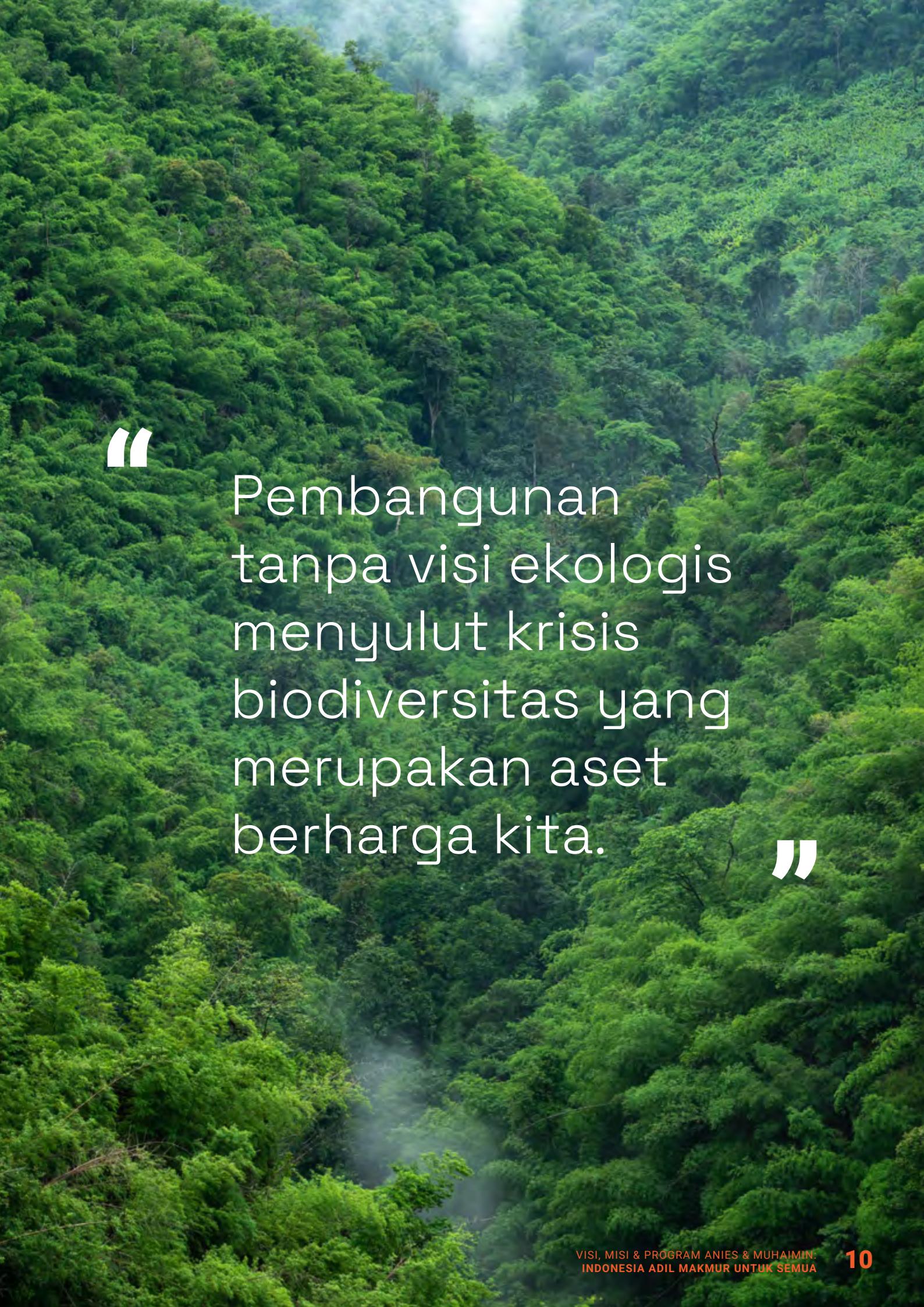
”

Krisis Iklim Global

Sebagai upaya mewujudkan kemakmuran, pemerintahan di banyak negara termasuk Indonesia mengimplementasikan program pembangunan dengan tujuan memacu pertumbuhan ekonomi. Namun praktik pembangunan yang terlalu agresif menghasilkan dampak lingkungan yang tidak kecil, yaitu terjadinya polusi skala besar dalam tiga unsur: udara, air, dan tanah. Polusi ini berdampak langsung pada kesehatan rakyat dan kualitas lingkungan hidup. Pembangunan tanpa visi ekologis juga menyulut krisis biodiversitas yang merupakan aset berharga kita.

Di sisi lain, krisis iklim yang merupakan fenomena global telah menimbulkan efek serius di Indonesia. Akibat naiknya permukaan laut, di pesisir utara Jawa terjadi penurunan muka tanah secara drastis. Di daerah seperti Pekalongan, Cirebon, dan Semarang dalam kisaran 0,3 hingga 11 sentimeter per tahun. Dampaknya adalah peningkatan risiko banjir rob yang parah, seperti yang terjadi pada tahun 2022. Di Aceh Besar, tahun 2017 dan 2021 mencatat kegagalan panen yang konsisten akibat perubahan pola cuaca yang mengakibatkan banjir dan kekeringan secara bersamaan di berbagai lokasi. Sementara di wilayah Maluku terlihat perubahan pola penangkapan ikan tuna yang semakin jauh dari lokasi sebelumnya akibat perubahan suhu laut yang nyata. Semua ini menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim di Indonesia harus segera dimitigasi oleh pemerintah dengan bekerja sama dengan seluruh unsur masyarakat.





“ Pembangunan tanpa visi ekologis menyulut krisis biodiversitas yang merupakan aset berharga kita. ”

Indonesia Perlu Perubahan

Kualitas manusia yang belum memadai, kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan krisis iklim adalah masalah utama dari daftar panjang masalah yang harus segera diselesaikan oleh negeri ini jika kita ingin mewujudkan **"Satu Indonesia Satu Kemakmuran"** sebelum usia 100 tahun terlewati.

Perubahan menjadi kata kunci. Kompleksitas dan skala masalah yang begitu besar membutuhkan paradigma, sistem tata kelola, dan pendekatan kebijakan yang baru dan berbeda dari apa yang ada sekarang. Dengan etos perubahan, kepemimpinan nasional harus mampu mengembalikan tujuan utama bernegara, yakni mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara yang maju dan berkeadilan.

Empat aspek perubahan harus menjadi fokus pergeseran paradigma: (1) dari persoalan penyelenggara pemerintahan menjadi persoalan rakyat, (2) dari cara pandang sektoral menjadi kawasan, (3) dari fokus pada pertumbuhan semata menjadi fokus pada pertumbuhan dan keberlanjutan, dan (4) dari pendekatan ego sentris menjadi pendekatan kolaborasi dan gotong royong.

Tentu saja perubahan bukan berarti menghilangkan apa yang sudah dibangun sebelumnya. Bagaimanapun prinsip *"continuity and change"* (perubahan dan kelanjutan) adalah keniscayaan dan ini wajib menjadi nafas kepemimpinan ke depan. Pergantian pimpinan nasional hendaknya dijadikan ruang refleksi atas perjalanan bangsa ini setiap lima tahun. Dari refleksi ini kita perlu cara kerja baru yang inovatif dan berkelanjutan, bukan bersikap *"business as usual"*, seolah-olah kita baik-baik saja.

Perubahan membutuhkan persatuan. Tidak ada perubahan tanpa dukungan dari seluruh unsur kebangsaan. Agenda perubahan adalah kerja kolektif di bawah kepemimpinan nasional yang mumpuni, berintegritas, dan kolaboratif. Melalui kolaborasi lintas sektor, lintas kelompok, lintas wilayah, dan lintas generasi, kita akan mampu bersama-sama sampai pada cita-cita Indonesia yang maju, makmur, dan berkeadilan. Sebuah Negara Indonesia yang menghadirkan rasa aman dalam berdemokrasi, rasa setara dalam berekonomi, dan rasa adil dalam hukum. **Satu Indonesia Satu Kemakmuran** adalah potret masa keemasan Indonesia pada tahun 2045 yang harus kita bangun bersama, sebagai tanggung jawab sejarah kita untuk melengkapi **Satu Bangsa, Satu Negara, Satu NKRI**, dan **Satu Tanah Air** yang telah diwujudkan oleh generasi terdahulu.

EMPAT PERUBAHAN PARADIGMA

1.

Persoalan
Penyelenggara
Pemerintahan

PERSOALAN
RAKYAT

2.

Cara Pandang
Sektoral

CARA PANDANG
KAWASAN

3.

Fokus
Pertumbuhan
Semata

FOKUS
PERTUMBUHAN &
KEBERLANJUTAN

4.

Pendekatan
Egosentris

PENDEKATAN
KOLABORASI &
GOTONG ROYONG



**SATU BANGSA
SATU NEGARA
SATU NKRI
SATU TANAH AIR**

SATU KEMAKMURAN

Visi Indonesia Adil Makmur untuk Semua

Untuk membangun visi suatu negara dan bangsa yang begitu besar dan begitu luas seperti Indonesia, kami, Anies Rasyid Baswedan dan Abdul Muhamimin Iskandar, melakukan perjalanan panjang tanpa lelah dari Aceh hingga Papua. Kami bertemu, bertatap muka, mendengar, dan berbicara dengan rakyat Indonesia dari berbagai usia, latar belakang budaya, pendidikan, profesi, status sosial ekonomi, dan agama. Kami juga berdiskusi dengan ribuan tokoh masyarakat, pemikir dan akademisi, pemuka agama dan aktivis. Perjalanan panjang tersebut memberi bukti bahwa kehidupan rakyat saat ini masih dipenuhi berbagai masalah. Dan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi semua, yang dibutuhkan adalah perubahan.

Perubahan tidak hanya suatu keinginan, tetapi juga suatu keniscayaan. Apa yang kami dengar dan kami tangkap dari rakyat semakin menguatkan tekad kami untuk melakukan perubahan yang lebih baik bagi negeri. Dengan perubahan sebagai dasar gagasan, kami mengusung visi yang merupakan impian jutaan rakyat Indonesia, yakni:

“Indonesia Adil Makmur untuk Semua”



Indonesia yang makmur menjadikan kemiskinan dan ketimpangan sebagai masa lalu. Kemakmuran ditandai oleh layanan publik yang terjangkau dan berkualitas bagi setiap warga negara, mulai dari kesehatan, pendidikan, perumahan, pangan, transportasi, energi, dan informasi. Indonesia yang makmur dan ditopang oleh industri kompetitif yang menghasilkan produk kelas dunia. Indonesia yang makmur disegani bangsa-bangsa dunia karena kekuatan ekonomi, teknologi, dan militer.

Kemakmuran Bangsa Indonesia harus dibarengi dengan pelestarian alam dan lingkungan. Karena alam Indonesia adalah warisan generasi masa lalu sekaligus pinjaman generasi masa depan yang harus kita rawat sebaik-baiknya. Dalam Indonesia yang makmur, setiap warganya hidup dalam lingkungan yang bersih, bebas polusi, dan terlindungi dari bencana ekologis. Indonesia senantiasa menjaga hutan, air, sungai, gunung, laut, dan keragaman hayati agar dapat dinikmati oleh generasi kini dan masa depan, dan berkontribusi kepada kesehatan Bumi.

Indonesia yang makmur adalah negara yang berkeadilan, di mana setiap warga negara memiliki akses ke layanan publik tanpa kecuali. Indonesia di mana kesempatan untuk hidup layak dan bahagia dapat dicapai oleh setiap anak bangsa apapun agamanya, jenis kelaminnya, sukulnya, bahasanya, usianya, dan keadaan tubuhnya. Indonesia di mana setiap individu memiliki kebebasan berpendapat dan memiliki kesempatan setara untuk menjadi apa saja yang terbaik bagi mereka. Indonesia di mana setiap anak bangsa mendapat hak dan perlakuan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali. Indonesia di mana hak-hak asasi setiap warganya dilindungi oleh Negara sebagai tanggung jawab konstitusional.

Inilah visi kami yang akan kami wujudkan jika diberi amanah untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

Misi

8 Jalan Perubahan

Visi tersebut, akan diwujudkan dalam delapan Misi, yang merupakan langkah konkret untuk mewujudkan perubahan menuju Indonesia yang lebih maju dan lebih adil. Delapan misi tersebut kami sebut sebagai: **"8 JALAN PERUBAHAN"**

Delapan misi tersebut akan dijabarkan, dalam bentuk agenda dan program sebagai berikut:

MISI

1.

Memastikan Ketersediaan Kebutuhan Pokok dan Biaya Hidup Murah melalui Kemandirian Pangan, Ketahanan Energi, dan Kedaulatan Air

MISI

2.

Mengentaskan Kemiskinan dengan Memperluas Kesempatan Berusaha dan Menciptakan Lapangan Kerja, Mewujudkan Upah Berkeadilan, Menjamin Kemajuan Ekonomi Berbasis Kemandirian dan Pemerataan, serta Mendukung Korporasi Indonesia Berhasil di Negeri Sendiri dan Bertumbuh di Kancah Global



MISI

3.

Mewujudkan Keadilan Ekologis Berkelanjutan untuk Generasi Mendatang

MISI

4.

Membangun Kota dan Desa Berbasis Kawasan yang Manusia, Berkeadilan dan Saling Memajukan

MISI

5.

Mewujudkan Manusia Indonesia yang Sehat, Cerdas, Produktif, Berakhlaq, serta Berbudaya

MISI

6.

Mewujudkan Keluarga Indonesia yang Sejahtera dan Bahagia sebagai Akar Kekuatan Bangsa

MISI

7.

Memperkuat Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara, serta Meningkatkan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kancah Politik Global untuk Mewujudkan Kepentingan Nasional dan Perdamaian Dunia

MISI

8.

Memulihkan Kualitas Demokrasi, Menegakkan Hukum dan HAM, Memberantas Korupsi Tanpa Tebang Pilih, serta Menyelenggarakan Pemerintahan yang Berpihak pada Rakyat



MISI 1

MEMASTIKAN KETERSEDIAAN KEBUTUHAN POKOK DAN BIAYA HIDUP MURAH MELALUI KEMANDIRIAN PANGAN, KETAHANAN ENERGI, DAN KEDAULATAN AIR

Kebutuhan pokok adalah hak dasar setiap warga negara. Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap pangan, hunian, energi, dan air yang terjangkau adalah prasyarat bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Memenuhi kebutuhan dasar adalah langkah pertama negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi rakyatnya. Negara harus mewujudkan kemandirian pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air untuk memastikan bangsa Indonesia mampu melanjutkan perbaikan kesejahteraan dalam jangka panjang. Khusus untuk pangan, harus didorong "kemandirian", guna memastikan Indonesia (sebagai bangsa agraris) bekerja keras memaksimalkan potensi sumber daya untuk memproduksi pangan. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada impor produk pangan strategis, menekan risiko krisis pangan akibat dinamika global, dan sekaligus menyejahterakan para petani (mewakili sekitar 30% tenaga kerja) yang mayoritas belum sejahtera.

Agenda Misi 1

1. KEMANDIRIAN PANGAN

- ▶ Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pupuk, bibit, pestisida, pakan ternak, dan obat-obatan pertanian;
- ▶ Memberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) dengan teknologi terkini termasuk alat pengering (*dryer*) serta membangun fasilitas gudang untuk menurunkan tingkat kehilangan, tingkat penyusutan, dan menjaga kualitas panen, serta mengatur suplai (terutama di saat musim panen dan musim kekurangan) untuk menjaga stabilitas harga;
- ▶ Melaksanakan "Revolusi Agromaritim" di mana untuk produk tertentu pertanian, petani tidak perlu memikirkan pasar dan harga jual, sehingga petani dapat fokus pada peningkatan produktivitas. Pasar dan harga jual akan difasilitasi oleh pemerintah melalui tata niaga yang transparan dan akuntabel demi tercapainya kesejahteraan petani, di antaranya melalui:
 - Pemberian kepastian pembelian hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani, termasuk melalui *contract farming*;
 - Peningkatan stabilisasi harga jual hasil panen termasuk melalui optimalisasi resi gudang;
 - Penyediaan pendanaan murah dan mudah untuk membantu meningkatkan hasil produksi pangan dan harkat kehidupan petani, pekebun dan peternak pada setiap tahapan produksi.

- ▶ Meminimalkan impor dan meningkatkan produksi pangan untuk mengurangi risiko dan gejolak pasokan pangan akibat perubahan iklim dan dinamika geopolitik;
- ▶ Mendorong diversifikasi bahan pangan berbasis produk lokal;
- ▶ Memperkuat riset dan inovasi bibit, benih dan pupuk, serta memfasilitasi penerapan hasil riset nasional, di lapangan;
- ▶ Membangun dan merevitalisasi jaringan irigasi dan logistik untuk menaikkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi;
- ▶ Menyediakan penyuluhan pertanian di setiap desa untuk membantu petani mempraktikkan teknik pertanian terkini dan terbaik, melalui program "BAHU DESA" (Bantuan Hukum dan Usaha);
- ▶ Menyebarluaskan tenaga kerja produktif dan meningkatkan produksi pangan untuk memanfaatkan momentum bonus demografi;
- ▶ Melaksanakan kebijakan afirmasi bagi petani untuk memperoleh akses terhadap lahan;
- ▶ Melaksanakan industrialisasi sektor pertanian, untuk menghasilkan produk bernilai tinggi;
- ▶ Melaksanakan transformasi kelembagaan, guna memperbaiki koordinasi sektor pangan antar Kementerian dan Lembaga (K/L), terutama antara beberapa fungsi di bawah



kementerian yang mengurus perindustrian, perdagangan dan pertanian;

► Meningkatkan daya saing subsektor perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan kehutanan, dengan:

- › Membangun tata niaga yang adil dan efisien;
- › Mendorong riset, inovasi, dan industrialisasi untuk menghasilkan produk bernilai tinggi;
- › Mengakhiri praktik monopoli bibit, pupuk, pakan ternak, dan penyerapan produk;
- › Memfasilitasi para pekebun untuk melakukan peremajaan tanaman, terutama karet, kopi, cokelat dan sawit;
- › Memberi kemudahan sertifikasi peternakan bagi peternak;
- › Mengefektifkan peran penyuluhan, untuk memastikan para petani bekerja dengan teknologi dan cara terbaik;
- › Memberikan kepastian terwujudnya ekosistem usaha yang saling menyejahterakan bagi koperasi dan korporasi; dan
- › Menerapkan *sustainable forest management*, dan menghentikan deforestasi hutan, terutama di Kalimantan, Sumatra dan Papua, untuk mempertahankan fungsi sebagai paru-paru dunia.
- › Memberikan kepastian pengawasan untuk membentuk pasar yang adil



2. KEMUDAHAN AKSES HUNIAN

- ▶ Menyediakan hunian layak, dekat pusat kota, dan dengan harga terjangkau bagi semua kalangan, termasuk anak muda dan pekerja informal;
- ▶ Menyediakan program KPR bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk untuk anak muda yang belum memiliki rumah;
- ▶ Menyediakan hunian layak dengan sistem sewa yang terjangkau.

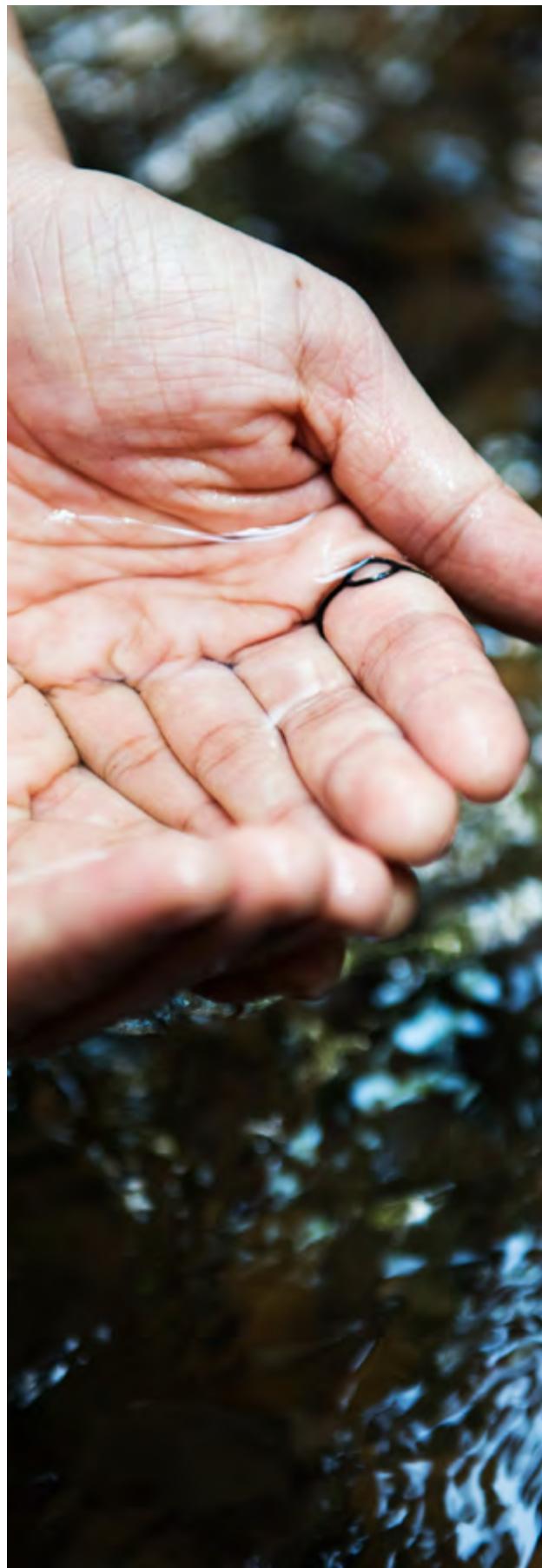
3. KETAHANAN ENERGI

- ▶ Membudayakan perilaku hemat energi, melalui edukasi masyarakat dan insentif kebijakan, serta memperbaiki ketepatan sasaran subsidi energi melalui perbaikan data dan pendekatan teknologi;
- ▶ Mewujudkan perencanaan produksi dan ekspor energi yang berorientasi kepentingan nasional, dengan mempertimbangkan keamanan suplai dan cadangan dalam negeri;
- ▶ Menjalin kerja sama dengan negara-negara produsen energi, termasuk negara-negara di Afrika, Eropa Timur, Amerika Latin, Asia Tengah dan Timur Tengah, untuk mendapatkan energi murah;
- ▶ Meningkatkan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional hingga ke tingkat yang aman, untuk menjamin ketersediaan BBM dan memungkinkan dilakukannya perencanaan impor yang matang, untuk mendapatkan harga terbaik;
- ▶ Memperkuat tata kelola importasi energi, terutama migas, untuk menekan ruang gerak para spekulan guna memberikan harga terbaik bagi rakyat;
- ▶ Menerapkan teknologi terkini, untuk memaksimalkan efisiensi eksplorasi, termasuk menerapkan *Enhanced Oil Recovery* di berbagai sumur minyak bumi di Indonesia, yang sudah tua;

- ▶ Melakukan renegosiasi dan merealisasikan kesepakatan produksi energi yang tertunda, termasuk proyek Masela;
- ▶ Melaksanakan program “Indonesia Menuju EBT” melalui diversifikasi energi, termasuk bioenergi, panas bumi, air terjun, angin, hidrogen, dan tenaga surya, dengan dukungan pemerintah dari sisi pembiayaan maupun pemetaan potensi, serta dengan memaksimalkan transfer teknologi;
- ▶ Memaksimalkan peran panas bumi, di mana Indonesia memiliki sekitar 40% cadangan dunia, sebagai sumber energi penting, dengan mendorong penemuan cadangan terbukti oleh pemerintah, untuk menurunkan risiko dan meningkatkan daya tarik investasi;
- ▶ Membuka peluang bagi masyarakat dan komunitas, untuk memproduksi EBT dan memasarkannya ke Perusahaan Listrik Negara (PLN), guna mendorong pertumbuhan EBT;
- ▶ Mendorong inovasi pembiayaan EBT melalui berbagai pendekatan, termasuk: *project development funding, viability gap financing, and credit enhancement funding*;
- ▶ Memanfaatkan *green financing* dengan bunga yang kompetitif, dan merealisasikan peluang *carbon trading* dan bursa karbon guna mendapatkan sumber pendanaan murah dari luar negeri;
- ▶ Membentuk Dana Abadi (*Resource Endowment Fund*) berasal dari pendapatan sumber daya alam (SDA), yang dialokasikan untuk riset EBT, peningkatan kualitas manusia, dan untuk memberikan insentif bagi penerapan EBT;
- ▶ Mendorong penggunaan kendaraan umum oleh masyarakat melalui edukasi, perbaikan sarana-prasarana, peningkatan layanan dan keekonomian harga tiket, yang diikuti dengan konversi menuju kendaraan umum listrik.

4. KEDAULATAN AIR

- ▶ Memperbaiki tata kelola sumber daya air dengan mengedepankan kedaulatan, keadilan atas air, dan keberlanjutan;
- ▶ Memastikan setiap rumah tangga di Indonesia dapat menikmati air layak minum dengan biaya terjangkau;
- ▶ Memastikan pemanfaatan air permukaan yang bijak untuk berbagai sektor termasuk industri dan sektor pertanian;
- ▶ Menjamin setiap rumah tangga di Indonesia, termasuk di Kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman, dapat menikmati air dengan kualitas yang baik dengan biaya terjangkau;
- ▶ Menjamin kelangsungan sumber daya air melalui penegakan, pengendalian, dan pembangunan berdasarkan tata ruang yang mempertimbangkan konservasi sumber daya air;
- ▶ Memastikan konservasi cadangan air tanah melalui pengendalian eksploitasi air tanah secara masif, serta mendorong kota-kota menerapkan prinsip *sponge city*;
- ▶ Memastikan ketersediaan infrastruktur guna menjamin ketersediaan air bagi kegiatan sehari-hari masyarakat serta untuk pertanian dan perkebunan dengan sistem irigasi yang difasilitasi pemerintah;
- ▶ Mewujudkan keberlanjutan sektor air melalui penyediaan infrastruktur daur ulang air, pengolahan air limbah untuk biogas, dan peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengolahan air di tingkat keluarga.



MISI 2

**MENGENTASKAN KEMISKINAN DENGAN
MEMPERLUAS KESEMPATAN BERUSAHA
DAN MENCiptakan LAPANGAN KERJA,
MEWUJUDKAN UPAH BERKEADILAN,
MENJAMIN KEMAJUAN EKONOMI
BERBASIS KEMANDIRIAN DAN
PEMERATAAN, SERTA MENDUKUNG
KORPORASI INDONESIA BERHASIL DI
NEGERI SENDIRI DAN BERTUMBUH DI
KANCAH GLOBAL**

Negara perlu memastikan angkatan kerja mendapat pekerjaan, keluarga bisa menabung serta merencanakan masa depan. Negara berperan dalam menyuburkan kewirausahaan, menciptakan lapangan kerja dan menguatkan sistem perlindungan sosial. Sehingga kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan turun secara signifikan. Terkait hal ini diperlukan kebijakan moneter dan fiskal yang penuh terobosan. Selain itu dibutuhkan industrialisasi, pengembangan dan optimalisasi sektor maritim dan sumber daya alam. Misi ini juga mencakup pembaharuan BUMN agar berfungsi optimal dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan, pemberdayaan koperasi yang bertumbuh kembang sesuai amanat konstitusi, dan pengembangan UMKM yang selama ini mempekerjakan mayoritas angkatan kerja.

Agenda Misi 2

1. PENGENTASAN KEMISKINAN

- ▶ Memperbaiki bantuan sosial yang bersifat langsung ("memberi ikan") seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan perbaikan ketepatan sasaran;
- ▶ Meningkatkan program yang bersifat tidak langsung ("memberi kail") berupa insentif dan kebijakan untuk menumbuhkan sektor riil yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan aktivitas ekonomi produktif lainnya;
- ▶ Mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan melalui pendekatan multisektor dengan target menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,36% (Maret, 2023) menjadi 4,0%-5,0% (2029); dan kemiskinan ekstrem ~0% (2026);
- ▶ Memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok rakyat, terutama pangan dan papan, termasuk melalui program "JAS MERAH PUTIH", Jaringan Pasar Penyedia Kebutuhan Pokok Murah berbasis komunitas di desa dan kantong kemiskinan kota;
- ▶ Memastikan akses dan keterjangkauan biaya layanan publik bagi masyarakat segmen ekonomi menengah dan bawah, termasuk transportasi, pendidikan, dan kesehatan;
- ▶ Memperbaiki akurasi data kemiskinan, digitalisasi database kemiskinan Indonesia serta digitalisasi sistem *monitoring* dan evaluasi program pengentasan kemiskinan;

- ▶ Membangun ekosistem *Food Bank* sebagai jembatan (redistribusi) antara pihak yang surplus makanan dengan yang membutuhkan makanan;
- ▶ Mewujudkan sistem jaminan sosial yang tepat sasaran, komprehensif, dan inklusif melalui perluasan kepesertaan khususnya bagi kelompok informal miskin, lansia, dan rentan tanpa menciptakan ketergantungan;
- ▶ Membentuk kelembagaan sistem jaminan sosial yang merupakan payung bagi seluruh program perlindungan sosial yang dikelola oleh sebuah badan yang bekerja secara profesional untuk meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan efektivitas program.

2. PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA BERKUALITAS

- ▶ Menciptakan minimal 15 juta lapangan pekerjaan baru termasuk pekerjaan hijau/*green jobs* pada 2025-2029;
- ▶ Menciptakan lapangan kerja berkualitas di seluruh sektor, termasuk di sektor industri manufaktur, guna menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 5,45% (Feb 2023) menjadi 3,5%-4,0% (2029);
- ▶ Melakukan pemetaan kebutuhan (jumlah dan kompetensi) tenaga kerja di masa mendatang serta menyiapkan suplai tenaga kerja yang sesuai melalui kolaborasi pemerintah, swasta, dan dunia pendidikan;

- ▶ Membentuk *Skill Development Fund* di bawah Kementerian Tenaga Kerja bekerja sama dengan asosiasi industri untuk mempercepat pelatihan kerja dan mengembangkan profesi dan bisnis;
- ▶ Menaikkan batas Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) secara rasional untuk mendorong industri komponen lokal dalam membuka lapangan kerja berkualitas melalui pelibatan dunia usaha;
- ▶ Menciptakan lapangan kerja berkualitas dan menurunkan proporsi pekerja sektor informal dari 60,12% (Feb 2023) menjadi 50% (2029);
- ▶ Penegakkan peraturan ketenagakerjaan untuk menata peran Tenaga Kerja Asing (TKA), termasuk dengan memberantas TKA ilegal;
- ▶ Mendorong dunia usaha merekrut dan menstimulasi lebih banyak tenaga kerja lokal, termasuk dengan pembatasan dan disinsentif penggunaan TKA yang berlebihan;
- ▶ Membangun ekosistem kewirausahaan nasional yang mampu melahirkan berbagai usaha rintisan (*start-up*) dan pengusaha muda di berbagai bidang, khususnya sektor industri kreatif;
- ▶ Memberikan dukungan permodalan bagi wirausahawan muda, untuk menekan tingkat pengangguran terbuka;
- ▶ Memastikan setiap proyek pemerintah melibatkan tenaga kerja lokal dengan pendekatan padat karya untuk program tertentu.

3. PEMERATAAN EKONOMI

- ▶ Menerapkan upah minimum yang adil dan sesuai dengan kondisi daerah tanpa memberatkan para pemberi kerja;
- ▶ Menjalankan berbagai kombinasi kebijakan untuk menurunkan tingkat ketimpangan pengeluaran (indeks Gini) dari 0,388 (2023), menjadi 0,36-0,37 (2029);
- ▶ Mewujudkan alokasi APBN yang lebih mencerminkan upaya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi;
- ▶ Mewujudkan kota-kota unggulan sebagai pusat pertumbuhan untuk menekan ketimpangan antar kawasan;
- ▶ Memperbaiki infrastruktur di daerah tertinggal untuk meningkatkan akses masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif;
- ▶ Memperkuat dan memeratakan literasi digital di kalangan masyarakat untuk memanfaatkan perkembangan digital secara konstruktif;
- ▶ Melakukan penguatan keterampilan melalui pelatihan dan pendampingan di kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman untuk meningkatkan kapasitas berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif;
- ▶ Melakukan reformasi kebijakan untuk memungkinkan para pekerja informal mendapatkan akses kredit dari lembaga keuangan.



4.

KESETARAAN AKSES BAGI PEREMPUAN DAN KELOMPOK RENTAN UNTUK BERKARYA

► Menjamin pemenuhan hak perempuan, dengan:

- › Melindungi perempuan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, melalui upaya pencegahan, perlindungan, penanganan, dan rehabilitasi korban melalui layanan krisis terintegrasi, layanan kesehatan dan psikologis gratis bagi korban tindak kekerasan, serta bantuan hukum melalui penguatan peran institusi yang ada;
- › Menjamin kesetaraan perempuan dalam memperoleh pendidikan setinggi-tingginya;
- › Menjamin kesetaraan kesempatan bagi perempuan untuk berkarya dan mengembangkan potensinya di berbagai bidang.

► Menyelenggarakan program "Indonesia Ramah Ibu dan Anak" melalui:

- › Memastikan implementasi cuti hamil dan melahirkan untuk ibu disertai dengan menghadirkan cuti bagi ayah;
- › Menghadirkan tempat penitipan anak yang terjangkau serta ketersediaan ruang laktasi di ruang publik; dan
- › Memberdayakan kaum ibu melalui aktivasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga untuk memastikan tumbuh kembang anak, pendidikan karakter dan kegiatan lainnya.

► Memastikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak kelompok disabilitas, dengan:

- › Memastikan setiap layanan publik dan infrastruktur/fasilitas umum ramah terhadap disabilitas;
- › Memastikan hak pendidikan serta memperbanyak beasiswa khusus hingga perguruan tinggi;
- › Memperluas manfaat bantuan sosial khusus;

› Mendorong kesempatan setara untuk bekerja melalui kuota dengan kriteria penerimaan disesuaikan dengan kondisi objektif kelompok disabilitas;

› Memfasilitasi kewirausahaan melalui akses pelatihan, pendampingan dan permodalan.

► Memastikan penghormatan dan kesejahteraan veteran, purnawirawan polisi/TNI, pensiunan PNS, mantan atlet nasional serta lanjut usia (lansia), melalui:

- › Memastikan kesejahteraan, perlindungan bagi veteran, purnawirawan, pensiunan, mantan atlet, dan lansia;
- › Memberikan kemudahan dalam mendapatkan fasilitas layanan pemerintah, termasuk rumah layak, transportasi dan kesehatan;
- › Menghadirkan aktivitas sosial dan ruang publik untuk memenuhi kebutuhan sosial lansia;
- › Meningkatkan kualitas lembaga perawatan masyarakat lansia berbasis komunitas bagi lansia;
- › Mendorong pengembangan program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun yang inovatif.

► Menjamin pemenuhan hak dasar anak yatim piatu dan terlantar, dengan:

- › Memastikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan potensinya;
- › Memberikan bantuan dan perlindungan sosial;
- › Meningkatkan kualitas Lembaga Kesejahteraan Sosial.



5. KEBIJAKAN FISKAL SEBAGAI PENDORONG PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN

- ▶ Mendorong efisiensi anggaran dengan memprioritaskan belanja produktif dan menekan belanja non produktif untuk menghasilkan ruang fiskal yang lebar dan pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 5,5%-6,5% per tahun (2025-2029);
- ▶ Meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis dan perbaikan kepatuhan pajak untuk meningkatkan rasio pajak dari 10,4% (2022), menjadi 13,0%-16,0% (2029);
- ▶ Memastikan seluruh insentif pajak, termasuk *tax holiday* dan *tax allowance*, dilaksanakan secara terencana dan terkendali untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang optimal dengan risiko fiskal yang minimal;
- ▶ Mengelola utang negara secara bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan menjaga rasio utang terhadap PDB kurang dari 30,0% (2029), turun dari 38,1% (2023);
- ▶ Memperbaiki pengelolaan utang pemerintah untuk mengoptimalkan komposisi: jangka waktu, denominasi mata uang, dan sumber utang dengan proses penerbitan Surat Berharga Negara yang terencana, kompetitif, dan transparan guna memperoleh suku bunga terendah;
- ▶ Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengurangi duplikasi program guna memperbaiki efisiensi dan efektivitas anggaran;
- ▶ Mendorong konsep Penganggaran Multi-Tahun, di mana APBN disusun untuk setidaknya tiga tahun kedepan dalam kerangka *Medium Term Expenditure Framework* untuk meningkatkan kepastian pendanaan sekaligus kehati-hatian fiskal. APBN tahun terdekat disetujui oleh DPR dengan lampiran APBN dua tahun berikutnya.

6. KEBIJAKAN MONETER YANG MENDUKUNG STABILITAS MAKROEKONOMI

- ▶ Mengendalikan inflasi melalui koordinasi antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan target inflasi rata-rata 2,0%-3,0% per-tahun (2025-2029);
- ▶ Menjaga daya saing dan stabilitas nilai tukar Rupiah untuk mendorong ekspor dan mendongkrak investasi;
- ▶ Menata lalu lintas devisa menuju ekonomi yang berdaya saing dan berdaya tahan terhadap guncangan global;
- ▶ Memastikan koordinasi yang erat antara Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjaminan dan Simpanan (LPS), dan Kementerian Keuangan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berdaya tahan;
- ▶ Mengantisipasi perkembangan geopolitik dan ekonomi global guna menjaga stabilitas ekonomi di masa depan;
- ▶ Menjaga dan mendorong independensi dan profesionalisme BI, LPS, dan OJK.



Photo by Annisa Nur Oktaviani
on Unsplash

7. SEKTOR KEUANGAN YANG TANGGUH DAN EFISIEN

- ▶ Menjamin stabilitas sistem keuangan nasional dengan memastikan kesehatan dan efisiensi lembaga keuangan;
- ▶ Mengevaluasi dan memperbaiki berbagai kebijakan terkait perbankan dan lalu lintas devisa untuk meningkatkan likuiditas dan menjaga stabilitas perbankan nasional;
- ▶ Mewujudkan ekosistem yang kondusif, termasuk dengan menjamin kepastian hukum, menyiapkan insentif fiskal, dan mendorong inovasi regulasi bagi bertumbuhnya industri pasar modal, reksadana, asuransi, reasuransi, pembiayaan, penjaminan, dan dana pensiun, menuju industri keuangan yang inklusif, efisien dan andal;
- ▶ Meningkatkan fungsi intermediari perbankan, di antaranya dengan mendorong perbankan, khususnya bank BUMN untuk memperbaiki efisiensi operasional menuju suku bunga kredit yang kompetitif;
- ▶ Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses keuangan untuk meningkatkan kesetaraan kesempatan dan pemerataan kesejahteraan;
- ▶ Memastikan adanya penegakan hukum terhadap penipuan *online*, pinjaman *online*, judi *online*, pengumpulan dana liar, dan praktik-praktik buruk produk keuangan yang melanggar hukum;
- ▶ Mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah untuk meningkatkan kedalaman dan inklusivitas sektor keuangan.

memperbaiki integritas dan koordinasi antar instansi guna menaikkan penerimaan negara;

- ▶ Mengintegrasikan fungsi perencanaan pembangunan dan penganggaran untuk meningkatkan konsistensi dan sinergi;
- ▶ Memastikan proses penataan kelembagaan Keuangan Negara berjalan lancar melalui perencanaan dan eksekusi yang matang.

9. IKLIM INVESTASI DAN KEMUDAHAN BERUSAHA

- ▶ Mempermudah proses memulai dan menjalankan usaha, termasuk dalam hal: (1) mendapatkan izin usaha, (2) mengurus izin mendirikan bangunan, (3) memperoleh akses listrik, (4) mendaftarkan properti, (5) melakukan ekspor-impor, (6) membayar pajak, (7) perlindungan bagi investor, (8) mendapatkan kepastian atas kontrak, dan (9) memperoleh kredit;
- ▶ Memastikan setiap kebijakan terkait investasi akan konsisten dan melibatkan dunia usaha, masyarakat sipil, dan Pemerintah Daerah secara setara, saling menghormati, dan dengan tujuan yang produktif bagi Indonesia;
- ▶ Meningkatkan investasi di Indonesia dengan merawat investor yang sudah ada serta merangkul investor baru, dimana insentif diberikan kepada keduanya secara adil dan transparan;
- ▶ Memastikan investasi efektif dan efisien dengan menurunkan *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) dari 7,3 (2021-2022) menjadi 5,0 (2025-2029);
- ▶ Meningkatkan efisiensi dan profesionalisme birokrasi melalui manajemen satu pintu dalam bidang investasi;
- ▶ Mendorong pemerintahan digital (*e-government*) untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memfasilitasi kemudahan dalam berusaha.

8. KELEMBAGAAN KEUANGAN NEGARA

- ▶ Membangun kelembagaan yang berintegritas dan akuntabel, melalui pembagian kewenangan yang harmonis antar instansi;
- ▶ Merealisasikan badan penerimaan negara di bawah langsung Presiden untuk

10. HILIRISASI DAN INDUSTRIALISASI

- ▶ Mendorong hilirisasi dan kebangkitan industri (reindustrialisasi) dengan target kontribusi industri manufaktur terhadap PDB dari 18,34% (2022) menuju 22,0%-23,0% (2029);
- ▶ Memberikan insentif bagi pengembangan industri manufaktur yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar;
- ▶ Mendorong investasi, baik oleh swasta dan BUMN, dalam sektor industri strategis berbasis teknologi tinggi, yang mencakup pertahanan, transportasi, biomedika, telekomunikasi, dan kelautan;
- ▶ Membangun kawasan industri khususnya di berbagai wilayah luar Jawa yang berbasis sumberdaya lokal dan terhubung dengan rantai pasok global;
- ▶ Meningkatkan kualitas dan kesiapan tenaga kerja melalui penguatan pendidikan vokasi bekerja sama dengan para pelaku industri.

11. INFRASTRUKTUR DAN JARINGAN LOGISTIK

- ▶ Mengembangkan infrastruktur nasional yang terintegrasi melalui perencanaan yang matang untuk mengoptimalkan efek ganda bagi ekonomi kawasan;
- ▶ Memperbaiki jaringan logistik guna meningkatkan daya saing ekonomi dengan target peningkatan indeks kinerja logistik (LPI) dari 3,0 (2023) menjadi 3,5 (2029) dan penurunan rasio biaya logistik terhadap PDB dari 23,8% (2020) menjadi 16,0%-18,0% (2029);
- ▶ Melanjutkan pembangunan infrastruktur khususnya di luar Jawa, dengan lebih memprioritaskan pengembangan jalan nasional dan daerah tak berbayar;
- ▶ Membangun sistem informasi logistik terintegrasi untuk memastikan tata kelola serta efisiensi proses perpindahan barang dan manusia lintas moda transportasi melalui pendekatan teknologi, kebijakan, dan kelembagaan;





- ▶ Menyediakan akses internet berkualitas dan terjangkau untuk mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan dan UMKM.

12. EKONOMI MARITIM DAN KELAUTAN

- ▶ Melaksanakan “Revolusi Agromaritim” dimana untuk produk laut tertentu nelayan tidak perlu memikirkan pasar dan harga jual, sehingga dapat fokus pada peningkatan produktivitas. Pasar dan harga jual akan difasilitasi oleh pemerintah melalui tata niaga hasil laut yang transparan dan akuntabel demi tercapainya kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan antara lain melalui:
 - › Penyediaan pendanaan murah dan mudah untuk membantu meningkatkan hasil produksi laut dan harkat kehidupan nelayan
 - › Meningkatkan kemudahan mengurus izin melaut bagi nelayan;
 - › Meninjau ulang perhitungan dan implementasi pungutan hasil tangkap yang adil bagi nelayan.
- ▶ Mewujudkan kepastian untuk mendapatkan subsidi BBM dan bantuan peralatan melaut termasuk alat penangkapan ikan bagi nelayan;
- ▶ Memanfaatkan posisi strategis Indonesia diantara dua samudra dan dua pusat ekonomi dunia, dengan mengembangkan pusat perdagangan di Selat Malaka dan industri pendukungnya, meliputi: simpul (*hub*) maritim, pelabuhan kontainer, industri dan jasa berbasis maritim, pasar komoditas, pusat perdagangan, manufaktur, dan properti;
- ▶ Mereformasi tata kelola wilayah laut secara terpadu untuk mewujudkan keunggulan “ekonomi biru” yang ditopang oleh keamanan dan keselamatan pelayaran di seluruh perairan Indonesia, termasuk penjagaan perairan dari penyusup asing;
- ▶ Mengembangkan sistem transportasi dan pelabuhan laut yang terkoneksi dengan hub maritim global dan sistem transportasi yang terintegrasi dengan infrastruktur darat untuk menumbuhkan industri di kawasan Tengah dan Timur Indonesia;
- ▶ Mendorong kerja sama riset dan inovasi global bidang maritim dan kelautan untuk memanfaatkan sumber daya kelautan Indonesia, meliputi: biologis, geofisis, geologis dan klimatologis; serta meningkatkan nilai tambah sektoral dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan kepulauan Indonesia;
- ▶ Meningkatkan kualitas dan nilai ekonomis aneka hasil laut baik diproduksi secara budidaya maupun tangkapan dengan pendekatan teknologi dan industri untuk konsumsi domestik maupun ekspor;
- ▶ Menghilangkan praktik penangkapan hasil laut *illegal, unregulated, and unreported* (IUU);
- ▶ Membantu para nelayan dan pembudidaya untuk mendapatkan fasilitas yang memadai dan terjangkau, termasuk perahu, alat tangkap ikan, depo bahan bakar, fasilitas pelabuhan ikan, teknologi budidaya, *cold storage*, pabrik es, fasilitas pengawetan, pembiayaan, permodalan, serta perlindungan keselamatan kerja nelayan dan Anak Buah Kapal (ABK);
- ▶ Membangun Pasar Ikan Rakyat (PIR) di wilayah-wilayah pemukiman nelayan;
- ▶ Memfasilitasi pembangunan rumah layak bagi keluarga nelayan serta pemberdayaan ekonomi istri dan keluarga nelayan.

13. SUMBER DAYA ALAM (SDA) BERKELANJUTAN

- ▶ Mewujudkan pengelolaan SDA yang berorientasi pada kepentingan nasional dan keadilan bagi daerah, termasuk dengan memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal secara berkelanjutan;
- ▶ Memperbaiki manajemen eksternalitas lingkungan untuk menjaga kualitas hidup masyarakat sekitar dan memastikan keberlanjutan alam bagi generasi mendatang;
- ▶ Meningkatkan praktik Environmental, Social, Governance (ESG) dalam pengelolaan SDA;
- ▶ Mendorong hilirisasi mineral dan batubara yang berkelanjutan dalam kerangka strategi industrialisasi guna menciptakan produk unggulan bernilai tinggi;
- ▶ Memprioritaskan penciptaan lapangan kerja terampil bagi masyarakat lokal di sektor SDA;
- ▶ Mengintensifkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kemitraan pengelolaan bidang SDA untuk peningkatan kualitas hidup dan penguatan ekonomi masyarakat lokal, termasuk melalui penyediaan sarana sekolah, rumah sakit, balai latihan kerja, dan UMKM bagi warga lokal;
- ▶ Membentuk Dana Abadi SDA (*Resource Endowment Fund*) untuk menggerakkan ekonomi baru bagi daerah dalam mengantisipasi menipis dan habisnya cadangan SDA.

- ▶ Mengoptimalkan kolaborasi antara budaya, turisme dan industri kreatif untuk menciptakan produk dan *brand* yang mendunia dan berciri Indonesia;
- ▶ Melakukan diversifikasi tujuan dan jenis wisata serta mengembangkan turisme berbasis pelaku usaha komunitas lokal;
- ▶ Menduniakan pariwisata Indonesia melalui promosi pariwisata terintegrasi dengan melibatkan pemerintah, BUMN, masyarakat sipil, dan swasta;
- ▶ Memperkuat kualitas manusia bidang pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pendidikan formal dan non-formal serta budaya magang;
- ▶ Menciptakan ekosistem industri kreatif berkeadilan dengan kebijakan afirmatif untuk pembelian/penggunaan *brand* buatan Indonesia dan merealisasikan kekayaan intelektual sebagai jaminan pembiayaan;
- ▶ Menciptakan simpul kreativitas (*creative hub*) di perkotaan yang menghubungkan pekerja, investor, dan inventor kreatif;
- ▶ Membangun pusat kebudayaan dan pusat sinema kelas dunia di berbagai kota di Indonesia;
- ▶ Membangkitkan budaya sinema dengan memajukan pendidikan formal perfilman serta mendorong tumbuhnya sinema menuju rasio satu layar untuk setiap 100.000 populasi;
- ▶ Menegakkan aturan royalti dan *performing right* yang ideal bagi penyanyi, komposer musik, kreator, dan produk ekonomi kreatif lainnya, termasuk menginisiasi perlindungan hak cipta bagi konten kreator di media sosial;
- ▶ Meningkatkan hambatan impor non-tariff dan pengawasan persaingan usaha dalam mencegah meningkatnya impor barang produk kreatif (termasuk fashion, hijab, dan batik) melalui *platform* digital dan praktik harga predator.

14. PARIWISATA BERKELANJUTAN DAN EKONOMI KREATIF

- ▶ Menjadikan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu motor ekonomi dan sumber penerimaan negara;
- ▶ Menjadikan turisme sebagai bagian integral dari strategi merawat budaya dan menjaga lingkungan hidup;

15. EKONOMI BERBASIS ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

- ▶ Menata ulang kelembagaan riset dan inovasi agar lebih produktif dan kompetitif;
- ▶ Membangun pusat desain industri (industrial design center) di bawah Kementerian Perindustrian yang langsung melayani kebutuhan riset, desain, dan rekayasa produk bagi industri manufaktur dengan prioritas produk-produk yang dibutuhkan masyarakat sekaligus menaikkan daya saing Indonesia di pasar global;
- ▶ Meningkatkan belanja R&D dari 0,24% (2021) menuju 0,4%-0,6% PDB (2029) dengan mendorong kontribusi swasta yang lebih besar;
- ▶ Memberi insentif seluruh pemangku kepentingan di bidang riset dan memfasilitasi proses komersialisasi hasil inovasi melalui penyederhanaan dan fasilitasi proses paten penguatan hak cipta;
- ▶ Menyediakan infrastruktur pendorong munculnya kewirausahaan berbasis teknologi di kampus-kampus meliputi aspek regulasi, kepakaran, jaringan teknologi informasi, pasar, dan pendanaan;



- ▶ Mengoptimalkan peran BUMN dalam mengimplementasikan hasil riset nasional;
- ▶ Mendorong pendirian laboratorium riset kelas dunia bekerja sama dengan perusahaan multinasional dan universitas terkemuka dalam mengembangkan ilmu dan inovasi yang kompetitif, khususnya dalam bidang biomedika, farmasi, kelautan, pertahanan, energi, dan pangan.

dapat memberikan penugasan kepada BUMN dengan dukungan kebijakan dan keuangan dari Pemerintah.

- ▶ Mereview seluruh utang dan kewajiban BUMN untuk mengukur risiko keuangan secara menyeluruh serta melanjutkan proses restrukturisasi utang BUMN dengan mengedepankan prinsip manfaat, transparansi, dan akuntabilitas;
- ▶ Mewajibkan BUMN menerapkan tata kelola yang berintegritas dan menyebarkan semangat anti-korupsi ke rantai pasoknya;
- ▶ Menjauhkan BUMN dari upaya politisasi oleh pihak manapun dan menghindarkan konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMN.

16. REPOSISSI PERAN BUMN

- ▶ Menjadikan kegiatan usaha BUMN sebagai motor pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia;
- ▶ Menyusun tata Kelola BUMN yang baik dengan mengedepankan prinsip transparansi, dan meritokrasi, khususnya termasuk dalam rekrutmen karyawan dan pimpinan;
- ▶ Mendorong kolaborasi BUMN dan swasta sebagai bagian dari ekosistem ekonomi yang saling bersaing sekaligus saling bekerja sama, dimana:
 - ▶ Proyek yang layak secara finansial: BUMN dan swasta bersaing secara adil sebagai entitas bisnis murni;
 - ▶ Proyek yang layak secara ekonomi tetapi tidak layak secara finansial: BUMN mendapatkan prioritas dengan dukungan kebijakan dan keuangan dari Pemerintah;
 - ▶ Proyek yang tidak layak secara ekonomi dan finansial, tetapi wajib ada: Pemerintah bertanggung jawab penuh yang dalam pelaksanaannya



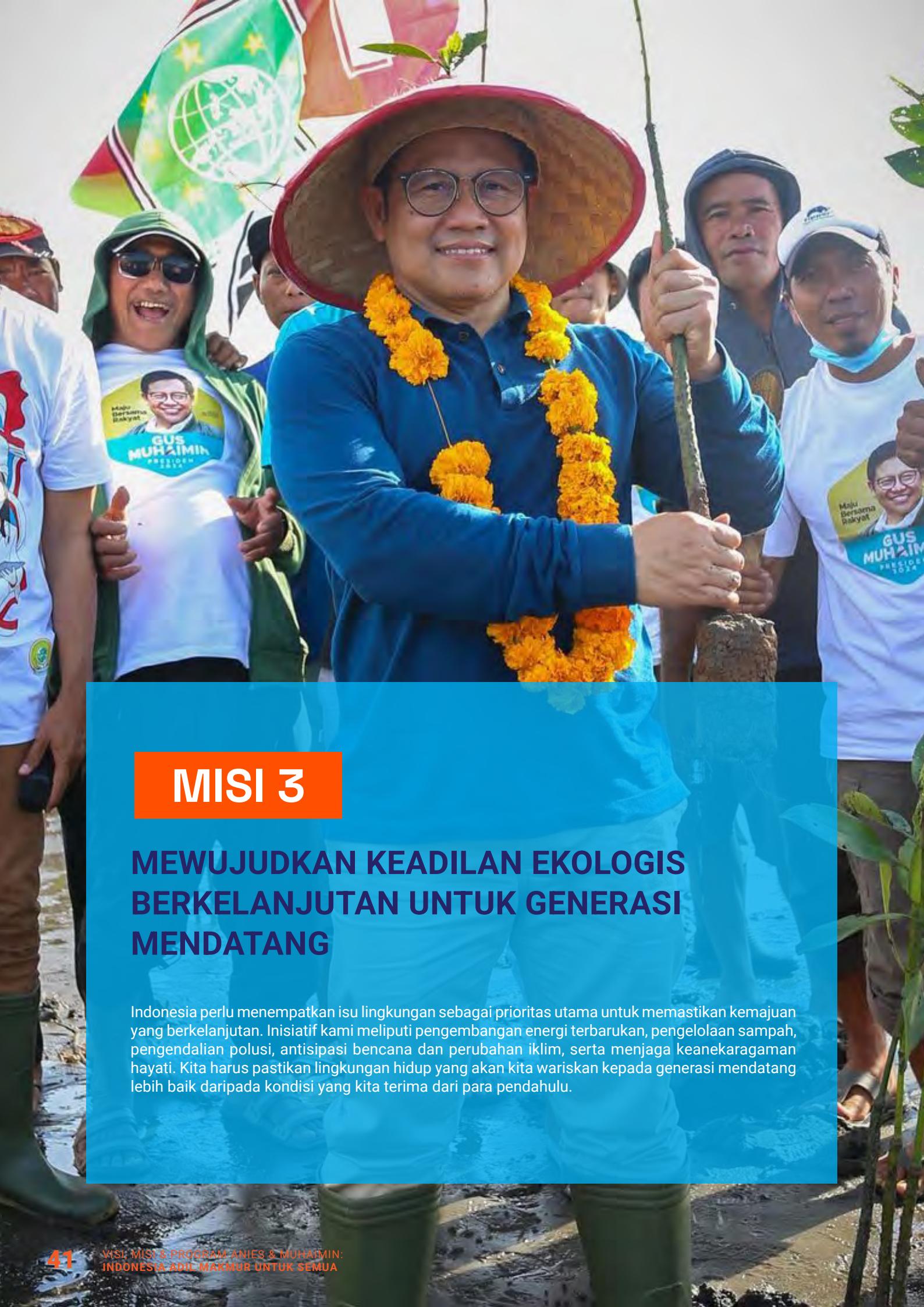
17. KOPERASI SERTA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

- ▶ Mewujudkan koperasi sebagai motor penggerak pertumbuhan dan pemerataan ekonomi;
- ▶ Mengoptimalkan peran koperasi melalui: (1) merevitalisasi BUMDes yang layak untuk dijadikan Koperasi, (2) merevitalisasi koperasi-koperasi pondok pesantren, dan (3) membentuk badan-badan usaha milik rakyat, termasuk BUM-Petani, dan BUM-Nelayan;
- ▶ Mempermudah pendirian dan administrasi koperasi dan UMKM, melalui penyederhanaan regulasi dan penerapan teknologi informasi;
- ▶ Memperluas akses pasar dengan menempatkan koperasi dan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok BUMN dan korporasi melalui berbagai program kemitraan;
- ▶ Meningkatkan relevansi koperasi dan UMKM dengan mendorong pemanfaatan e-commerce dan teknologi informasi;
- ▶ Memberikan dukungan peningkatan teknik produksi, manajemen, dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM;
- ▶ Memfasilitasi akses pendanaan yang mudah dan murah dengan memperluas dan memperbaiki program pembiayaan bagi koperasi dan UMKM, termasuk melalui KUR;
- ▶ Memperkuat kelembagaan, peraturan, dan pengawasan untuk menghindarkan koperasi dijadikan kendaraan bagi kejadian keuangan, termasuk investasi bodong dan pencucian uang;
- ▶ Meningkatkan pembelian produk UMKM dalam negeri melalui pengadaan belanja barang dan jasa pemerintah, BUMN, dan BUMD.

18. EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

- ▶ Memperkuat ekosistem ekonomi syariah dan mendorong terwujudnya rantai pasok ekonomi halal;
- ▶ Menerapkan ketentuan Jaminan Produk Halal (JPH) secara adil, transparan, dan efisien;
- ▶ Menjadikan Indonesia pusat industri halal dunia;
- ▶ Memastikan terwujudnya keadilan keuangan dalam pengembangan perbankan syariah dengan menaikkan alokasi pendanaan untuk menggerakkan UMKM;
- ▶ Memastikan regulasi ekonomi syariah secara mandiri tetapi bersinergi dengan regulasi ekonomi konvensional;
- ▶ Mendorong pengumpulan zakat melalui lembaga yang dikelola secara transparan dan profesional untuk mendukung berbagai program sosial;
- ▶ Menjadikan bank syariah sebagai *nazhir wakaf* uang untuk memperkuat peran perbankan syariah sebagai institusi yang dapat menyelesaikan berbagai masalah sosial ekonomi;
- ▶ Memperkokoh posisi perbankan syariah dalam memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat secara inklusif, dengan mendorong masuknya fungsi sosial sebagai salah satu indikator tingkat kesehatan bank.





MISI 3

MEWUJUDKAN KEADILAN EKOLOGIS BERKELANJUTAN UNTUK GENERASI MENDATANG

Indonesia perlu menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas utama untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan. Inisiatif kami meliputi pengembangan energi terbarukan, pengelolaan sampah, pengendalian polusi, antisipasi bencana dan perubahan iklim, serta menjaga keanekaragaman hayati. Kita harus pastikan lingkungan hidup yang akan kita wariskan kepada generasi mendatang lebih baik dari pada kondisi yang kita terima dari para pendahulu.

Agenda Misi 3

1. PENGUATAN TATA KELOLA LINGKUNGAN HIDUP

- ▶ Upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilandaskan pada prinsip keadilan sosial dan keadilan ekologis, termasuk keadilan antar generasi;
- ▶ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus melibatkan partisipasi rakyat termasuk masyarakat yang terkena dampak, masyarakat adat, perempuan, dan kelompok rentan lainnya;
- ▶ Perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup perlu didukung kelembagaan yang kuat serta dapat memenuhi hak akses atas informasi dan partisipasi masyarakat serta tata kelola kolaboratif;
- ▶ Memperkuat penegakkan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan mengedepankan aspek tanggung jawab pemulihan melalui peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan integritas aparat penegakan hukum.

2. PEMANFAATAN ENERGI BARU TERBARUKAN (EBT)

- ▶ Meningkatkan peran EBT dalam bauran energi nasional untuk menahan laju perubahan iklim dan polusi, menghemat devisa, dan melepaskan diri dari ketergantungan impor energi;
- ▶ Merancang skema insentif dan prioritisasi EBT bersumber dari panas bumi, tenaga

air, energi laut, surya, bayu, dan biomassa dalam rangka memenuhi komitmen *Net Zero Emission 2060*;

- ▶ Mendorong partisipasi masyarakat dalam investasi dan tindakan mandiri menyediakan listrik bersih baik secara *on grid* maupun *off grid* melalui skema insentif yang menarik;
- ▶ Memastikan nol emisi karbon pada sektor ketenagalistrikan secara bertahap disertai dengan terwujudnya elektrifikasi pada berbagai sektor, terutama industri dan transportasi;
- ▶ Membatasi pembangunan baru dan memensiundinikan pembangkit listrik bertenaga batu bara yang diprioritaskan dari Jawa dan Bali, diikuti wilayah-wilayah lainnya pada waktunya;
- ▶ Memberikan insentif bagi pengembangan EBT dan disinsentif untuk energi tidak terbarukan;
- ▶ Menuju kendaraan umum listrik diikuti dengan skema penukaran kendaraan konvensional, disinsentif penggunaan kendaraan tua dan tinggi emisi, serta penyediaan infrastruktur pengisian *battery*.

3. EKONOMI HIJAU

- ▶ Mencapai target emisi tahunan (2030) demi menukseskan target *Net Zero Emission (NZE)* tahun 2060 dan mendukung *champion projects* berkolaborasi dengan beberapa Pemda untuk mengupayakan NZE di tahun 2050;

- ▶ Menetapkan indeks ekonomi hijau sebagai indikator yang relevan untuk mengukur pembangunan berkelanjutan;
 - ▶ Mewujudkan keberpihakan pada ekonomi hijau dengan mendorong pengintegrasian indeks ekonomi hijau dalam persyaratan perizinan dan dijadikan basis evaluasi risiko di sektor keuangan;
 - ▶ Mendorong transisi berkeadilan yang memperhatikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, terutama kepastian lapangan kerja dan perlindungan sosial bagi masyarakat lokal, termasuk memperhatikan kepentingan masyarakat adat dan kelompok rentan terdampak;
 - ▶ Memberikan insentif pembiayaan dan kemudahan berusaha bagi sektor hijau untuk peningkatan penciptaan pekerjaan hijau/green jobs dengan kesempatan setara bagi tiap lapisan masyarakat;
 - ▶ Memberikan insentif kepada pelaku ekonomi untuk mendorong produksi dan pembelian barang dan jasa rendah emisi, serta untuk mendorong investasi hijau;
 - ▶ Mendukung implementasi ekonomi sirkular dengan menerapkan prinsip “9R” yaitu *Refuse, Rethink, Reduce* untuk tahap desain produk; *Reuse, Repair, Refurbish* untuk tahap distribusi dan konsumsi; serta *Remanufacture, Repurpose, Recycle* untuk tahap produksi;
 - ▶ Mengimplementasikan nilai ekonomi karbon melalui penerapan pajak karbon, penerapan sistem perdagangan karbon yang inklusif dengan standar dan kriteria yang jelas, serta instrumen lainnya memastikan penurunan bersih emisi gas rumah kaca.
- ▶ Menekan laju kerusakan hutan, konservasi *intake forest*, dan reforestasi/rehabilitasi untuk memaksimalkan peran hutan sebagai *carbon sink*;
 - ▶ Mengoptimalkan restorasi lahan gambut untuk mencegah kebakaran, memperlambat perubahan iklim dan mendatangkan manfaat ekonomi bagi rakyat;
 - ▶ Meningkatkan upaya untuk menjaga ekosistem laut dan pesisir, termasuk hutan *mangrove* dan terumbu karang untuk memaksimalkan potensi *blue carbon* dan meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat pesisir;
 - ▶ Menetapkan batas atas emisi gas rumah kaca dari tiap sektor dan tujuan, kemudian mengintegrasikan target-target penurunannya ke dalam perencanaan dan program setiap kementerian dan lembaga pemerintah terkait, serta aktor non-pemerintah;
 - ▶ Membangun kapasitas masyarakat rentan dalam upaya adaptasi dampak perubahan iklim, seperti petani dan masyarakat pesisir.

5. POLUSI UDARA, AIR DAN SAMPAH

- ▶ Mendorong solusi holistik terhadap pengurangan polusi udara melalui percepatan transisi EBT, penerapan teknologi pengendalian emisi yang lebih baik di PLTU, penyediaan transportasi publik, dan hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik;
- ▶ Membangun lebih banyak Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan meningkatkan pengawasan, serta penegakan hukum untuk mengurangi pencemaran air dari domestik, fasilitas kesehatan, industri, tambang, dan sumber lainnya;
- ▶ Memperketat dan menerapkan baku mutu pencemaran air dan udara berdasarkan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat serta teknologi pengendalian beban pencemar terbaik;

4. ADAPTASI DAN MITIGASI DAMPAK KRISIS IKLIM

- ▶ Memprioritaskan kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan komitmen Indonesia dalam ikut mengerem laju pemanasan global;



- ▶ Menjadikan Indonesia sebagai salah satu contoh sukses ekonomi yang mengoptimalkan daur ulang di dunia;
- ▶ Memastikan tersedianya infrastruktur persampahan yang memenuhi standar dari hulu hingga hilir, serta memperbanyak infrastruktur yang mendukung ekonomi sirkular;
- ▶ Menyiapkan regulasi untuk produk rendah karbon dan menjadikan pemerintah sebagai konsumen utama produk rendah karbon dalam kegiatan pembangunan;
- ▶ Menjadikan Indonesia sebagai zona larangan impor sampah B3 dan mendorong Indonesia menjadi wilayah bebas kantong plastik.

6. HUTAN DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

- ▶ Menguatkan perbaikan tata kelola kehutanan dengan mempercepat pengelolaan hutan oleh masyarakat untuk pemulihian ekosistem dan kesejahteraan;
- ▶ Merestorasi alam Indonesia untuk memulihkan ekosistem yang terdegradasi, khususnya ekosistem yang paling berpotensi menangkap dan menyimpan karbon serta mencegah dan mengurangi dampak bencana alam;
- ▶ Membangun jaringan kawasan konservasi yang lebih luas di Indonesia, baik di darat maupun di laut, dengan mempertimbangkan secara sungguh-sungguh kepentingan masyarakat lokal;
- ▶ Melindungi, merestorasi, mereboisasi, mengelola, dan mempromosikan ekosistem melalui peningkatan pendanaan dan komitmen terhadap hutan lindung, cagar alam, suaka margasatwa, dan zona proteksi flora dan fauna lainnya;
- ▶ Meningkatkan perlindungan terhadap satwa langka dan terancam punah melalui penguatan regulasi perlindungan satwa

- langka dari eksplorasi dan perburuan liar;
- ▶ Mendorong pemanfaatan lahan berbasis lingkungan melalui perbaikan regulasi lahan agar mengakomodasi unsur-unsur keberlanjutan dan keseimbangan;
- ▶ Mengarusutamakan pertanian berkelanjutan yang berorientasi pada diversifikasi pangan dan diversifikasi pola tanam;
- ▶ Menanamkan kesadaran atas pentingnya keanekaragaman hayati melalui edukasi lintas generasi dan lintas sektor dengan berorientasi keberlanjutan;
- ▶ Melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat serta mendorong pemenuhan hak dan kewajiban komunitas lokal dalam manajemen perhutanan, selaras dengan prinsip *social forestry* dan untuk mencapai *Forestry and Other Land Use (FOLU) net zero 2030*;
- ▶ Mendorong ketertelusuran rantai pasok (*supply chain traceability*) untuk produk pangan, pertanian dan juga produk lainnya, termasuk untuk mendapatkan sertifikasi *fair trade*.



7. KETAHANAN TERHADAP BENCANA ALAM

- ▶ Meningkatkan kapasitas Lembaga ketahanan bencana di pusat dan daerah melalui mekanisme koordinasi tanggap darurat, distribusi informasi, dan komunikasi risiko bencana;
- ▶ Membangun sistem peringatan dini yang akurat dan andal di daerah-daerah yang rawan bencana, khususnya terhadap risiko tsunami, gunung berapi, banjir, dan gempa bumi;
- ▶ Melakukan penguatan ketahanan sosial masyarakat dan kesadaran bencana di daerah rawan bencana melalui edukasi di sekolah-sekolah dan organisasi sosial, disesuaikan dengan konteks lokal;
- ▶ Memastikan ketersediaan rumah tahan bencana dan penanganan bencana yang terintegrasi dengan kapasitas tanggap darurat serta terencana di daerah;
- ▶ Melakukan digitalisasi dan modernisasi mitigasi bencana dengan mendorong interkoneksi dan integrasi informasi kebencanaan yang dapat diakses secara mudah dan cepat.

8. KOLABORASI PEMANGKU KEPENTINGAN LINGKUNGAN

- ▶ Melakukan pengukuran dan *stocktaking* terjadwal untuk melengkapi data keanekaragaman hayati di Indonesia;
- ▶ Menghadirkan keadilan iklim di Indonesia dengan memastikan harmonisasi nilai ekonomi dan ekologi di setiap sektor sekaligus memberikan perhatian terhadap masyarakat rentan;

- ▶ Meningkatkan pelibatan aktor-aktor non-pemerintah dalam berpartisipasi menjaga lingkungan;
- ▶ Menjaga kepastian hukum dan keberpihakan pemerintah dalam kaitannya dengan lingkungan, serta melibatkan generasi muda dalam menanamkan visi lingkungan lintas generasi;
- ▶ Mengembangkan instrumen ekonomi karbon berstandar internasional dan praktik terbaik dalam mendorong inovasi kegiatan berbasis lingkungan dan mengembangkan potensi nilai ekonomi karbon pada tingkat internasional;
- ▶ Mengambil peran sentral dalam diplomasi iklim dengan menerapkan nilai keadilan iklim, serta memaksimalkan pembiayaan internasional untuk pembiayaan krisis iklim.





MISI 4

MISI 4: MEMBANGUN KOTA DAN DESA BERBASIS KAWASAN YANG MANUSIAWI, BERKEADILAN DAN SALING MEMAJUKAN

Kota dan desa adalah bagian dari identitas masyarakat yang saling terkait dan tergantung. Namun, kondisi layak, nyaman, dan aman belum dirasakan di banyak tempat. Air masih susah dicari, hunian tidak layak, sanitasi tidak memadai, pilihan mobilitas amat terbatas, listrik tidak selalu menyala, wilayah tidak tertata, dan ekonomi tidak merata. Pembangunan kota dan desa masih timpang dan eksploratif. Negara harus hadir untuk menyelesaikan rangkaian permasalahan ini secara adil. Kota, desa, dan pengembangan kawasan, termasuk pesisir, kepulauan, dan pedalaman harus menjadi dasar bagi masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera.

Agenda Misi 4

1. KOTA YANG MAJU DAN BERDAYA SAING

- ▶ Menyediakan hunian layak, dekat pusat kota, dan dengan harga terjangkau bagi semua kalangan, termasuk generasi z, milenial, dan pekerja informal, melalui skema pembelian yang mudah dan murah;
- ▶ Mewujudkan pemerataan pembangunan perkotaan yang manusiawi, kompak, berorientasi transit dan berketahtaan, serta terintegrasi dengan pembangunan wilayah sekitar melalui kepastian penyelenggaraan tata ruang yang berkeadilan, dan pembentukan institusi pendukung di tingkat pusat;
- ▶ Mewujudkan kota layak huni dengan pemenuhan infrastruktur dasar, sosial, dan ekologis, di antaranya: jaringan transportasi, fasilitas kesehatan dan pendidikan, air bersih, sanitasi, energi, telekomunikasi, pengelolaan sampah, dan ruang terbuka hijau;
- ▶ Mengakselerasi pengembangan sistem transportasi umum massal di kota-kota strategis yang terdiri dari angkutan umum berbasis rel dan jalan sebagai moda utama yang terintegrasi dengan sistem mobilitas aktif serta kendaraan bebas emisi, sehingga mampu menjangkau seluruh kawasan kota secara efisien dan berkelanjutan;
- ▶ Meningkatkan kesejahteraan dan menjaga nilai sosial budaya masyarakat kampung kota melalui penataan kampung, serta

menghadirkan hunian layak berbasis komunitas;

- ▶ Menjadikan kota sebagai inkubator kreativitas, ruang ekspresi, dan produsen karya seni/budaya dan olahraga, dengan mendorong tumbuh kembang industri kreatif, pusat-pusat kebudayaan dan seni, mengembangkan fasilitas olahraga, dan menghadirkan kegiatan yang mendorong kohesivitas warga;
- ▶ Mengembangkan lingkungan hidup perkotaan yang sehat dan lestari dengan mengurangi emisi karbon dan sampah, serta meningkatkan kualitas lingkungan melalui peningkatan ruang hijau, keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan EBT;
- ▶ Merealisasikan potensi wisata perkotaan melalui pengembangan fasilitas, layanan, kegiatan, branding dan aspek lainnya yang menjadi daya tarik bagi wistawan domestik dan global;
- ▶ Memperkuat kinerja birokrasi melalui meritokrasi dan digitalisasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik.

2. DESA YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA

- ▶ Meningkatkan dukungan pemerintah pusat dan daerah bagi pengembangan desa, termasuk melalui peningkatan secara signifikan alokasi Dana Desa yang



pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan desa, dikelola oleh desa, untuk meningkatkan kemajuan ekonomi desa, kesejahteraan masyarakat desa, dan kemandirian pangan nasional;

- ▶ Meningkatkan kualitas aparatur desa dalam mengelola Dana Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat;
- ▶ Meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa melalui pemberian akses terhadap pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, termasuk beasiswa pendidikan lanjut;
- ▶ Mengoptimalkan BAHU DESA untuk: (1) pendampingan hukum kepada Kepala Desa dan perangkat Desa, dan (2) pendampingan usaha BUMDes;
- ▶ Menjamin peran aktif masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan lewat penguatan kelembagaan dan libatkan komunitas desa;
- ▶ Mengarusutamakan pembangunan desa berkelanjutan dan menyediakan infrastruktur desa yang memadai, mencakup air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, jaringan

irigasi, jaringan listrik, telekomunikasi, jaringan internet dan transportasi;

- ▶ Membangun desa-desa wisata didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai, termasuk mempermudah akses dari dan menuju tujuan wisata;
- ▶ Mengembangkan ekonomi desa dengan mendorong sektor berbasis potensi lokal yang mampu meningkatkan nilai tambah bagi desa, seperti desa pertanian terpadu, desa peternakan terpadu, desa industri, dan desa wisata, serta membuka peluang usaha baru melalui penguatan Koperasi Unit Desa (KUD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan lembaga perekonomian desa lain;
- ▶ Merevitalisasi BUMDes menjadi: (1) unit ekonomi yang aktif dan menyejahterakan masyarakat desa melalui pendampingan usaha, (2) sebagai sentra produksi pupuk organik, (3) lembaga keuangan mikro, dan (4) pengelola program "Satu Desa Satu Produk Unggulan" melalui program BAHU DESA;
- ▶ Memperkuat akses warga desa terhadap sumber daya alam serta mendorong pemanfaatannya yang bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui pemberian kepastian hak atas tanah serta skema kemitraan yang berkeadilan;

- ▶ Memperkuat peran tenaga pendamping desa yang profesional dan memahami kebutuhan desa, di seluruh tingkatan;
- ▶ Mendorong munculnya desa-desa industri, dengan antara lain menggalakkan hilirisasi industri, membangun industri berorientasi ekspor dan melakukan digitalisasi desa;
- ▶ Meningkatkan peran putra-putri daerah sebagai aktor pembangunan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, pelatihan kerja untuk memajukan kualitas manusia desa, serta akses kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
- ▶ Mendorong pelestarian adat, seni, dan budaya masyarakat desa melalui peningkatan peran lembaga adat, penyediaan wadah ekspresi yang inklusif, serta pemberdayaan komunitas.

3. REFORMA AGRARIA

- ▶ Mengakselerasi program redistribusi tanah yang adil dan partisipatif, khususnya untuk petani tak bertanah, petani gurem dalam skema rumah tangga petani dan koperasi produksi pertanian; serta dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat penerima tanah;
- ▶ Mempercepat penyelesaian konflik-konflik agraria serta tumpang tindih penguasaan lahan secara menyeluruh melalui pendekatan lintas sektor yang partisipatif dan berkeadilan;
- ▶ Mempercepat pemberian kepastian hak atas tanah bagi masyarakat melalui upaya proaktif dari pemerintah dan memperkuat pengakuan hak ulayat masyarakat adat atas wilayah dan hutan adat serta seluruh sumber daya alam di dalamnya melalui penyederhanaan proses administrasi dan peningkatan fasilitasi pendampingan;
- ▶ Melakukan penataan kelembagaan dalam rangka pelaksanaan reforma agraria yang lebih cepat dan terpadu;







- ▶ Mengharmonisasi kebijakan dan regulasi sektor agraria, tata ruang, dan sumber daya alam dalam rangka penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, perairan, dan pesisir, serta pengakuan, perlindungan, dan pengaturan seluruh tanah negara dan tanah masyarakat (termasuk masyarakat adat) secara berkeadilan;
- ▶ Menuntaskan program “Kebijakan Satu Peta” dan “Kebijakan Satu Data” serta membangun sistem informasi geospasial berbasis bidang tanah yang dapat diakses oleh semua warga negara dan pemerintah untuk memastikan pemanfaatan tanah dan sumber daya agraria yang berkeadilan, bertumbuh, dan lestari;
- ▶ Memberikan akses masyarakat untuk memanfaatkan tanah, termasuk tanah milik instansi pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD, untuk mendongkrak ekonomi rakyat melalui skema yang akuntabel dan partisipatif;
- ▶ Mengembangkan rencana tata ruang yang berbasis bidang tanah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan pendekatan partisipatif dan Hak Asasi Manusia;
- ▶ Menyusun kebijakan dan regulasi perpajakan di sektor agraria yang berkeadilan dan tidak membebani masyarakat dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan tanah.

4. PEMBANGUNAN REGIONAL DAN METROPOLITAN

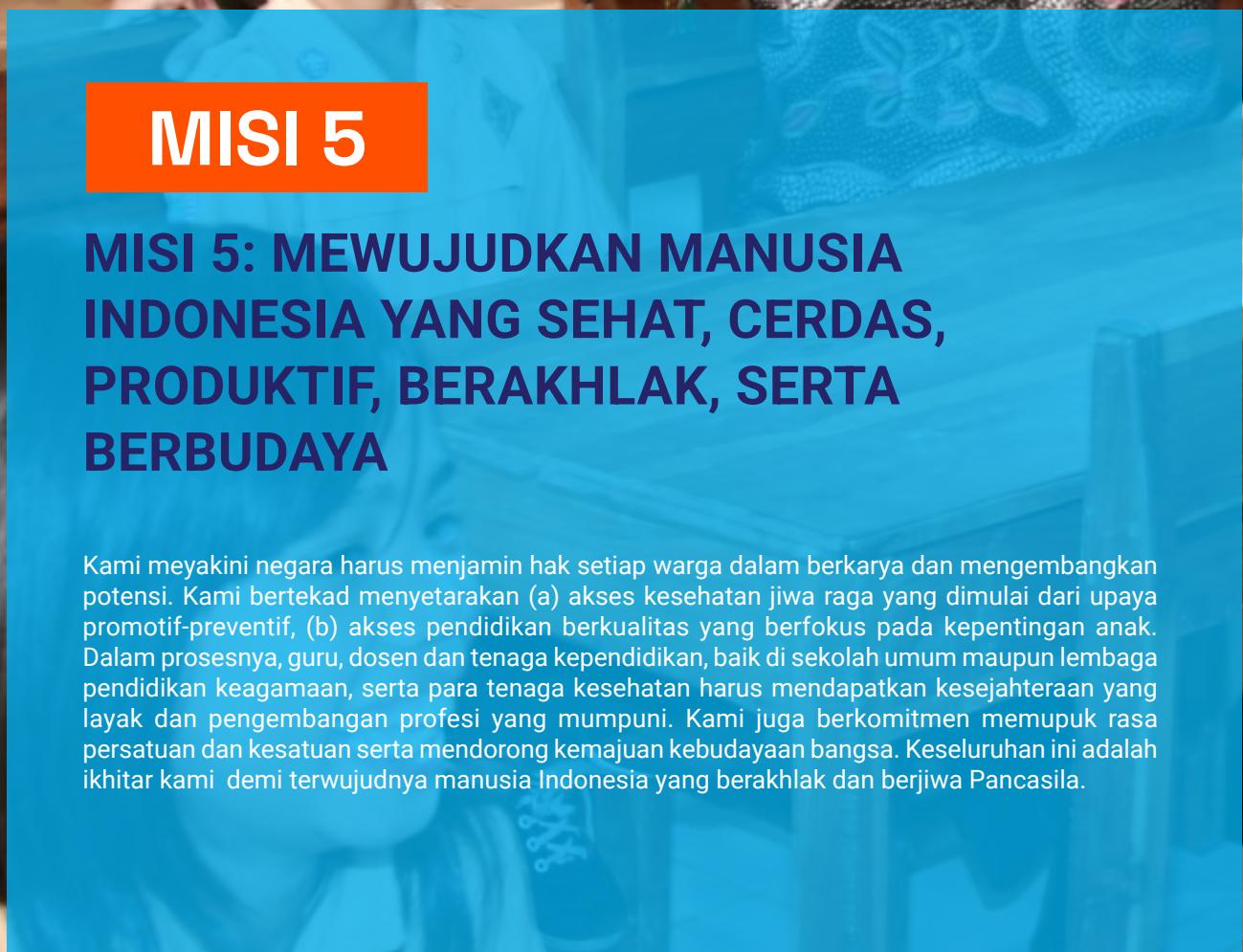
- ▶ Mempercepat pertumbuhan kawasan metropolitan dan regional melalui tata ruang yang terintegrasi dan kelembagaan antar daerah yang berkeadilan dan saling memajukan, serta dukungan fiskal dan non-fiskal dari Pemerintah Pusat;
- ▶ Mengintegrasikan dan meningkatkan ekonomi regional dengan mewujudkan integrasi sistem angkutan umum dan logistik yang memperlancar pertukaran barang dan jasa antar kawasan;



5. PEMBANGUNAN KAWASAN PESISIR, KEPULAUAN, DAN PEDALAMAN

- ▶ Membangun kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman dengan memenuhi kebutuhan dasar warga melalui penyediaan akses air bersih dan sanitasi layak sebagai upaya peningkatan kualitas hidup manusia;
- ▶ Meningkatkan rasio elektrifikasi dan menjamin penyediaan listrik secara terus-menerus dengan mengutamakan sumber EBT dan berbasis potensi lokal;
- ▶ Membangun sistem transportasi dan logistik yang memadai untuk meningkatkan koneksi kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman dengan pusat-pusat ekonomi;
- ▶ Memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga murah dan stabil melalui pembangunan sentra distribusi bahan pokok yang mudah dijangkau;
- ▶ Memastikan tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau;
- ▶ Menyediakan jaringan telekomunikasi yang andal, yang memungkinkan masyarakat kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman terhubung secara mudah dengan masyarakat umum lainnya;
- ▶ Memperkuat kapasitas masyarakat pesisir terhadap adaptasi dampak perubahan iklim dan bencana ekologis lainnya.





MISI 5

MISI 5: MEWUJUDKAN MANUSIA INDONESIA YANG SEHAT, CERDAS, PRODUKTIF, BERAKHLAK, SERTA BERBUDAYA

Kami meyakini negara harus menjamin hak setiap warga dalam berkarya dan mengembangkan potensi. Kami bertekad menyetarakan (a) akses kesehatan jiwa raga yang dimulai dari upaya promotif-preventif, (b) akses pendidikan berkualitas yang berfokus pada kepentingan anak. Dalam prosesnya, guru, dosen dan tenaga kependidikan, baik di sekolah umum maupun lembaga pendidikan keagamaan, serta para tenaga kesehatan harus mendapatkan kesejahteraan yang layak dan pengembangan profesi yang mumpuni. Kami juga berkomitmen memupuk rasa persatuan dan kesatuan serta mendorong kemajuan kebudayaan bangsa. Keseluruhan ini adalah ikhtiar kami demi terwujudnya manusia Indonesia yang berakhlak dan berjiwa Pancasila.

Agenda Misi 5

1. LAYANAN KESEHATAN TANPA DISKRIMINASI YANG ANDAL DAN EFISIEN

- ▶ Mengedepankan upaya promotif dan preventif melalui penguatan fungsi Puskesmas didukung penguatan peran Pemerintah Desa, masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kesehatan primer;
- ▶ Menambah Puskesmas baru dengan jumlah yang optimal serta layanan kesehatan primer dengan kualitas dan fasilitas yang layak di pedesaan;
- ▶ Merevitalisasi dan memperbaiki fasilitas Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Posyandu di seluruh Indonesia;
- ▶ Mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat termasuk ketersediaan tenaga kesehatan dan alat kesehatan berkualitas;
- ▶ Meningkatkan peran Posyandu dan kader kesehatan untuk kesehatan promotif dan preventif dengan dukungan digitalisasi serta pemberian insentif bagi kader;
- ▶ Membangun satu Rumah Sakit kelas A di tiap provinsi dengan keterpaduan layanan rujukan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dan penyakit yang berkembang.

2. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL YANG ANDAL

- ▶ Memastikan seluruh rakyat Indonesia terlindungi oleh program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
- ▶ Mewujudkan sistem rujukan pelayanan bagi peserta JKN yang lebih mudah dan berorientasi keselamatan pasien;
- ▶ Memperkuat pelayanan jaminan kesehatan nasional dengan evaluasi besar pembayaran fasilitas kesehatan tingkat lanjut (INA CBGs) sesuai ketentuan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- ▶ Mengefisienkan rujukan dengan dukungan teknologi informasi untuk mempersingkat alur rujukan dan mempermudah pengambilan obat.

3. AKSES PENDIDIKAN BERKEADILAN

- ▶ Memastikan siswa lulusan Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat dapat melanjutkan pendidikan hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat, dengan meningkatkan daya tampung di sekolah negeri maupun melibatkan sekolah swasta;
- ▶ Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 1+12 tahun dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) atau yang sederajat;

- ▶ Memfasilitasi program Kejar Paket A, Kejar Paket B, Kejar Paket C, dan *homeschooling* untuk memperluas akses pendidikan bagi semua;
- ▶ Memperluas akses sekolah untuk anak berkebutuhan khusus;
- ▶ Menekan angka anak putus sekolah dengan menyediakan bantuan pendidikan bagi yang membutuhkan dan menangani faktor-faktor lain yang berkontribusi pada terjadinya putus sekolah;
- ▶ Melanjutkan pemberian bantuan operasional sekolah berbasis kebutuhan di antaranya untuk memastikan kelayakan sarana prasarana lingkungan belajar termasuk WC, air bersih, sanitasi dan higiene (WASH).

4. KUALITAS DAN KESEJAHTERAAN GURU BESERTA TENAGA KEPENDIDIKAN

- ▶ Meningkatkan secara signifikan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan dikaitkan dengan kinerja;
- ▶ Meningkatkan kualitas guru dan tenaga kependidikan sekolah melalui berbagai pelatihan dan beasiswa pendidikan lanjutan, baik di dalam maupun di luar negeri;
- ▶ Mengangkat tenaga kependidikan honorer secara meritokratis dengan mempertimbangkan kebutuhan;
- ▶ Mengurangi beban administrasi guru melalui pemanfaatan teknologi dan pembentukan satu data dan sistem terintegrasi;
- ▶ Memberikan kepastian jenjang dan jalur karier bagi profesi guru yang transparan, berbasis meritokrasi, dan sesuai minat;
- ▶ Memastikan ketersediaan guru di kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman dengan pemberian tunjangan khusus.

5. INSTITUSI PENDIDIKAN BERBASIS AGAMA

- ▶ Mendorong revitalisasi fasilitas fisik sekolah madrasah dan sekolah berbasis agama lainnya, baik yang dikelola oleh Kementerian Agama maupun swasta;
- ▶ Meningkatkan kapasitas, kompetensi dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan di Madrasah, Pondok Pesantren, dan lembaga pendidikan berbasis agama, sehingga memenuhi standar kompetensi nasional;
- ▶ Memberikan kepastian bagi lulusan agar diakui di antaranya untuk melanjutkan pendidikan, bekerja, dan menggali potensinya;
- ▶ Membina santri dan lulusan lembaga pendidikan keagamaan khusus seperti Ma'had Ali yang menghasilkan ahli ilmu agama Islam dan juga lembaga sejenis di agama lain untuk meningkatkan pemahaman ilmu agama di masyarakat sekaligus memperkuat kesalehan sosial dan pemahaman agama yang moderat.

6. KETERJANGKAUAN BIAYA PENDIDIKAN TINGGI

- ▶ Memastikan setiap Perguruan Tinggi Negeri menerapkan biaya operasional yang transparan dan berkeadilan sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses pendidikan tinggi;
- ▶ Menghadirkan kesempatan beasiswa yang setara bagi anak yang memiliki potensi, termasuk yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin;
- ▶ Memberikan kemudahan akses untuk persiapan proses penerimaan calon mahasiswa ke perguruan tinggi, termasuk yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin;
- ▶ Memeratakan layanan pendidikan tinggi berkualitas melalui pengayaan program studi yang sudah ada atau pembukaan program studi baru sesuai dengan kebutuhan dan keunggulan wilayah.



7. KESEHATAN IBU, BAYI DAN TUMBUH KEMBANG ANAK

- ▶ Menekan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), melalui penguatan peran Posyandu dan Puskesmas termasuk aktivasi bidan dan kader kesehatan;
- ▶ Menurunkan prevalensi stunting dari 21.6% (2022) menuju 11,0%-12,5% (2029) melalui pendampingan ibu hamil hingga 1.000 hari pertama kehidupan anak, kolaborasi lintas sektor serta penguatan dukungan bagi kader desa/kelurahan untuk menjamin ketersediaan pangan seimbang, pencegahan infeksi dan perbaikan lingkungan;
- ▶ Memenuhi gizi seimbang dan terjangkau, terutama bagi ibu hamil dan anak usia 0-8 tahun, serta bantuan untuk kelompok rentan;
- ▶ Menghadirkan tempat penitipan anak berbasis komunitas;
- ▶ Mentransformasi kelembagaan urusan keluarga, perempuan dan anak, untuk menjawab kebutuhan prioritas kesehatan ibu dan anak.

8. KESEHATAN MENTAL RAKYAT

- ▶ Mendorong edukasi tentang pentingnya kesehatan mental untuk menghapus stigma negatif, dimulai dari keluarga dan sekolah melalui aktivasi kelompok dukungan sebaya (*peer support group*) dan penguatan peran konselor di sekolah dan perguruan tinggi;
- ▶ Menjaga kesehatan mental masyarakat di antaranya melalui penambahan ruang publik dan fasilitasi berbagai kegiatan masyarakat sebagai tempat mengekspresikan diri dan potensinya;
- ▶ Mendorong hadirnya konselor kesehatan mental (psikolog) di Puskesmas dan menyediakan layanan konseling daring gratis berkolaborasi dengan lembaga dan komunitas yang ada;
- ▶ Menyediakan layanan pusat krisis *hotline 24*

jam di tiap kabupaten/kota yang terintegrasi dengan layanan rumah sakit dan rumah aman, berkolaborasi dengan berbagai lembaga dan komunitas yang ada;

- ▶ Memperkuat sistem rujukan pelayanan kesehatan jiwa di setiap provinsi melalui peningkatan layanan kesehatan jiwa di rumah sakit.

9. TATA KELOLA TENAGA KESEHATAN

- ▶ Memastikan ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan di setiap fasilitas layanan kesehatan, terutama Puskesmas, termasuk di kawasan pesisir, kepulauan, dan pedalaman dengan pemberian tunjangan khusus;
- ▶ Memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- ▶ Memperbanyak beasiswa afirmasi untuk calon tenaga medis dan tenaga kesehatan, terutama calon dokter umum/gigi dan calon dokter spesialis dari keluarga prasejahtera dan/atau di daerah yang kekurangan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- ▶ Mendorong penataan tenaga kesehatan, termasuk mengubah status Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dari mahasiswa menjadi tenaga kesehatan dalam pelatihan sehingga mendapatkan haknya sebagai tenaga profesional;
- ▶ Memperluas akses bagi tenaga kesehatan untuk meningkatkan kompetensinya dengan memperbanyak pelatihan dan beasiswa pendidikan lanjutan (S2/S3) baik di dalam dan luar negeri;
- ▶ Meringankan beban administratif tenaga kesehatan melalui pemanfaatan teknologi dan sistem terintegrasi.

10. PENDIDIKAN VOKASI DAN LULUSAN BERDAYA SAING



- ▶ Mendirikan institusi yang bertanggung jawab dalam pengembangan vokasi untuk memastikan partisipasi dunia industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang adaptif dengan kebutuhan dan relevan dengan potensi wilayah;
- ▶ Memfasilitasi kemitraan antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Perguruan Tinggi Vokasi (PTV) dengan dunia industri dan dunia kerja serta merevitalisasi peran Balai Besar Vokasi sebagai sistem pendukung;
- ▶ Mendorong dunia industri dan dunia kerja untuk hadir mengajar di SMK/PTV dan memastikan para guru/dosen memperoleh pengakuan dengan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau;
- ▶ Mendorong serapan lulusan SMK/PTV oleh dunia industri dan dunia kerja berbasis insentif;
- ▶ Memberikan insentif bagi setiap dunia industri dan dunia kerja yang berinvestasi pada SMK/PTV, serta untuk memfasilitasi guru/dosen memperoleh pengalaman industri.

11. PENDIDIKAN TINGGI YANG BERMUTU DAN RELEVAN

- ▶ Memprioritaskan alokasi dana riset pada perguruan tinggi agar efektif dan berdayaguna;
- ▶ Mengembangkan skema dana riset kompetitif bagi para dosen di perguruan tinggi;
- ▶ Mentransformasi tata kelola perguruan tinggi agar berdaya saing dan berdampak bagi dunia akademis, riset dan masyarakat;
- ▶ Memfasilitasi kegiatan dan kerja sama akademik di kancah internasional untuk meningkatkan kolaborasi dan persepsi dunia terhadap Perguruan Tinggi Nasional;
- ▶ Memperkuat kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan swasta dalam mengembangkan riset dan inovasi yang berkualitas dan implementatif.

12. EKOSISTEM PENDIDIKAN YANG BERPUSAT KEPADA ANAK

- ▶ Memperkuat pembelajaran yang fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman tanpa mengubah kurikulum;
- ▶ Mendukung komunitas dan organisasi pegiat pendidikan yang berkontribusi dalam menghadirkan pendidikan berkualitas, terutama untuk masyarakat yang membutuhkan;
- ▶ Mendorong anak mencintai ilmu dan sains melalui metode pembelajaran yang partisipatif dan menarik;
- ▶ Memfasilitasi perbaikan kualitas sekolah/ Perguruan Tinggi swasta sebagai bagian dari ekosistem pendidikan;
- ▶ Menghadirkan ruang literasi berkualitas melalui revitalisasi perpustakaan daerah dan memastikan sekolah memiliki perpustakaan dan bahan bacaan berkualitas;
- ▶ Menanamkan sikap anti narkoba melalui cara-cara yang inovatif dan kreatif.

13. POLA HIDUP DAN LINGKUNGAN SEHAT

- ▶ Mengaktifkan gerakan masyarakat hidup sehat;
- ▶ Menyediakan fasilitas dan sarana-prasarana publik yang mendukung aktivitas fisik masyarakat, termasuk taman, trotoar, jalur sepeda, dan sarana prasarana olahraga;
- ▶ Memfasilitasi pembangunan satu wahana/lapangan olahraga di setiap desa dan satu kawasan pengembangan olahraga di setiap kabupaten/kota;
- ▶ Melaksanakan festival olahraga sepanjang tahun dan kompetisi berjenjang dari tingkat daerah hingga nasional, baik pemula maupun profesional;

- ▶ Menata produk dengan kadar gula, garam dan lemak berlebih untuk menekan angka obesitas dan penyakit degeneratif, di antaranya melalui kewajiban pelabelan yang jelas terkait kandungan gula, garam dan lemak, serta risikonya;
- ▶ Program KPR bersubsidi khusus bagi anak muda dan pekerja informal yang belum memiliki hunian layak, dengan lingkungan hidup yang sehat dan lestari dengan mengurangi sampah, emisi, dan polutan, serta memaksimalkan daya dukung lingkungan.

14. KESIAPAN DAN DAYA TAHAN TERHADAP PANDEMI

- ▶ Mempercepat penghapusan penyakit menular terutama tuberkulosis dan malaria;
- ▶ Meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi ancaman pandemi berikutnya;
- ▶ Meningkatkan sistem pengawasan nasional dengan integrasi data dan sistem informasi fasilitas kesehatan dan penguatan pengawasan berbasis masyarakat;
- ▶ Meningkatkan kapasitas dan kualitas laboratorium untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan bagi masyarakat;
- ▶ Memperkuat RS tingkat provinsi dalam menangani penyakit menular/infeksi dan kesiapan nasional akan potensi ancaman pandemi berikutnya.

15. RAKYAT YANG MENGHARGAI PERBEDAAN DAN AKTIF MERAWAT PERSATUAN

- ▶ Menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada anak-anak dan generasi muda melalui cara-cara yang tepat dan menyenangkan;
- ▶ Menjadikan sekolah, desa dan kota sebagai ruang tumbuh kembang persenyawaan atas keberagaman;
- ▶ Menjamin ruang publik sebagai ruang inklusif yang terbuka lebar untuk ekspresi keberagaman termasuk perayaan hari besar keagamaan;
- ▶ Menguatkan kolaborasi pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha dalam mempromosikan persatuan atas keberagaman;
- ▶ Menerapkan budaya organisasi yang inklusif dimulai dari sektor pemerintahan sebagai teladan bagi sektor-sektor lainnya;
- ▶ Menjamin rasa aman bagi setiap pemeluk agama dan/atau kepercayaan dalam menjalankan aktivitas peribadatan dan merayakan hari besar keagamaan termasuk mempermudah dan memfasilitasi izin pendirian tempat ibadah;
- ▶ Menjamin rasa aman bagi setiap pemeluk agama dan/atau kepercayaan dalam menjalankan aktivitas peribadatan termasuk dalam pendirian rumah ibadah;
- ▶ Memperkuat Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan dukungan anggaran terhadap program-program penguatan kerukunan beragama;
- ▶ Menghadirkan program dukungan bantuan untuk tempat ibadah.



16. KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN YANG TERJANGKAU

- ▶ Memperkuat riset pengembangan obat (termasuk herbal dan tradisional), vaksin dan bahan medis dalam negeri;
- ▶ Memperluas cakupan program vaksinasi untuk mencapai *Universal Child Immunization* (UCI) hingga desa;
- ▶ Memajukan industri farmasi dan alat kesehatan sebagai industri strategis nasional dengan insentif fiskal dan non fiskal;
- ▶ Mendorong Badan Pengawasan Obat dan Makan (BPOM) untuk lebih profesional dalam melakukan pengujian dan pengawasan izin edar terhadap obat, vaksin dan makanan.

- ▶ Memperkuat posisi kebudayaan lokal dari seluruh Indonesia sebagai sumber inspirasi terbentuknya kebudayaan nasional;
- ▶ Memperkuat modal sosial (*social capital*) yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu menumbuhkan semangat gotong royong, musyawarah, dan kebhinekaan;
- ▶ Mendorong terbentuknya kebudayaan baru Indonesia yang bersumber dari warisan budaya lokal serta bersikap selektif, adaptif dan korektif terhadap arus budaya global.
- ▶ Memperkuat eksistensi budaya, pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat adat.

17. KARAKTER DAN MARTABAT KEBUDAYAAN NASIONAL YANG KUAT, SEBAGAI JATI DIRI BANGSA

- ▶ Memajukan kebudayaan nasional Indonesia yang berkontribusi terhadap peradaban dunia sebagai bentuk identitas nasional dan kebanggaan di tengah serbuan peradaban global yang sangat masif;
- ▶ Menjadikan kebudayaan nasional sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional;





MISI 6

MEWUJUDKAN KELUARGA INDONESIA YANG SEJAHTERA DAN BAHAGIA SEBAGAI AKAR KEKUATAN BANGSA

Kualitas manusia Indonesia berawal dari keluarga yang sejahtera dan bahagia, maka kami bertekad untuk mendukung orang tua dalam mengawali tumbuh kembang anak. Termasuk di dalamnya: dukungan ibu hamil, nutrisi yang memadai bagi anak, pendidikan hingga anak mampu tumbuh kembang dan berkarya. Negara juga bertanggung jawab atas nasib anak-anak terlantar, yatim piatu, juga kelompok lansia sebagai bagian dari keluarga besar Indonesia.

Agenda Misi 6

1. MEMULIAKAN IBU

- ▶ Memberikan perhatian penuh dan bantuan kepada ibu hamil, memastikan implementasi cuti hamil dan melahirkan untuk ibu disertai dengan menghadirkan cuti bagi ayah;
- ▶ Memastikan kaum ibu bisa tetap berkarya dalam berbagai peran melalui ketersediaan tempat penitipan anak yang terjangkau dan ruang laktasi di ruang-ruang publik;
- ▶ Menghadirkan rasa aman bagi kaum ibu dengan memastikan perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- ▶ Memberikan perhatian khusus kepada kaum ibu yang juga menjadi kepala keluarga melalui pemberian bantuan;
- ▶ Memberdayakan kaum ibu untuk berkarya dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui aktivasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

keluarga berusia lanjut dan/atau anggota keluarga yang berkebutuhan khusus;

- ▶ Mendorong tersedianya ruang-ruang publik, ruang-ruang rekreasi dan olahraga yang ramah bagi seluruh anggota keluarga;
- ▶ Memperkuat peran kelembagaan urusan keluarga, perempuan dan anak, untuk menjawab kebutuhan prioritas peningkatan kesejahteraan keluarga.

3. ANAK SEHAT, CERDAS, DAN BAHAGIA

- ▶ Mendorong pemenuhan gizi seimbang bagi setiap anak dan menurunkan risiko obesitas pada anak termasuk melalui pengaturan pada gula, garam dan lemak (GGL) berlebih serta menghadirkan fasilitas dan sarana-prasarana beraktivitas fisik bagi anak;
- ▶ Menghadirkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkualitas dan terjangkau;
- ▶ Menjamin hak setiap anak untuk memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas untuk kesehatan fisik dan mental;
- ▶ Memastikan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan setinggi-tingginya termasuk bagi anak berkebutuhan khusus;
- ▶ Menghadirkan ruang-ruang bagi anak untuk mengekspresikan dirinya dengan menghadirkan taman dan ruang publik, lapangan gratis untuk warga, dan perpustakaan yang ramah anak di berbagai daerah;

2. KESEJAHTERAAN KELUARGA

- ▶ Memastikan tersedianya lapangan kerja agar seorang ayah, ibu maupun seorang anak untuk dapat memenuhi kebutuhan keluarganya;
- ▶ Memastikan biaya hidup yang terjangkau sebagai upaya dukungan negara dalam memastikan kesejahteraan setiap keluarga;
- ▶ Memberikan bantuan perlindungan lebih bagi keluarga yang memiliki anggota

- ▶ Menghadirkan rasa aman bagi setiap anak dengan melindunginya dari segala bentuk perundungan, kekerasan maupun diskriminasi, termasuk edukasi terhadap hak anak;
- ▶ Memberikan perhatian khusus kepada anak yatim piatu dan anak terlantar dengan memastikan mereka memperoleh kesempatan yang sama untuk mewujudkan potensinya.

4. PENDIDIKAN KELUARGA

- ▶ Mendorong keterlibatan orang tua dalam tumbuh kembang anak khususnya untuk pendidikan karakter;
- ▶ Memfasilitasi pembekalan dan pengayaan bagi orang tua dan calon orang tua;
- ▶ Melibatkan komunitas dalam pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai kepada anak, termasuk kejujuran, semangat juang, dan menghargai perbedaan;
- ▶ Memperkuat kelembagaan yang menaungi penyiapan pendidikan keluarga;
- ▶ Mendorong peran keluarga dalam membentuk generasi bebas narkoba.





MISI 7

MEMPERKUAT SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, SERTA MENINGKATKAN PERAN DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA DALAM KANCAH POLITIK GLOBAL UNTUK MEWUJUDKAN KEPENTINGAN NASIONAL DAN PERDAMAIAN DUNIA

Mengingat posisi Indonesia sebagai episenter kawasan Asia Tenggara, sekaligus sebagai jalur nadi ekonomi dunia dan stabilisator geopolitik regional, kami bertekad mendorong peran aktif Indonesia dalam penentuan agenda besar dunia dan umat manusia. Hal ini didasarkan pada amanat para pendiri bangsa agar Indonesia secara bebas aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kami akan memperkuat sistem dan strategi pertahanan negara yang adaptif terhadap dinamika global era baru yang penuh ketidakpastian, tantangan, serta ancaman konvensional dan nonkonvensional. Selain itu, kami akan memperkuat diplomasi ekonomi dan sosial-budaya agar Indonesia dapat memanfaatkan berbagai potensi global untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan.

Agenda Misi 7

1. DIPLOMASI EKONOMI

- ▶ Menginisiasi, mendorong, dan memfasilitasi kerja sama internasional yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun non-pemerintah untuk mengambil manfaat dari berbagai kegiatan perekonomian dunia;
- ▶ Memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral termasuk menyepakati perjanjian dagang seperti Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) maupun Perjanjian Dagang Terbatas (PTA) untuk mendongkrak daya saing dan daya tarik produk Indonesia;
- ▶ Memperkuat posisi Indonesia di berbagai lembaga keuangan dunia, seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Pembangunan Asia (ADB), Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB), dan Bank Pembangunan Islam (IDB) untuk memaksimalkan dukungan dunia internasional bagi pendanaan pembangunan Indonesia;
- ▶ Memperkuat kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara maju yang memberikan transfer ekonomi dan teknologi untuk kemajuan Indonesia, seperti G20, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dan Organisasi Negara-negara Asia Pasifik (APEC);
- ▶ Mendorong implementasi penuh Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan perjanjian ekonomi komprehensif kawasan (RCEP) untuk memajukan pemerataan ekonomi kawasan Asia Tenggara dan memberikan efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi Indo-Pasifik;

- ▶ Mendorong peningkatan kerja sama ekonomi *global south* dengan negara berkembang untuk menciptakan kemajuan dan keadilan ekonomi kawasan secara bersama-sama;
- ▶ Menyeimbangkan posisi Indonesia dalam *Belt and Road Initiative* (BRI), BRICS, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), untuk mengambil manfaat optimal bagi perekonomian Indonesia.

2. POLITIK LUAR NEGERI BERLANDASKAN KEADILAN DAN KEMAJUAN

- ▶ Menerapkan politik luar negeri Indonesia berbasis nilai dan norma internasional;
- ▶ Memosisikan Indonesia sebagai kekuatan penyeimbang tatanan global yang mampu mencegah dominasi kekuatan tertentu yang merugikan negara berkembang dan Non-Blok;
- ▶ Menegaskan posisi Indonesia sebagai kekuatan tatanan regional di kawasan Indo-Pasifik;
- ▶ Mengaktifkan peran kepemimpinan Indonesia dan ASEAN terhadap dinamika Indo-Pasifik agar tercipta perdamaian, pertumbuhan ekonomi, dan keadilan di kawasan;
- ▶ Meneguhkan posisi Indonesia sebagai kekuatan penghubung terhadap beragam inisiatif konektivitas global untuk

- mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan kondusif terhadap pembangunan nasional;
- ▶ Memperkuat diplomasi pertahanan dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik untuk membangun kepercayaan dunia terhadap penggunaan kekuatan oleh Indonesia untuk perdamaian;
 - ▶ Memperkuat kedaulatan Indonesia di wilayah perbatasan dan di pulau-pulau terluar melalui modernisasi pos penjagaan serta tapal batas negara di darat, patroli militer dan penjaga pantai Indonesia di laut sesuai batas kedaulatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di perbatasan/pulau-pulau terluar;
 - ▶ Menyelaraskan penataan ruang wilayah nasional dan daerah dengan tata ruang wilayah pertahanan serta kawasan strategis nasional;
 - ▶ Mengoptimalkan penyelesaian masalah perbatasan dengan negara lain dan masalah keamanan lainnya, melalui diplomasi secara damai dan pembangunan kepercayaan internasional.

3. BRAND INDONESIA SEBAGAI SOFT POWER YANG DIKENAL DUNIA

- ▶ Menugaskan setiap Duta Besar, Kedutaan Besar Republik Indonesia dan kantor perwakilan di seluruh dunia untuk berperan sebagai duta perdagangan Indonesia yang mempromosikan produk Indonesia;
- ▶ Memulai gelombang budaya dan kreasi yang menampilkan *brand* Indonesia dalam skala global melalui insentif bagi pelaku industri kreatif di Indonesia;
- ▶ Menginisiasi pagelaran budaya dan kreasi Indonesia di mancanegara, penguatan diplomasi budaya melalui forum internasional, serta digitalisasi *database* budaya dan kreasi Indonesia yang dapat diakses oleh masyarakat dunia;
- ▶ Mendorong pendidikan sebagai sarana penyebaran *brand* Indonesia melalui: (1) ekspansi kerja sama dan bantuan terhadap studi tentang Indonesia di mancanegara, (2) pertukaran pelajar Indonesia untuk belajar di universitas terkemuka di luar negeri, (3) penambahan jumlah beasiswa bagi para mahasiswa dan dosen untuk studi, magang dan riset ke luar negeri, (4) dorongan beasiswa bagi mahasiswa mancanegara untuk studi dan riset di Indonesia, dan (5) intensifikasi kerja sama dengan perguruan tinggi dari negara yang maju dibidang teknologi;
- ▶ Menjadikan kuliner sebagai sarana penyebaran *brand* Indonesia ke seluruh dunia melalui fasilitasi dan skema insentif dari perwakilan Indonesia di Luar Negeri untuk memulai program ekspansi pusat UMKM kuliner Indonesia di mancanegara serta insentif ekspor dan *offshoring* industri F&B Indonesia di seluruh dunia;
- ▶ Menjadikan olahraga sebagai sarana *brand* Indonesia yang berorientasi terhadap peningkatan prestasi dan reputasi di mata dunia melalui pembinaan, pengembangan, dan pemerataan kemajuan berbagai cabang olahraga khususnya yang dipertandingkan dalam event olahraga dunia, termasuk dengan menjamin kesejahteraan para atlet berprestasi dan dukungan penuh bagi organisasi olahraga;
- ▶ Mengoptimalkan peran pariwisata sebagai kunci pengenalan *brand* Indonesia melalui penciptaan pariwisata inklusif yang mengakomodasi masyarakat setempat, didukung inisiatif pemerataan tempat wisata di seluruh wilayah Indonesia;
- ▶ Mengintensifkan peran dan *brand* Indonesia dalam bidang kemanusiaan melalui peningkatan operasional Indonesia Aid kepada negara-negara yang membutuhkan bantuan.



4. DIPLOMASI OLEH DAN UNTUK RAKYAT

- ▶ Menciptakan tatanan dan regulasi internasional yang sesuai dengan aspirasi juga kepentingan rakyat Indonesia dan masyarakat dunia melalui penempatan perwakilan Indonesia dalam forum internasional;
- ▶ Mengikutsertakan diaspora Indonesia yang bermukim di segala penjuru dunia sebagai promotor produk Indonesia sekaligus memainkan peran penting sebagai *pulling-factor* bagi ekspor produk Indonesia dengan memberikan beberapa insentif;
- ▶ Menginisiasi pelibatan WNI yang ingin melebarkan sayap untuk turut mengenalkan *brand* Indonesia di luar negeri melalui insentif dan kemudahan keimigrasian;
- ▶ Memudahkan aktor non-negara di Indonesia untuk melakukan kerja sama transnasional untuk memperlancar kolaborasi ekonomi dan sosial antar negara;
- ▶ Menciptakan kerangka kerja sama ketenagakerjaan yang setara bagi setiap pihak untuk mendukung transfer teknologi serta memastikan terwujudnya pekerjaan yang layak bagi tiap pihak yang terlibat;
- ▶ Menginisiasi pemberian dukungan bagi diaspora Indonesia yang mendukung penyebaran *brand* Indonesia kepada masyarakat lintas kelas di seluruh dunia;
- ▶ Mengintensifkan perlindungan dan kepastian hukum bagi WNI di luar negeri, terutama kepada pekerja migran, pelajar kurang mampu, dan WNI lainnya yang menghadapi masalah hukum dan sosial yang mencirikan ketidakadilan di luar negeri;
- ▶ Meningkatkan keikutsertaan perempuan Indonesia dalam politik luar negeri nasional untuk menciptakan diplomasi dan kerja sama yang lebih inklusif.

5. KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAIN ABADI, DAN KEADILAN SOSIAL

- ▶ Menjaga amanah Dasasila Bandung KAA 1955 dengan menyebarluaskan nilai-nilai keadulatan, keadilan, dan hak asasi manusia, serta berperan sebagai inisiatör resolusi perdamaian serta pembela negara tertindas;
- ▶ Mengambil peran sentral dalam kerja sama ekonomi, politik, riset dan teknologi, di antara negara berkembang (*south-south cooperation*) secara bilateral, regional, dan global untuk menciptakan kemajuan dan keadilan ekonomi *global south*;
- ▶ Berperan sebagai anggota penting di forum internasional, seperti G20, OKI, dan OECD, agar Indonesia dapat berkontribusi langsung dan ikut menentukan kerangka kebijakan dunia;
- ▶ Menginisiasi kerja sama ekonomi berkelanjutan di antara negara dan masyarakat dunia dalam memenuhi SDGs 2030 yang sesuai dengan konteks lokal/ regional dan mendukung munculnya indikator lainnya yang didasarkan kepada *national well-being* dan *national environmental boundary*;
- ▶ Menginisiasi kerja sama hijau yang mengakomodasi aspirasi dan situasi tiap negara di dunia melalui program dan mekanisme penanganan perubahan iklim yang memenuhi prinsip keadilan iklim;
- ▶ Menginisiasi pengembangan ekonomi biru (*blue economy*) melalui kerja sama ekonomi, riset dan inovasi berkelanjutan antar negara maju dan berkembang sesuai target SDGs;

- ▶ Menjadi aktor penting dalam kampanye perdamaian dunia dengan berperan dalam Pasukan Perdamaian PBB, ekspansi peran mediator perdamaian konflik global, penegasan kepemimpinan Indonesia dalam perumusan agenda perdamaian dunia, dan terlibat aktif dalam penyelesaian masalah kemanusiaan dunia, termasuk Palestina;
- ▶ Meningkatkan posisi Indonesia sebagai negara yang mempromosikan inklusivitas dan toleransi beragama yang menjadi rahmat bagi semesta alam dan peningkatan kerja sama antar agama dalam kerangka organisasi internasional.



6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

- ▶ Merumuskan strategi pertahanan Indonesia yang relevan dengan perkembangan situasi nasional dan internasional;
- ▶ Menganalisis potensi dinamika dunia yang mempengaruhi strategi pertahanan Indonesia era pasca-2045 dan mempersiapkan kekuatan pertahanan Indonesia untuk menghadapinya secara adaptif dan dengan membangun kesigapan dan kompetensi;
- ▶ Mendorong gelar kekuatan strategis dari Sabang sampai Merauke, didukung oleh Angkatan Darat yang fleksibel dan adaptif, Angkatan Laut yang menjadi *blue water navy*, serta Angkatan Udara yang terotomatisasi dan mampu meraih supremasi udara;
- ▶ Mewujudkan profesionalitas TNI melalui peningkatan kesiapan dan latihan tempur segenap satuan TNI sesuai tugas dan fungsi masing-masing satuan, serta memastikan kesejahteraan prajurit dan keluarganya;
- ▶ Mendorong ketersediaan alutsista kontemporer dan adaptif terhadap kapabilitas lawan melalui penuntasan program Minimum Essential Force, peningkatan dan pelaksanaan program Essential Force pasca-2024, dan pengadaan alutsista *network-centric*;
- ▶ Meningkatkan inovasi, produksi, dan teknologi pertahanan melalui transfer teknologi, akuisisi alutsista berteknologi tinggi, serta memperkuat industri pertahanan dalam negeri;
- ▶ Mengembangkan teknologi pertahanan antariksa bekerja sama dengan institusi nasional dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya, melalui pengembangan satelit komunikasi, navigasi, pengindraan jarak jauh, serta intelijen pengamatan dan pengawasan;
- ▶ Mendorong jumlah TNI perempuan untuk mengisi jabatan perwira tinggi dan menaikkan persentase minimal perempuan dalam setiap rekrutmen TNI.

7. ADAPTIF DAN KOMPETEN TERHADAP ANCAMAN BARU NON TRADISIONAL

- ▶ Menciptakan strategi ketahanan nasional komprehensif bagi Indonesia untuk beradaptasi dengan ancaman non konvensional di dalam zona abu-abu serta peperangan hibrida lintas dimensi;
- ▶ Meningkatkan kemampuan Indonesia mengatasi ancaman siber sebagai bagian dari terorisme atau peperangan non konvensional;
- ▶ Mempersiapkan Indonesia untuk menghadapi ancaman keamanan dari sektor pangan, energi, lingkungan, dan kesehatan yang dapat muncul akibat bencana alam, dinamika politik, perang ekonomi, pandemi, peperangan hibrida, dan lainnya;
- ▶ Mendorong penguatan keamanan maritim Indonesia melalui kerja sama multilateral untuk menghadapi ancaman non-negara seperti pengambilan kekayaan laut ilegal, pembajakan laut, penyelundupan narkoba, perdagangan orang, kerusakan lingkungan maritim yang disengaja, dan sengketa wilayah.





MISI 8

MEMULIHKAN KUALITAS DEMOKRASI, MENEGAKKAN HUKUM DAN HAM, MEMBERANTAS KORUPSI TANPA TEBANG PILIH, SERTA MENYELENGGARAKAN PEMERINTAHAN YANG BERPIHKAK PADA RAKYAT

Kami percaya menegakkan hukum dan merawat demokrasi adalah syarat hadirnya keadilan ekonomi dan sosial bagi seluruh rakyat. Kami akan kembali pada amanat reformasi, menyempurnakan otonomi daerah, meningkatkan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparat Penegak Hukum (APH) serta memberantas korupsi sampai ke akar tanpa tebang pilih.

Agenda Misi 8

1. SISTEM HUKUM YANG ADIL, TRANSPARAN DAN MENGAYOMI

- ▶ Memperbaiki substansi ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal;
- ▶ Menghadirkan kepastian hukum yang tidak diskriminatif dan mencegah Aparat Penegak Hukum (APH) dijadikan alat politik;
- ▶ Memastikan penegakan hukum berjalan secara manusiawi dan berkeadilan melalui fungsi kontrol yang ketat kepada APH;
- ▶ Mempercepat reformasi hukum di empat area prioritas, yaitu peradilan dan penegakan hukum, agraria dan sumber daya alam, pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan perundang-undangan;
- ▶ Memperkuat kesadaran hukum masyarakat demi mewujudkan budaya hukum yang kokoh;
- ▶ Memberikan bantuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat miskin, kelompok rentan dan WNI yang tinggal di luar negeri;
- ▶ Penguatan kualitas manusia bidang hukum, dengan:
 - ▶ Memperbaiki proses rekrutmen staf, lelang jabatan, serta promosi APH meliputi Polri, Kejaksaan, dan Lembaga Kehakiman dengan mengedepankan transparansi dan meritokrasi;

- ▶ Mewajibkan pejabat APH untuk melaporkan Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) secara periodik dengan standar pelaporan yang lebih akuntabel;
- ▶ Memperbaiki kesejahteraan APH dengan pengukuran kinerja yang lebih objektif; dan
- ▶ Melakukan pengawasan yang ketat terhadap pejabat APH termasuk di lingkungan peradilan.
- ▶ Bersama dengan Mahkamah Agung mendorong penyempurnaan sistem informasi terintegrasi di lingkungan peradilan, (pidana, perdata, tata usaha negara, kekayaan intelektual, dan hubungan industrial) yang mencakup seluruh kamar dan tingkatan;
- ▶ Menguatkan lembaga HAM nasional, menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan mendorong pemulihan sosial-ekonomi korban pelanggaran HAM;
- ▶ Memberikan penghormatan dan jaminan terhadap hukum adat dan hak-hak masyarakat adat dalam seluruh tahapan pembangunan sehingga tidak terjadi penyingkiran dari ruang hidupnya.

2. PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

- ▶ Menekan tingkat korupsi melalui perbaikan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, yang membaik dari 34 (2022) ke 44-46 (2029);

- ▶ Memperkuat pencegahan korupsi melalui Sistem Integritas Nasional (SIN) yang melibatkan pemerintah dan swasta;
- ▶ Memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi di seluruh sektor termasuk sektor-sektor strategis seperti SDA, alutsista, program sosial, infrastruktur, dan BUMN;
- ▶ Mengembalikan peran KPK dalam pemberantasan korupsi yang independen tidak tebang pilih dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum lain;
- ▶ Mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemiskinan yang nyata dan bertanggung jawab bagi pelaku korupsi;
- ▶ Memfasilitasi masyarakat sipil di bidang pemberantasan dan pencegahan korupsi, serta menempatkannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan negara yang bersih;
- ▶ Memasukkan budaya anti-korupsi dalam kurikulum pendidikan nasional.

3. BIROKRASI YANG PROFESIONAL DAN MELAYANI

- ▶ Menghadirkan sistem pelayanan publik yang cepat, mudah dan murah dalam pemenuhan enam urusan wajib pelayanan dasar, yaitu: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, (5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (6) Sosial;
- ▶ Penyesuaian struktur organisasi birokrasi untuk mengantisipasi dan merespons kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi dan pergeseran sosial-budaya;
- ▶ Mengurangi tumpang tindih fungsi dan tugas birokrasi guna mendongkrak kinerja dan efisiensi birokrasi;
- ▶ Memperluas reformasi birokrasi tematik

dengan lima indikator utama yaitu: (1) penurunan kemiskinan, (2) peningkatan investasi, (3) digitalisasi pemerintahan, (4) lingkungan hidup berkelanjutan, dan (5) pelayanan publik;

- ▶ Menyederhanakan sistem akuntabilitas dan mengurangi beban administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk tenaga pendidikan, peneliti, kesehatan, dan perangkat daerah untuk mengoptimalkan kinerja;
- ▶ Menerapkan prinsip meritokrasi dari proses seleksi masuk hingga promosi jabatan, sebagai fondasi dari penyelenggaraan sistem pemerintahan di Indonesia yang berbasis kinerja;
- ▶ Mengoptimalkan integrasi data pemerintah termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) sebagai Basis Data Tunggal pelayanan publik yang efisien dan transparan;
- ▶ Mempercepat transformasi digital dalam penyelenggaraan negara melalui penerapan e-planning, e-budgeting, e-procurement, dan e-reporting, serta melanjutkan program Open Government Indonesia (OGI);

- ▶ Mencegah politisasi birokrasi melalui pembentukan hubungan kemitraan yang profesional dan proporsional antara politisi dengan pejabat birokrasi;

- ▶ Memperbaiki sistem pensiun, untuk memberikan jaminan kesejahteraan akan kesejahteraan para ASN di masa tua.

4. OTONOMI DAERAH YANG PARIPURNA

- ▶ Mengakhiri tarik menarik kewenangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, dengan pendekatan komunikasi, regulasi, birokrasi dan fiskal;
- ▶ Memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk mengatur dan mengelola potensi kekayaan yang dimilikinya;



- ▶ Mendorong Pemda meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap Dana Transfer Daerah;
- ▶ Meningkatkan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah;
- ▶ Mendorong kerja sama antar daerah otonom dalam mengembangkan potensi daerah yang dimilikinya;
- ▶ Memberikan tanggung jawab penuh kepada Pemda terkait kewenangan yang sudah diberikan dengan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Pusat;
- ▶ Memberikan sumber keuangan kepada Pemda, untuk membiayai dan mendukung kewenangan yang telah didesentralisasikan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus/ Dana Keistimewaan yang ditentukan secara adil dan transparan;
- ▶ Meningkatkan kualitas pengelolaan pendanaan Otonomi Khusus (Otsus) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan target dan capaian yang lebih terukur;
- ▶ Menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan secara selektif memfasilitasi pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), merevitalisasi Unit-Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dan Satuan-Satuan Permukiman Transmigrasi (SPT);
- ▶ Mendorong Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk mengawal otonomi daerah.
- ▶ Mendorong penguanan pengawasan internal Polri melalui libatan masyarakat, penguanan peran Kompolnas, serta perbaikan sistem kesejahteraan anggota Polri demi Polri yang bersih dan melayani;
- ▶ Memperkuat kemampuan manusia, fasilitas, sistem dan teknologi, untuk meningkatkan kinerja Polri dalam menjaga ketertiban masyarakat;
- ▶ Meningkatkan pemahaman dan kapasitas anggota Polri tentang prinsip dan norma hak asasi manusia (HAM) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;
- ▶ Mengedepankan upaya pencegahan dan pendekatan dialogis yang proaktif dan humanis dalam menyelesaikan masalah keamanan dan sosial di masyarakat;
- ▶ Mendorong dan memperkuat Hubungan Internasional Polri guna mencegah dan menyelesaikan kejahatan transnasional;
- ▶ Memberantas judi *online*, pinjaman *online* ilegal, penyalahgunaan narkoba, dan praktik negatif atau kejahatan lain yang merusak generasi muda bangsa melalui pendekatan edukasi dan penegakkan hukum;
- ▶ Mengembangkan sistem digital untuk seluruh layanan masyarakat di institusi Polri agar transparan, mudah, nyaman dan meminimalkan praktik pungutan liar;
- ▶ Mendorong jumlah Polisi Wanita untuk mengisi jabatan perwira tinggi dan menaikkan persentase minimal perempuan dalam setiap rekrutmen Polri.

5. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

- ▶ Menjaga profesionalisme Polri dengan memastikan sistem rekrutmen, mutasi, dan promosi yang mengedepankan akuntabilitas dan meritokrasi;

6. DEMOKRASI DAN KEDAULATAN RAKYAT

- ▶ Menjamin kebebasan berbicara, berekspresi dan berkumpul serta memperkuat peran pers dan masyarakat sipil;
- ▶ Memastikan partisipasi bermakna masyarakat dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan;

- ▶ Memperbaiki regulasi yang berpotensi menimbulkan salah interpretasi yang dapat menghambat upaya menjamin kebebasan berbicara, berkumpul dan berekspresi;
- ▶ Mendorong pelaksanaan demokrasi berbiaya murah, agar warga negara yang berkualitas punya kesempatan yang sama untuk dipilih;
- ▶ Mendorong pengesahan RUU Pendanaan Politik dalam rangka perbaikan tata kelola partai politik yang mencakup aspek pembiayaan, pengelolaan partai dan partisipasi Pemilu, Pilpres, dan Pilkada;
- ▶ Menjamin netralitas penyelenggara pemilu dalam menjunjung proses demokrasi yang bersih dan transparan;
- ▶ Menyediakan Dana Penyehatan Demokrasi untuk memperkuat peran masyarakat sipil Indonesia;
- ▶ Membangun pemahaman rakyat terhadap demokrasi, melalui berbagai pendidikan publik, kampanye dan program penguatan literasi;
- ▶ Menyederhanakan persyaratan dan prosedur pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan.





Agenda Strategis

8 Sayap Kemajuan

Untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan memenuhi prinsip keadilan dan keberlanjutan, maka setiap kawasan yang ada di Indonesia harus didorong untuk memaksimalkan perannya sebagai sayap kemajuan. Sejalan dengan hal ini, kami menyusun agenda strategis, yang meliputi pengembangan delapan kawasan di Indonesia, yang kami sebut dengan **“8 Sayap Kemajuan”**, yaitu:

PADA TAHUN
KETIKA MULAI
RU. SERKIL
MATO HODA
DA PEMER
LAGI DI
SUASAN
NGAN
BERG





SUMATRA

JAWA

KALIMANTAN

BALI &
NUSA
TENGGARA

SULAWESI

MALUKU

PAPUA

KAWASAN
PESISIR,
KEPULAUAN &
PEDALAMAN



Sumatra

Jembatan Menuju Komunitas Global

- 1.** Peningkatan kualitas dan stabilitas harga jual, serta industrialisasi **karet dan sawit**
- 2.** Membangun **jaringan transportasi lintas Sumatra yang terhubung dengan Jawa** melalui penguatan peran jalan tol, jalur kereta api, dan penyeberangan Selat Sunda
- 3.** **Peningkatan panjang dan kualitas jalan nasional, provinsi, kabupaten serta desa**, untuk memastikan potensi ekonomi di Sumatra termanfaatkan dengan baik
- 4.** Menjadikan **Kuala Tanjung sebagai simpul internasional** di wilayah Indonesia Bagian Barat
- 5.** Penguatan industri/ekonomi maritim di sekitar Selat Malaka dan mewujudkan **konektivitas Sumatra-Jawa-ASEAN**
- 6.** Menyederhanakan dan memudahkan proses **legalitas tanah ulayat/tanah adat**
- 7.** Pengembangan **KEK Sumatra** sebagai pusat produksi **berstandar global yang ramah lingkungan**
- 8.** Pencegahan kebakaran hutan secara **masif dan sistematis**, untuk menghindari gangguan ekonomi dan kesehatan rakyat
- 9.** Kepastian **kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia di wilayah Natuna**, termasuk dari aktivitas pencurian ikan dan penyelundupan.
- 10.** Kepastian **peningkatan pemanfaatan migas, batubara, dan sumber daya mineral lainnya**
- 11.** Percepatan **eksplorasi dan eksplorasi panas bumi**, melalui insentif fiskal dan non fiskal
- 12.** Mengembangkan **industri pariwisata dan industri halal** memanfaatkan potensi budaya, keindahan alam dan kreativitas, dengan melibatkan UMKM lokal
- 13.** Apresiasi, pelestarian, dan pengembangan budaya Sumatra agar semakin menasional dan mendunia
- 14.** Meningkatkan **produktivitas dan ketahanan pertanian dan perikanan berkelanjutan dengan implementasi penerapan teknologi yang berbasis komoditas unggulan** meliputi kakao, kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, minyak bumi, gas bumi, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya
- 15.** Meningkatkan **kualitas manusia khususnya peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan** termasuk keselarasan pendidikan dan potensi lokal
- 16.** Perluasan **pemanfaatan sumber daya maritim melalui pengembangan ekonomi biru** untuk meningkatkan kemajuan dan pemerataan ekonomi khususnya pada wilayah kepulauan



Jawa

Fondasi Ekonomi yang Berkelanjutan

- 1. Jabodetabek menjadi pusat ekonomi dan bisnis berkelanjutan dan berskala global** yang ditunjang dengan kemudahan berinvestasi, kelancaran mobilitas orang dan barang, kesiapan menghadapi banjir dan penurunan muka air tanah, serta pemenuhan infrastruktur dasar bagi warga, termasuk jaringan telekomunikasi dan informasi digital
- 2. Kawasan metropolitan menjadi pusat pemerataan ekonomi berkelanjutan** yang ditunjang dengan pemenuhan infrastruktur dasar, termasuk jaringan telekomunikasi dan informasi digital bagi warga, penyediaan hunian terjangkau di pusat kota, perbaikan kualitas lingkungan hidup, dan pengembangan sektor usaha unggulan, seperti pariwisata, perdagangan, industri inovasi kreatif dan teknologi, serta industri pengolahan
- 3. Wilayah sentra industri dengan komoditas unggulannya bangkit menjadi motor pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja** yang ditunjang oleh keterhubungan dengan pelabuhan dan pasar melalui angkutan barang multimoda yang efektif dan efisien serta penambahan sarana dan prasarana logistik yang memadai, seperti dry port dan pergudangan
- 4. Kota-kota lain di pulau Jawa menjadi pusat kegiatan yang menjembatani perkotaan metropolitan dan pedesaan** dengan ditunjang penyediaan hunian terjangkau di pusat kota, pendidikan vokasi dan pendidikan tinggi, sistem transportasi umum yang mudah dan murah, pemenuhan infrastruktur dasar, termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta pembangunan ruang publik
- 5. Kawasan pedesaan menjadi pusat pangan, pariwisata, kebudayaan, dan sumber kekayaan alam** yang ditunjang dengan pemenuhan layanan infrastruktur dasar, termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi warga, meningkatnya dukungan bagi Pemerintah Desa serta bantuan bagi petani dan nelayan
- serta tersedianya infrastruktur penghubung antarwilayah
- 6. Kawasan Pesisir Utara dan Selatan menjadi pusat pariwisata, industri perikanan, dan sumber kekayaan alam** yang ditunjang dengan pembangunan infrastruktur, penyiapan ekosistem alam, dan kapasitas adaptasi masyarakat untuk mitigasi bencana pesisir serta pemenuhan layanan infrastruktur dasar dan infrastruktur penghubung dengan kota
- 7. Transisi energi dipercepat** melalui pengembangan sumber terbarukan sesuai dengan potensi lokal dari setiap daerah, seperti eksplorasi geothermal, PLTS, dan PLTA, pemensiunan dini PLTU, serta pengembangan sistem ketenagalistrikan
- 8. Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) strategis dipulihkan sebagai sumber air baku untuk air minum dan pondasi ketahanan air di Pulau Jawa**, meliputi DAS Citarum, Cisadane, Ciliwung, Brantas, dan Bengawan Solo
- 9. Pelabuhan Patimban** memiliki fasilitas lengkap dan terintegrasi secara fisik dengan angkutan barang multimoda yang efisien dan secara data dan informasi dengan National Logistics Ecosystems
- 10. Bandara Kertajati** menjadi sentra perawatan dan perbaikan pesawat serta pusat pengembangan dan riset industri teknologi tinggi yang terhubung dengan akses logistik multimoda
- 11. Tol Transjawa** dituntaskan pembangunannya hingga Banyuwangi, pembangunan jalan arteri sebagai akses tol, dan penyesuaian tarif bagi kendaraan logistik
- 12. Percepatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi**, melalui insentif fiskal dan non fiskal



Kalimantan

Tonggak Ekonomi Hijau, Beranda Indonesia yang Maju dan Asri

1. Menjadikan **Kalimantan contoh dunia dalam penerapan ekonomi hijau** termasuk melalui insentif bagi yang jaga hutan, reforestasi, dan lainnya
2. Menjadikan Kalimantan Lumbung Energi Terbarukan melalui **pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, pemanfaatan sawit untuk PLTBm (biomassa), pengembangan PLTS**, dan program lainnya
3. **Memastikan bagi seluruh kota dan desa** teraliri listrik, terhubung internet, tersedia air bersih dan sanitasi, bahan pokok terjangkau, fasilitas kesehatan dan pendidikan dekat, termasuk pada daerah perbatasan
4. **Melibatkan masyarakat lokal** dalam tiap tahap pembangunan dan menguatkan **pengakuan hak ulayat masyarakat adat**
5. **Memastikan hak masyarakat lokal** dalam pengelolaan SDA (misalnya: pertambangan, perkebunan)
6. Mencetak lapangan kerja dengan membangun pabrik **industri padat karya** (contoh: tekstil, furnitur), pabrik **inovasi tinggi** (misalnya: petrokimia, bioteknologi), dan **pabrik industrialisasi komoditas unggulan** (termasuk kelapa sawit, kakao, hasil hutan) yang berjalan dengan **prinsip ESG**
7. Mewujudkan pembangunan **infrastruktur kereta** yang mengalungi Kalimantan, dengan penahapan yang optimal
8. Memastikan **transportasi** udara, darat, dan air (sungai dan laut) yang **terjangkau dan saling terhubung**
9. Memastikan perbaikan kerusakan lingkungan, utamanya deforestasi, pencemaran limbah tambang/industri, kebakaran hutan, dan pengelolaan lahan gambut



Bali dan Nusa Tenggara

Gerbang Pariwisata, Gapura Keberagaman, Pagar Kebudayaan

1. Menduniakan pariwisata Bali dan Nusa Tenggara dengan menggerakkan ekonomi lokal serta memperhatikan kelestarian lingkungan, keanekaragaman hayati dan pemajuan kebudayaan daerah

2. Antar Pulau terhubung:

- a. Penambahan dan pembaruan kapal penumpang dan kapal perintis
- b. Dukungan subsidi ongkos transportasi air agar lebih terjangkau
- c. Revitalisasi pelabuhan, diantaranya Pelabuhan Benoa, Lembar, Kupang, Celukan Bawang, Bima dan Labuan Bajo

3. Menjadikan Bali dan Nusa Tenggara sebagai teladan baik kerukunan dalam keberagaman dengan kehidupan masyarakat yang berdampingan dari ragam latar belakang

4. Peningkatan potensi lumbung pangan:

- a. Kepastian ketersediaan pupuk murah dan bibit bermutu
- b. Perbaikan dan pembaruan sistem irigasi
- c. Kepastian pembelian hasil panen

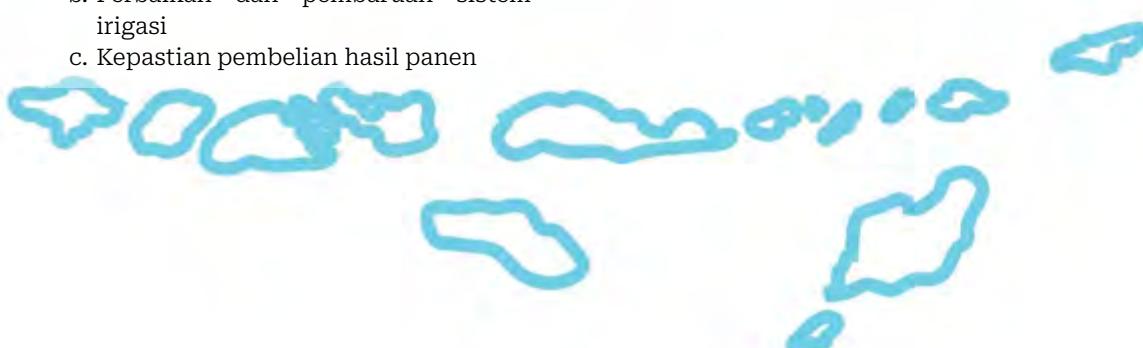
5. Pengentasan kemiskinan ekstrem khususnya di wilayah Nusa Tenggara

6. Kepastian bagi seluruh kota dan desa tersedia air bersih dan sanitasi, bahan pokok terjangkau, angkutan umum murah tersedia, teraliri listrik serta terhubung internet

7. Percepatan eksplorasi dan eksplorasi panas bumi, melalui insentif fiskal dan non fiskal

8. Fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan berkualitas mudah diakses:

- a. Layanan kesehatan di setiap desa, berisi dokter, perawat, bidan dan ambulans
- b. Perbaikan gedung sekolah, akses ke sekolah (jalan dan angkutan) serta kehadiran guru di kelas
- c. Pendidikan yang selaras dengan potensi lokal





Sulawesi

Kemakmuran di Timur

-
- 1.** Mendorong industrialisasi hasil bumi untuk meningkatkan nilai tambah produk, dan menjadikan Sulawesi: (a) Pusat cokelat dunia, (b) Basis nikel nasional, dan (c) Lumbung pangan nasional
 - 2.** Memastikan masyarakat Sulawesi mendapat manfaat dari pengelolaan sumber daya alam dalam bentuk pekerjaan yang berkualitas, aktivitas ekonomi yang menyejahterakan, penerimaan pajak yang dikembalikan ke rakyat dalam bentuk pembangunan, dan lingkungan yang tetap terpelihara
 - 3.** Meningkatkan nilai tambah komoditas hortikultura melalui: (a) Kolaborasi universitas, swasta/UMKM, dan pemerintah dalam peningkatan *up-skilling* dan *re-skilling* SDM, (b) Pupuk bersubsidi dan nonsubsidi tersedia dan mudah diakses, (c) Kepastian harga beli dan rantai distribusi komoditas hortikultura, dan (d) Regenerasi petani dengan memberikan insentif dan stimulus terhadap generasi muda agar mau bertani
 - 4.** Menjadikan Sulawesi sebagai pusat riset dan inovasi di kawasan Timur Indonesia dengan mendorong universitas-universitas yang ada sebagai universitas riset unggulan
 - 5.** Membangun jaringan logistik dan transportasi yang murah dan efisien, melalui:
 - a. Melanjutkan pembangunan Kereta Api Trans Sulawesi jalur Makassar-Parepare sampai Palu hingga 2029
 - b. Integrasi dan tata kelola yang baik terhadap sektor transportasi publik (integrasi Pete-Pete, pengembangan bus dalam kota).
 - c. Melanjutkan pembangunan jalan tol trans Sulawesi sebagai upaya menciptakan kemudahan mobilitas individu dan komoditas
 - d. Optimalisasi ALKI II dan III menghubungkan rantai pasok komoditas.
 - e. Pembangunan dan pengembangan dry port lintas kabupaten dan provinsi
 - 6.** Penataan pariwisata berbasis laut dan historis dengan penerapan prinsip berkelanjutan (eco-tourism) melalui pelibatan komunitas dan UMKM lokal
 - 7.** Pengembangan Energi Terbarukan dengan mengembangkan: (a) Pusat industri baterai mobil listrik, (b) PLTB percontohan Kabupaten Sidrap, dan (c) PLTS percontohan Kabupaten Minahasa Utara



Maluku

Kebangkitan Ekonomi Maritim dari Timur

1. Hasil laut untuk kejayaan masyarakat Maluku:

Perbaikan sarana prasarana (pelabuhan, kapal ikan, perahu nelayan), kepastian pembelian hasil tangkapan dan dukungan permodalan, tindak tegas *illegal fishing*, serta industri pengolahan hasil laut dikembangkan

2. Antar Pulau terhubung:

Penambahan dan pembaruan kapal penumpang dan kapal perintis, dukungan subsidi ongkos transportasi air agar lebih terjangkau, serta revitalisasi pelabuhan diantaranya Pelabuhan Yos Sudarso, Amahai, Tual, Namlea dan Saumlaki

3. Pemberdayaan potensi pariwisata alam, pantai dan situs sejarah yang menggerakkan ekonomi lokal,

seperti Pulau Morotai, Banda Neira, Benteng Belgica dan Tolukko dan potensi lokasi wisata lainnya

4. Menggaungkan Ambon sebagai Kota Musik Dunia

dengan menghadirkan ruang-ruang pertunjukan serta memperluas kesempatan bagi talenta lokal untuk tumbuh dan naik kelas

5. Hilirisasi tambang untuk kesejahteraan masyarakat:

menciptakan lapangan pekerjaan dan membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar, serta pengolahan limbah tambang ramah lingkungan termasuk di Halmahera dan Namlea.

6. Pemanfaatan gas bumi secara berkelanjutan:

Maluku memiliki cadangan gas bumi terbesar di Indonesia

7. Kebutuhan pangan tersedia dengan harga terjangkau

dengan rantai pasok pangan yang efisien

8. Kepastian bagi seluruh kota dan desa tersedia air bersih dan sanitasi, bahan pokok terjangkau, angkutan umum murah tersedia, teraliri listrik serta terhubung internet

9. Fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses,

termasuk ketersediaan tenaga kesehatan dan ambulans antar pulau serta pendidikan yang selaras dengan potensi lokal.



Papua

Pemerataan Sempurna

- 1.** Pendekatan dialog dan pemberdayaan masyarakat untuk penyelesaian konflik melalui cara-cara yang saling menghormati dan menghargai seluruh pihak
- 2.** Pembangunan hijau dan berkelanjutan dengan menghormati otonomi khusus dan hak ulayat masyarakat adat
- 3.** Industrialisasi barang substitusi impor pangan dan non-pangan dengan KEK Sorong sebagai hub utama
- 4.** Mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal dengan masyarakat adat dan Orang Asli Papua (OAP) sebagai aktor utama
- 5.** Revitalisasi pelabuhan Biak, Jayapura dan Samabusa Nabire untuk akses masuk utama barang dan jasa di wilayah utara serta Pelabuhan Pomako Mimika dan Merauke untuk wilayah selatan
- 6.** Melanjutkan pembangunan jalan Trans Papua dengan fokus meningkatkan kehadiran jalan nasional minimal di 90% kab/kota dan 100% jalan penghubung antar kab/kota dalam kondisi baik
- 7.** Pengaspalan lebih dari 1.700 km jalan Trans Papua yang masih dalam kondisi tanah dan kerikil
- 8.** Mengoptimalkan kolaborasi BUMN transportasi dan swasta untuk menurunkan biaya logistik menuju dan di dalam Papua
- 9.** Mengoptimalkan bandara Mozes Kilangin sebagai hub jaringan logistik udara untuk wilayah pegunungan
- 10.** Menurunkan durasi pengiriman barang Jawa-Timika-Pegunungan Tengah melalui pola distribusi dan rantai pasok yang lebih efisien
- 11.** Memastikan kehadiran puskesmas dan puskesmas pembantu di seluruh wilayah Papua untuk mengangkat taraf kesehatan masyarakat
- 12.** Memastikan sekolah-sekolah dari tingkat dasar hingga menengah atas yang berkualitas dibangun di seluruh wilayah Papua untuk memastikan akses pendidikan yang terjangkau bagi seluruh anak Papua
- 13.** Memastikan talenta dari Papua ikut terlibat aktif dalam pembangunan Indonesia di berbagai sektor dan institusi
- 14.** Mengembangkan jaringan telekomunikasi dan internet murah dan berkualitas di seluruh wilayah Papua



Kawasan Pesisir dan Kepulauan

Pilar Pemerataan Pembangunan

- 1.** **Meningkatkan kualitas manusia** melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, murah, dan mudah diakses
- 2.** **Meningkatkan ketersediaan dan keandalan layanan air bersih dan sanitasi yang layak** untuk memenuhi kebutuhan dasar warga
- 3.** **Meningkatkan besaran dana desa** bagi kawasan pesisir dan kepulauan
- 4.** **Mengoptimalkan sarana, prasarana, dan sistem logistik** untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok dan barang kebutuhan sehari-hari
- 5.** **Mengembangkan perekonomian pesisir dan kepulauan** dengan bantuan permodalan ringan untuk industri wisata bahari dan setiap tahapan produksi di industri perikanan
- 6.** **Mitigasi bencana alam dan lingkungan di kawasan pesisir** dengan melestarikan dan mengembangkan ekosistem alam serta membangun infrastruktur
- 7.** **Terhubung mudah dengan daerah lainnya** melalui sarana dan prasarana transportasi yang memadai, baik untuk keperluan mobilitas harian maupun pariwisata
- 8.** **Meningkatkan rasio elektrifikasi dan menjamin penyediaan listrik secara terus-menerus** dengan mengutamakan potensi EBT lokal
- 9.** **Menyediakan jaringan telekomunikasi yang andal**, yang memungkinkan masyarakat pesisir dan kepulauan terhubung dengan penduduk kawasan lainnya
- 10.** **Kawasan di perbatasan negara terbangun dan tumbuh ekonominya** secara mandiri dan berkelanjutan



Kawasan Pedalaman

Maju Bersama, Menjunjung Pemerataan

- 1.** **Meningkatkan kualitas manusia** melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, murah, dan mudah diakses
- 2.** **Meningkatkan ketersediaan dan keandalan layanan air bersih dan sanitasi yang layak** untuk memenuhi kebutuhan dasar warga
- 3.** **Meningkatkan besaran dana desa** bagi kawasan pedalaman
- 4.** **Mengoptimalkan sarana, prasarana, dan sistem logistik** untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan harga bahan pokok dan barang kebutuhan sehari-hari
- 5.** **Akses terhadap tanah dan sumber daya agraria yang dimiliki negara semakin kuat bagi petani gurem dan petani tak bertanah**
- 6.** **Sumber daya alam di kawasan pedalaman dilindungi, dilestarikan, dan dikelola secara berkelanjutan**
- 7.** **Terhubung mudah dengan daerah lainnya** melalui sarana dan prasarana transportasi yang memadai, baik untuk keperluan mobilitas harian maupun pariwisata
- 8.** **Kawasan di perbatasan negara terbangun dan tumbuh ekonominya** secara mandiri dan berkelanjutan
- 9.** **Meningkatkan rasio elektrifikasi dan menjamin penyediaan listrik secara terus-menerus** dengan mengutamakan potensi EBT lokal
- 10.** **Menyediakan jaringan telekomunikasi yang andal**, yang memungkinkan masyarakat pedalaman terhubung dengan penduduk kawasan lainnya

8 Sayap Kemajuan

Agenda Khusus

28 Simpul Kesejahteraan

Kami juga menginisiasi “Agenda Khusus” yang berisi manfaat yang akan diterima oleh 28 kelompok masyarakat, karena kami meyakini kesejahteraan kelompok masyarakat ini berdampak besar pada kesejahteraan Indonesia. Kami menyebut agenda ini sebagai “**28 Simpul Kesejahteraan**” yaitu:

1. Petani
2. Nelayan
3. Peternak
4. Pekebun Sawit
5. UMKM
6. Pelaku Usaha Besar
7. Pekerja Kreatif
8. Santri
9. Atlet
10. Siswa dan Mahasiswa
11. Kelompok Disabilitas
12. Anak-anak Indonesia
13. Seniman & Budayawan
14. Lansia
15. Perempuan
16. Tenaga Kesehatan
17. Buruh
18. Pekerja Migran Indonesia
19. Gen Z dan Millenial
20. Warga Kota
21. Warga Desa
22. Guru dan Tenaga Pendidik
23. Aparat Sipil Negara (ASN)
24. Dosen dan Peneliti
25. Masyarakat Adat
26. Pers dan Media
27. Diaspora
28. Investor dan Pelaku Pasar Modal/Uang



SEGGALIS SEPTEMBER 1845 ...
ELIHAT BENDERA MERAH PUTIH-BI-
BAR KEMBALI DI HOTEL DRANYE (YA-
TEL). KEMARAHAN RAKYAT DAN PEMU-
JUA DI SURABAYA TIDAK TERTAHAN
DENGAN SERIPEK RAKYAT BERGERAK
NA MENJADI PANAS, JALAN TUNJU-
MENJADI LAUTAN MANUSIA YANG
TELORA

TERJADILAH ...
INSIDEN BENDERA, FAJAR, PEMERINTAH MELA-
TUSNYA API REVOLUSI, KARENA RAKYAT HA-
NYA MENGHENDAKI SUPPLY SANG DMI WARNA ME-
RAH-PUTIH BAJA YANG BERKIBAR DI ANGKASA
INDONESIA, SEDANG SITIBA WARNA HARUS TURUN...

KEMUDIAN ...
BERKIBARLAH SANG DMI WARNA HNGGA DETIK BEKA-
RANG DAN UNTUK SETERUSNYA SEMOGA LAMBANG KE-
MEGAHAN DAN KELUHNAN NEGERI DAN BANGSA INDONESIA



Petani tenang, Petani untung, Petani bisa menabung

- 1.** Petani mendapatkan **pupuk dengan harga murah, berkualitas dan mudah didapat**
- 2.** Memberikan **kepastian pembelian hasil panen dengan harga yang menguntungkan** bagi petani
- 3.** **Irigasi dibangun dan diperbaiki**, petani tidak sulit mencari air
- 4.** **Jalan-jalan desa diperbaiki** sehingga mengangkut hasil panen menjadi mudah
- 5.** **Meminimalkan impor pangan** agar hasil petani banyak yang beli
- 6.** **Kemudahan pemberian bantuan bibit/benih yang bermutu sesuai dengan kebutuhan petani**
- 7.** **Bantuan permodalan murah dan mudah bagi petani pada setiap tahapan produksi**
- 8.** **Semakin banyak bantuan alat dan mesin-alat pertanian dengan teknologi terkini termasuk alat pengering dan fasilitas gudang** dari pemerintah
- 9.** **Memastikan harga panen terjaga** agar menguntungkan petani
- 10.** **Petani dapat memanfaatkan lahan menganggur milik pemerintah dan BUMN**
- 11.** **Pemerintah mendorong Kemandirian Pangan**, produksi pertanian dalam negeri akan ditingkatkan, petani mendapat banyak perhatian



Nelayan senang, Nelayan untung, Nelayan bisa menabung

- 1.** Solar murah dan mudah didapat, ada bantuan dari pemerintah
- 2.** Pemberian bantuan alat tangkap ikan dan peralatan melaut dari pemerintah
- 3.** Mengurus izin melaut dipermudah
- 4.** Memastikan harga hasil tangkapan makin menguntungkan nelayan
- 5.** Memberikan kebijakan pungutan hasil tangkap yang adil bagi nelayan
- 6.** Permodalan mudah dan murah dibantu Pemerintah untuk nelayan dan pelaku usaha perikanan
- 7.** Perluasan pemberian perlindungan keselamatan kerja bagi Anak Buah Kapal dan nelayan
- 8.** Kapal ilegal pencuri ikan akan ditangkap dan disanksi berat
- 9.** Istri nelayan dibantu berbisnis (dagang, industri rumah tangga, dll), sehingga bisa bantu suami mengumpulkan uang, melalui pelatihan dan pendampingan
- 10.** Rumah nelayan akan dibantu untuk menjadi sehat, layak dan nyaman
- 11.** Pemerintah mendorong Kemandirian Pangan, produksi hasil laut dalam negeri akan ditingkatkan, nelayan mendapat banyak perhatian



Peternak untung, Peternak bisa menabung

- 1.** **Bibit ternak murah dan mudah didapat,** dibantu pemerintah
- 2.** **Pakan ternak murah dan mudah didapat,** dibantu pemerintah
- 3.** **Penyederhanaan izin** untuk memudahkan pelaku usaha peternakan
- 4.** Kepastian **pengawasan untuk membentuk pasar yang adil** bagi peternak
- 5.** **Obat-obatan ternak murah dan mudah didapat,** dibantu pemerintah
- 6.** **Sertifikasi peternakan mudah dan cepat didapat**
- 7.** **Harga hasil ternak makin menguntungkan peternak**
- 8.** **Modal dibantu pemerintah, mudah dan murah,** tidak perlu utang pinjol ilegal dan rentenir
- 9.** **Produksi dalam negeri diutamakan** dengan harga yang adil
- 10.** **Pemerintah mendorong Kemandirian Pangangan,** produksi ternak dalam negeri akan ditingkatkan, peternak mendapat banyak perhatian



Pekebun Sawit

Tenang, Pekebun Sawit Untung

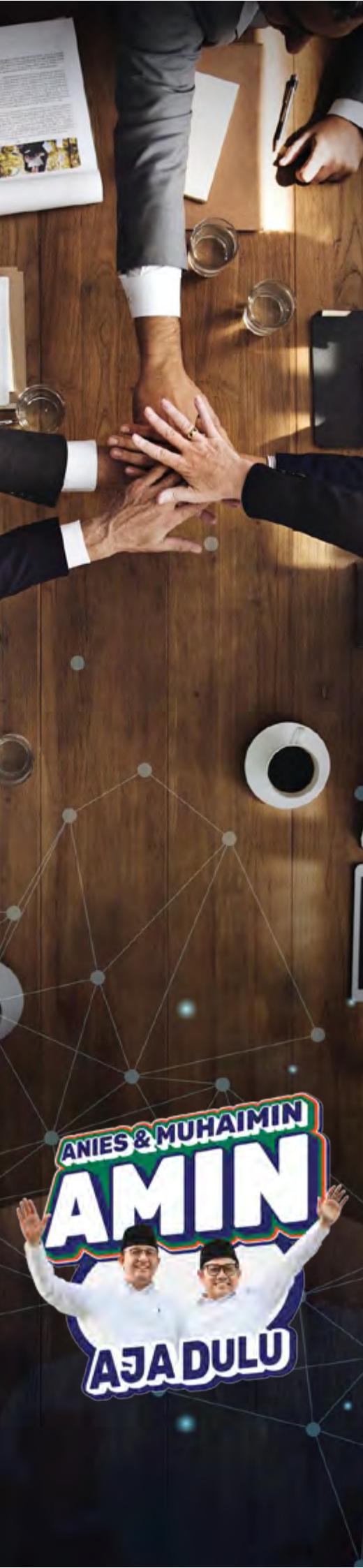
- 1.** **Pupuk mudah didapat dan murah,** dibantu pemerintah
- 2.** **Harga bibit sawit murah, mudah didapat, dijamin berkualitas**
- 3.** **Harga jual hasil panen menguntungkan pekebun**
- 4.** **Reforma agraria** untuk pekebun sawit
- 5.** **Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*** pekebun sawit mudah dan cepat didapat
- 6.** **Pengawasan ketat untuk membentuk pasar yang adil bagi pekebun sawit**
- 7.** **Peremajaan tanaman sawit dipercepat**, dibantu pemerintah
- 8.** **Modal dibantu Pemerintah, mudah dan murah**, tidak perlu utang pinjol dan rentenir
- 9.** **Akses pasar dunia dibuka luas bagi Pekebun Sawit Indonesia**, difasilitasi pemerintah



UMKM

Laris dan Pasarnya Makin Luas

- 1.** “Jemput bola” untuk mengurus izin
- 2.** Bantuan modal dari pemerintah, mudah dan aman
- 3.** Bantuan pelatihan produksi, pemasaran, dan teknologi diberikan secara gratis
- 4.** Kemitraan antara Korporasi dan UMKM dikembangkan
- 5.** BUMN, BUMD dan pemerintah akan mengutamakan belanja dari produk-produk UMKM
- 6.** Perlindungan bagi UMKM dari pelaku asing yang membunuh pesaing dengan harga murah
- 7.** Akses pasar dunia dibuka luas bagi UMKM Indonesia, difasilitasi Pemerintah
- 8.** Ongkos kirim produk UMKM ke luar Pulau Jawa murah
- 9.** Kemudahan melakukan **sertifikasi halal**



Pelaku Usaha Besar

Terkemuka dan Mengglobal

- 1.** **Regulasi dari tingkat pusat hingga daerah yang memberi kepastian berusaha, tidak berubah-ubah setiap saat**
- 2.** **Kepastian integrasi sistem perizinan dari tingkat pemerintah pusat sampai pemerintah daerah**
- 3.** **Fasilitasi kepada BUMN dan korporasi besar sehingga dapat berkompetisi pada skala global**
- 4.** **Pemerintah memfasilitasi negosiasi terkait perdagangan luar negeri yang berpihak pada pengusaha dalam negeri**
- 5.** **Berbagai insentif diberikan baik kepada investor yang sudah ada maupun investor baru, adil tidak pilih kasih**
- 6.** **Mengurus izin, mendapatkan kredit, membayar pajak, melakukan ekspor-impor dibuat terintegrasi dan mudah**
- 7.** **Infrastruktur dasar memadai mencakup listrik dengan harga yang kompetitif serta transportasi dan logistik yang pasti dan terintegrasi**
- 8.** ***E-government* diterapkan, mempermudah segala urusan dengan pemerintah, layanan berkualitas**
- 9.** **Birokrasi dari pusat hingga daerah aktif melayani investasi**



Pekerja Kreatif:

Makin Mudah Berkarya, Makin Diapresiasi, dan Makin Sejahtera

- 1.** Ruang berkreasi tersedia, mudah dan murah
- 2.** Penyediaan bantuan keuangan dan pelatihan bagi pelaku ekonomi kreatif
- 3.** Para pekerja kreatif, termasuk pekerja kreatif senior, akan mendapatkan penghargaan dan disejahterakan
- 4.** Pusat budaya dan sinema kelas dunia akan dibangun di berbagai kota di Indonesia, dengan sewa yang murah
- 5.** Budaya sinema, akan dikembangkan; sekolah film dibangun, gedung bioskop tumbuh di banyak kota
- 6.** Festival seni seperti Festival Film Indonesia diadakan dengan standar kelas dunia dan difasilitasi pemerintah
- 7.** Performing *right* dan royalti dijamin, termasuk royalti bagi konten kreator di media sosial
- 8.** Memperketat regulasi impor barang-barang seni dan kerajinan (termasuk jilbab, batik, baju) dari luar negeri melalui media sosial dan mempermudah ekspor bagi pekerja kreatif



Santri Tauladan, Pesantren Gemilang

- 1.** Kepastian atas kekhasan dan otonomi pesantren
- 2.** Ijazah Pesantren disetarakan dengan sekolah umum, bisa untuk melanjutkan sekolah atau pencarian kerja
- 3.** Fasilitas pesantren akan diperbaiki, dengan dukungan dari pemerintah
- 4.** Guru pesantren akan disejahterakan dengan bantuan dari pemerintah
- 5.** Beasiswa untuk para santri diperbanyak, bisa sekolah di dalam maupun luar negeri
- 6.** Pertukaran pelajar untuk para santri, dengan luar negeri akan digiatkan
- 7.** Pelatihan kewirausahaan akan didorong di pesantren-pesantren, para santri siap menjadi wirausahawan



Atlet Indonesia

Berprestasi & Mendunia

- 1.** **Menjamin kesejahteraan atlet, perangkat atlet, dan atlet purnabakti** melalui insentif atlet berprestasi dan skema jaminan pensiun yang layak.
- 2.** **Menghadirkan fasilitas olahraga yang berkualitas** mencakup pembangunan stadion, sekolah atlet, dan layanan kesehatan bagi para atlet di tiap daerah.
- 3.** **Menerapkan paradigma *sport science*** sebagai basis tata kelola kelembagaan olahraga yang lebih terstruktur, efisien, transparan dan akuntabel.
- 4.** **Memastikan manajemen asosiasi olahraga nasional yang profesional, transparan, akuntabel, dan independen.**
- 5.** **Memastikan keberpihakan dan dukungan bagi para atlet untuk produktif dan berprestasi**, termasuk beasiswa khusus bagi calon atlet yang berpotensi.
- 6.** **Menghapus diskriminasi dan menghadirkan kesetaraan** dalam ekosistem keolahragaan di tiap cabang olahraga.
- 7.** **Meningkatkan kualitas dan kuantitas perangkat pendukung keolahragaan** mulai dari pelatih, wasit, tim medis dan tim kebugaran secara meritokrasi.



Siswa dan Mahasiswa

Sekolah Berkualitas, Biaya Terjangkau, dan Tuntas

- 1.** **Tidak pusing lagi akibat PPDB Zonasi** karena daya tampung sekolah negeri diperbanyak dan sekolah swasta ditingkatkan kualitasnya.
- 2.** **Tenang melanjutkan sekolah dengan KIP Plus**, akan ada bantuan tambahan untuk jenjang pendidikan berikutnya, diberikan di kelas 6 SD, 3 SMP, dan 3 SMA
- 3.** **Semua bisa kuliah karena biaya kuliah murah dengan KIP Kuliah Plus** (perluasan penerima manfaat untuk kelompok menengah, yaitu UMR+10%)
- 4.** **Kesempatan beasiswa di dalam negeri dan luar negeri terbuka luas**, lewat LPDP, IISMA, dan program lain
- 5.** **Program beasiswa dalam negeri dan luar negeri termasuk persiapan bahasa asing**
- 6.** **Perundungan/bullying dilarang keras di sekolah**, ada sanksi berat bagi pelaku dan orang tuanya, ada hotline terintegrasi antara Kemendikbud, Fasilitas Kesehatan dan Kepolisian
- 7.** **Kesehatan mental siswa & mahasiswa dijaga**, melalui peer counselor, kehadiran konselor di sekolah dan perguruan tinggi





Kelompok Disabilitas

Dilindungi, Dihormati dan Difasilitasi

- 1.** **Seluruh layanan publik** (transportasi umum, taman, trotoar, dan lain-lain) **harus ramah disabilitas**
- 2.** **Juru Bahasa Isyarat (JBI)** hadir di berbagai kegiatan untuk umum
- 3.** **Sekolah inklusif diperbanyak**, Sekolah Luar Biasa (SLB) ditingkatkan kualitasnya
- 4.** **Kesempatan beasiswa khusus disabilitas semakin banyak**
- 5.** **Bantuan sosial untuk disabilitas diperbesar manfaat dan jumlah penerimanya**
- 6.** **Kuota khusus dalam lowongan kerja dan pengembangan wirausaha** untuk mewujudkan disabilitas berdaya dan berkarya
- 7.** **Penghargaan untuk kota, perusahaan, atau instansi yang peduli pada kelompok disabilitas**

Anak Indonesia

Sehat, Cerdas, Berprestasi & Bahagia



- 1.** **Taman dan tempat bermain bagi anak yang mudah diakses dan gratis diperbanyak**
- 2.** **Bantuan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk anak**
- 3.** **Pengendalian produk makanan yang membahayakan kesehatan anak**
- 4.** **Wajib Belajar 1+12 tahun dari PAUD hingga SMA**
- 5.** **Memastikan materi pembelajaran di sekolah disampaikan dengan cara yang mengasyikkan bagi anak**
- 6.** **Fasilitas dan kompetisi seni dan olahraga untuk anak diperbanyak agar mereka tumbuh sehat dengan bahagia**
- 7.** **Anak yatim piatu dan anak terlantar diperhatikan dengan memastikan kesejahteraannya**
- 8.** **Edukasi untuk orang tua dan calon orang tua tentang psikologi dan pendidikan anak**
- 9.** **Tempat penitipan anak yang berkualitas dan terjangkau**



Budaya Dikembangkan, **Budayawan** Disejahterakan

- 1.** **Dana Abadi Kebudayaan** jumlahnya makin besar, pemanfaatannya makin beragam
- 2.** **Beasiswa khusus untuk seniman dan budayawan diperluas** termasuk untuk belajar hingga S2/S3 di Luar Negeri, **pemerataan pendidikan seni dan budaya** serta **kesempatan belajar bersama maestro**
- 3.** **Seniman tangguh dan para tokoh budayawan dimuliakan** melalui program “Maestro Nasional”
- 4.** **Pusat-pusat budaya dibangun dan dikembangkan di banyak daerah di Indonesia**, baik untuk budaya tradisional maupun kontemporer, **dihadirkan dengan kolaborasi bersama komunitas**
- 5.** **Revitalisasi museum dan kawasan cagar budaya**
- 6.** **Ruang pertunjukan berjenjang dari daerah hingga nasional** untuk seniman dapat bertumbuh
- 7.** **Dukungan dari pemerintah, BUMN dan Swasta bagi kegiatan budaya dan pertunjukan kesenian**
- 8.** **Pemerintah menghubungkan swasta/BUMN dengan seniman, untuk menjamin kemitraan dan dukungan yang berkelanjutan**



Lansia Tenang, Lansia Bahagia

- 1.** **Bantuan sosial khusus lansia** dengan manfaat dan jumlah penerimanya diperbesar
- 2.** **Lansia mudah berobat** melalui jalur antrean khusus, armada ambulans tambahan, serta jemput bola pemeriksaan dan pengobatan
- 3.** **Lansia hidup dengan nyaman** dengan bantuan renovasi hunian layak bagi lansia
- 4.** Ruang publik dan aktivitas sosial yang ramah lansia diperbanyak, lembaga perawatan lansia ditingkatkan kualitasnya
- 5.** Pensiunan ASN, Purnawirawan TNI dan Polri (terutama Bintara dan Tamtama), mantan atlet nasional serta maestro seniman/budayawan dilindungi oleh jaminan sosial khusus



Perempuan

Aman dari Kekerasan, Makin Maju Berkarya

- 1.** **Kehamilan dan persalinan sehat diwujudkan**, dimulai dari edukasi kesehatan sejak usia remaja hingga pemberian nutrisi seimbang gratis dan pendampingan ibu hamil sampai 1.000 hari pertama kehidupan anak
- 2.** **Mendukung perempuan di setiap peran** dengan menghadirkan cuti ayah saat istri melahirkan dan mewajibkan pemberi kerja memberikan cuti hamil bagi dan melahirkan bagi istri
- 3.** **Tempat penitipan anak (day care)** berkualitas dan terjangkau, serta **ruang laktasi di setiap ruang publik**
- 4.** **Larangan diskriminasi terhadap perempuan dan dukungan khusus untuk perempuan yang menjadi kepala keluarga**
- 5.** **Aman dari kekerasan dengan layanan krisis terintegrasi di setiap daerah** (nomor layanan darurat 24 jam, Rumah Aman, visum, pengobatan dan layanan psikologis gratis, bantuan hukum gratis)
- 6.** **Hadirkkan dan tegakkan aturan pelaksana UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual** untuk melindungi para perempuan
- 7.** **Kesetaraan kesempatan bagi perempuan untuk berkarya di berbagai bidang**
- 8.** **Meningkatkan peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)** sebagai aktor penggerak di lingkungan masyarakat





Tenaga Kesehatan

Dihargai, Dihormati & Disejahterakan

- 1.** **Pemberian Status Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) menjadi Tenaga Kesehatan** sehingga mendapatkan haknya sebagai tenaga profesional
- 2.** **LPDP Profesi** untuk dokter spesialis, psikolog klinis, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya yang dibutuhkan
- 3.** **Prioritas beasiswa untuk calon tenaga kesehatan** dari keluarga miskin atau kawasan Pesisir, Kepulauan, dan Pedalaman
- 4.** **Meningkatkan peran bidan** untuk kesehatan ibu, bayi dan tumbuh kembang anak
- 5.** **Insentif untuk kader kesehatan** dalam upaya promotif dan preventif kesehatan
- 6.** **Peningkatan kesejahteraan** para tenaga medis dan tenaga kesehatan
- 7.** **Beban administrasi** berkurang bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan
- 8.** Berbagai kesempatan **peningkatan kompetensi dan pengayaan keilmuan gratis**



Buruh Sejahtera, Ekonomi Adil Untuk Semua

- 1.** **Sistem pengupahan yang adil** bagi buruh dengan mempertimbangkan biaya hidup yang layak
- 2.** **Bantuan pangan murah** untuk buruh
- 3.** **Lingkungan kerja yang aman, nyaman dan manusiawi**
- 4.** **Perlindungan sosial sepanjang hayat** (melalui BPJS Tenaga Kerja), termasuk **jaminan berserikat dan berpendapat**
- 5.** **Pelatihan gratis dan beasiswa diperbanyak** untuk peningkatan keterampilan buruh
- 6.** **Perlindungan bagi buruh Indonesia dari ancaman TKA** melalui penegakan ketentuan yang berkeadilan
- 7.** **Pelibatan buruh dalam berbagai penentuan kebijakan** yang mempengaruhi kehidupannya



Pekerja Migran Indonesia

Terlindungi & Sejahtera

- 1.** **Prioritas penempatan pada negara dengan perjanjian bilateral bidang ketenagakerjaan untuk memperkuat perlindungan pekerja migran**
- 2.** **Pembekalan yang lengkap untuk calon pekerja migran**
- 3.** **Memperbanyak jumlah pekerja migran terampil melalui pelatihan yang relevan, berkualitas dan terjangkau**
- 4.** **Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di luar negeri**
- 5.** **Pendampingan bagi pekerja migran yang berhadapan dengan hukum berkolaborasi dengan organisasi-organisasi pekerja migran**
- 6.** **Layanan pusat krisis 24 jam terintegrasi dengan KBRI setiap negara, Kemnaker Indonesia dan Disnaker asal daerah**
- 7.** **Perlindungan dan kemudahan bagi para pekerja migran saat mereka kembali ke tanah air dengan tersedianya pilihan pekerjaan atau tempat berkarya untuk menekuni potensinya**
- 8.** **Pelatihan dan pendampingan bagi para pekerja migran untuk dapat mengelola dana dengan baik dan memulai bisnis yang sesuai dengan bidang dan minatnya**





Gen Z dan Milenial: Generasi Emas Bukan Generasi Cemas

- 1.** Menghadirkan lebih dari 15 juta lapangan pekerjaan baru, termasuk pekerjaan hijau/*green jobs*
- 2.** Mengembangkan kewirausahaan di kalangan Gen Z dan milenial, melalui pelatihan, pendampingan dan dukungan permodalan
- 3.** Tersedia berbagai beasiswa di dalam dan di luar negeri
- 4.** Menyediakan minimal 2 juta hunian terjangkau di pusat kota, yang tersambung dengan transportasi umum
- 5.** Layanan pendidikan, kesehatan fisik, dan kesehatan mental terjangkau dan mudah diakses
- 6.** Terbukanya peluang magang seluas-luasnya di instansi pemerintah, BUMN dan swasta hingga ke luar negeri bagi Gen Z dan milenial
- 7.** Dukungan pemerintah bagi *sandwich generation* melalui penciptaan lapangan kerja dan jaminan hari tua bagi orang tua serta bantuan bagi pelajar



Warga Kota: Hidup Layak, Produktif dan Sejahtera

- 1.** **Harga rumah terjangkau** dengan lokasi dekat pusat kota
- 2.** **Fasilitas pendidikan dan kesehatan, transportasi umum, air bersih, pengolahan air limbah, pengolahan sampah, penanganan banjir, dan internet tersedia dengan akses mudah dan biaya terjangkau**
- 3.** **Taman, perpustakaan, pusat kesenian, dan fasilitas olahraga** yang berkualitas semakin banyak tersedia
- 4.** **Peluang wirausaha dan lapangan kerja dengan upah layak terbuka luas**
- 5.** **Masyarakat merasa aman dan terlindungi** dengan kehadiran aparat yang ramah melayani
- 6.** **Birokrasi melayani yang berorientasi digital dan bebas pungli**, termasuk perizinan dan perlindungan hak atas tanah
- 7.** **Polusi udara, pencemaran air dan pengelolaan sampah terkendali dengan baik**

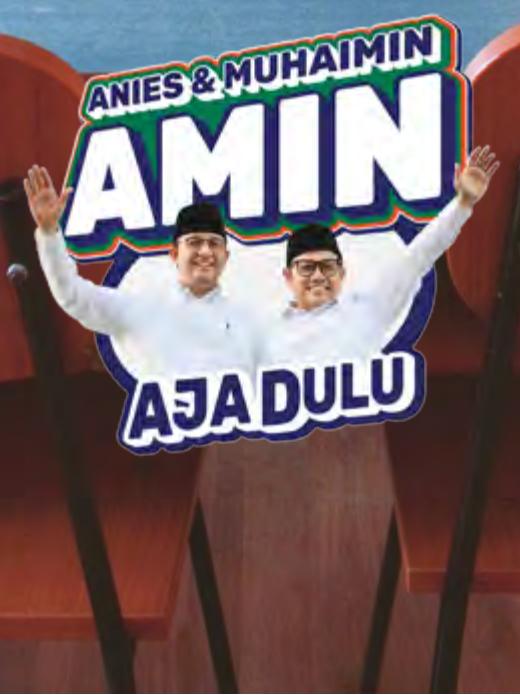


Warga Desa: Maju, Mandiri, dan Sejahtera

- 1.** **Dana desa akan meningkat dan pemanfaatannya sesuai dengan kebutuhan warga**
- 2.** **Memastikan para Kepala Desa dan Perangkat Desa, terhindar dari politisasi dan kriminalisasi, menuju pembangunan desa yang berorientasi kepada rakyat**
- 3.** **Pelibatan masyarakat desa dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan desa wisata tematik**
- 4.** **Fasilitas pendidikan dan kesehatan, akses jalan, air bersih, sanitasi, pengolahan sampah, irigasi, dan internet berkualitas, tersedia dan terjangkau**
- 5.** **Bangkitnya KUD, BUMDes, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), kelompok usaha, dan kelembagaan perekonomian desa lainnya untuk meningkatkan ekonomi desa**
- 6.** **Tata kelola dan pelayanan pemerintah desa semakin baik melalui pendampingan yang profesional serta pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa**
- 7.** **Menguatnya akses terhadap tanah dan sumber daya agraria melalui percepatan program redistribusi tanah, penyediaan skema pemanfaatan hutan dan tanah hak, serta pembangunan infrastruktur berkeadilan**



Guru Lega, Siswa Bahagia

- 1.** **Kenaikan status guru honorer** dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPJTM) menjadi PPPK, melalui proses yang adil dan transparan
 - 2.** **Peningkatan kesejahteraan guru** sekolah negeri
 - 3.** **Tunjangan kesejahteraan bagi para pengajar PAUD**
 - 4.** **Gaji guru diterima tepat waktu**, tidak terlambat lagi
 - 5.** **Insentif penambahan gaji guru swasta** melalui dana bantuan operasional sekolah
 - 6.** **Pengurangan beban administrasi** menjadi maksimal 10% dari jam kerja
 - 7.** **Mempertahankan kurikulum** yang berlaku dengan penyesuaian terukur
 - 8.** **Beasiswa guru dan anak guru** melalui Program Dana Abadi Guru
 - 9.** **Perbaikan jenjang karier untuk calon guru baru** dengan pilihan fokus: a) kepemimpinan sekolah; b) spesialis kurikulum dan ilmu pendidikan; atau c) pengajaran
 - 10.** **Pemerataan rasio guru** melalui perbaikan data, sistem rekrutmen dan manajemen talent pool
- 



ASN Magnet Talenta Terbaik

- 1.** **Peningkatan kesejahteraan ASN melalui sistem gaji berkeadilan** dan kepastian naik gaji minimal 15% dalam lima tahun
- 2.** **Perluasan manfaat jaminan sosial** dalam hal mengakses hak pada hunian, kesehatan fisik dan mental ASN
- 3.** **Lingkungan kerja yang supportif bagi ASN** melalui cuti haid, cuti hamil, cuti ayah, dan insentif daycare
- 4.** **Peningkatan kuota beasiswa studi lanjut** khusus ASN, di dalam dan luar negeri
- 5.** **Penyederhanaan dan pengurangan beban administratif ASN**
- 6.** **Seleksi dan promosi jabatan yang mengedepankan meritokrasi**
- 7.** **Insentif dan penghargaan bagi ASN berdedikasi dan berprestasi**
- 8.** **Perbaikan manajemen talenta ASN** dengan sistem informasi Satu Data Talenta ASN (talent pool) di seluruh instansi pemerintah K/L/D
- 9.** Perbaikan **pengelolaan dan sistem pensiun**, untuk memastikan para ASN sejahtera di hari tuanya



Dosen & Peneliti

Garda Terdepan Inovasi

- 1.** **Peningkatan dana R&D** dari 0,24% PDB menjadi 0,40 - 0,60% PDB di tahun 2029
- 2.** **Mengurangi beban administrasi para dosen dan peneliti**
- 3.** **Peningkatan penghargaan dan tunjangan bagi para dosen** dan peneliti, berbasis kinerja
- 4.** **Menerapkan dana riset multiyears**, untuk menjamin kepastian prospek riset yang memerlukan durasi panjang
- 5.** **Mengakhiri kerumitan ragam aplikasi** (Sister dan Sijali/ Sijago) melalui integrasi sistem digital
- 6.** **Proses administrasi dan perizinan penelitian diper mudah dan disederhanakan**
- 7.** **Beasiswa untuk dosen dan peneliti semakin diperbanyak**, baik di dalam dan di luar negeri
- 8.** **Penghargaan/Award dari pemerintah untuk para peneliti** berdedikasi dan berprestasi
- 9.** **Memfasilitasi para peneliti untuk melakukan kerjasama riset** dengan pihak lain di luar negeri
- 10.** **Mendorong pemanfaatan dan komersialisasi hasil riset nasional**, dengan melibatkan swasta dan BUMN
- 11.** **Memperbaiki sistem akuntabilitas terkait pendanaan riset, untuk memfasilitasi riset-riset strategis** tetapi mengandung risiko tinggi untuk gagal
- 12.** **Membangun ekosistem riset yang sehat dan berdaya saing**



Masyarakat Adat

Berdaulat dengan Nilai dan Martabat

- 1.** Memperkuat perlindungan masyarakat adat terhadap kebutuhan dasar mencakup air bersih, pangan, pendidikan dan fasilitas kesehatan
- 2.** Penyederhanaan proses administrasi pengakuan legal-formal dan pendaftaran tanah masyarakat adat
- 3.** Integrasi peta wilayah adat ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di level nasional hingga kabupaten/kota
- 4.** Keterlibatan secara bermakna masyarakat adat dalam pembangunan
- 5.** Menjalankan paradigma pembangunan berlandaskan kearifan lokal



Pers dan Media

Tulang Punggung Demokrasi

- 1.** Revisi berbagai aturan yang menghambat kebebasan pers dan sipil
- 2.** Memfasilitasi **tumbuhnya ekosistem industri pers nasional yang sehat dan kuat, serta mampu bersaing dengan media asing berbasis teknologi**, melalui dukungan kebijakan dan pendekatan fiskal
- 3.** Menindak tegas kasus intimidasi dan kekerasan terhadap insan pers
- 4.** Dukungan regulasi terkait kompensasi yang adil demi ekosistem pers yang sehat
- 5.** Menjamin akses pers terhadap data, informasi, dan dokumen publik milik pemerintah
- 6.** Kebebasan berserikat bagi seluruh insan pers
- 7.** Menempatkan pers sebagai mitra strategis pemerintah dan mengedukasi publik dan mengawal demokrasi
- 8.** Memelopori keterbukaan pemerintah terhadap kritik pers, dimulai dengan contoh dari pemerintahan tingkat tertinggi



Diaspora: Berdaya dan Bahagia di Dunia

- 1.** Membuat **talent pool diaspora** sebagai wadah talenta diaspora untuk posisi pekerjaan dengan kualitas dan kompensasi kompetitif di Indonesia
- 2.** Meningkatkan kolaborasi industrialisasi dan riset dengan diaspora sebagai bagian dari **transfer teknologi**
- 3.** Menginisiasi program **Bangga Brand Indonesia** yang memberikan insentif bagi diaspora pegiat UMKM dan industri kreatif
- 4.** Menciptakan kondisi aman bagi diaspora karena ada **perlindungan negara** bagi diaspora yang mengalami ketidakadilan hukum
- 5.** Menciptakan **situasi “pergi tenang, pulang nyaman”** dengan peningkatan perjanjian bebas visa dan kemudahan prosedur imigrasi dan bea cukai di Indonesia
- 6.** Memberi peran strategis bagi diaspora terlibat dalam **diplomasi untuk mempromosikan brand Indonesia**
- 7.** Memfasilitasi diaspora yang ingin **berkontribusi untuk negeri**

Investor & Pelaku Pasar Modal/Uang

Aman & Nyaman, Industri Keuangan Tumbuh & Berkembang

- 1.** **Perlindungan investor** melalui penegakan hukum di pasar modal dan sektor keuangan, termasuk sanksi berat kepada oknum dibalik pinjaman online ilegal, investasi bodong, asuransi ilegal, dan produk ilegal lainnya
- 2.** **Perluasan basis investor** dengan memfasilitasi **Gen-Z dan Milenial** untuk mendapatkan manfaat berinvestasi di pasar modal, termasuk melalui aktivitas edukasi, promosi, dan memfasilitasi hadirnya produk investasi yang sesuai
- 3.** **Pemberian insentif fiskal dan non-fiskal**, untuk menstimulus pertumbuhan sektor keuangan khususnya pasar modal, asuransi, sukuk, dan reksadana
- 4.** **Penyesuaian regulasi dalam bidang investasi** guna memberikan fleksibilitas bagi institusi Pemerintah dan institusi terafiliasi dengan Pemerintah untuk berinvestasi di bursa efek
- 5.** **Menjaga agar tingkat inflasi rendah dan stabil**, serta suku bunga perbankan yang kompetitif, untuk mengerakkan sektor riil dan menstimulus pertumbuhan pasar modal dan sektor keuangan
- 6.** **Penguatan literasi keuangan masyarakat**, melalui kolaborasi antara Pemerintah, Dunia Usaha, dan Dunia Pendidikan
- 7.** **Penyusunan regulasi sektor keuangan akan melibatkan para pelaku pasar**, untuk memastikan kebijakan yang relevan dan optimal
- 8.** **Pemberian sanksi tegas bagi pelanggar regulasi** di sektor keuangan dan pasar modal





PA DA TAN
KETIKA M
RU. BERKIN
MATO HOM
DA PEMU
LAGI. DI
SUASAN
NGAN /
BERG

SEBAGAI 19 SEPTEMBER 1945
ELIHAT BENDERA MERAH PUTIH-BI-
BAR KEMBALI DI HOTEL DRANYE (YA-
TEL). KEMARAHAN RAKYAT DAN PEMU-
JUDA DI SURABAYA TIDAK TERTAHAN
ENGAN SEREMPAK RAKYAT BERGERAK
NA MENJADI PANAS, JALAN TUNJU-
MENJADI LAUTAN MANUSIA YANG
ELORA

TERJADILAH . . .
INSIDEN BENDERA, FAJAR, PERMULIAAN MELE-
TUSNYA API REVOLUSI, KARENA RAKYAT HA-
NYA MENGHENDAKI SUPPLYA SANG DMI WARNA ME-
RAH-PUTIH BAJA YANG BERKIBAR DI ANSKASA
INDONESIA, SEDANG SHTIBA WARNA HARUS TURUN . . .
KEMUDIAN . . .
BERKIBARLAH SANG DMI WARNA HINGGA DETIK SEHA-
RIANG DAN UNTUK SETERUSNYA SEBAGAI LAMBANG KE-
MEGAHAN DAN KEJAYAAN NUSA DAN BANGSA INDONESIA.

Penutup

Indonesia Emas 2045 mungkin terlihat seperti fatamorgana. Sebagian menyebutnya utopia yang tak mungkin dicapai. Sebagian lagi menganggapnya sebagai medan perjuangan sekaligus ladang pahala. Ada begitu banyak jiwa-raga anak bangsa Indonesia yang siap menapaki jalan mendaki sebuah perjuangan baru. Mereka yang mewarisi tekad besar para pejuang kemerdekaan yang gagah berani melawan penjajahan, kemiskinan, dan kebodohan. Kekurangan di sana-sini tidak menyurutkan langkah. Dan kami yakin Anda adalah bagian dari tekad itu. Sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden RI, kami ajak Anda bergabung untuk menghimpun kekuatan. Berikhtiar bersama, kita akan meraih kejayaan bangsa dan negara Indonesia dengan semangat perubahan. Berbekal hikmah dari masa lalu dan optimisme memandang masa depan, kita bawa bangsa ini menerobos segala keterbatasan, tantangan, dan meraih peluang untuk kemajuan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih!



PADA TANGGAL 19 SEPTEMBER 1845 ...
KETIKA MELIHAT BENDERA MERAH PUTIH-BI-
RU, BERKIBAR KEMBALI DI HOTEL DRANVE (YA-
MATO HOTEL), KEMARAHAN RAKYAT DAN PEMU-
DA PEMUDA DI SURABAYA TIDAK TERTAHAN
LAGI, DENGAN SEREMPAK RAKYAT BERGERAK
SUASANA MENJADI PANAS, JALAN TUNJU-
NGAN MENJADI LAUTAN MANUSIA YANG
BERGELORA

Lampiran

TARGET AMIN

2025-2029

PERTUMBUHAN PDB (%)

BPS

ANGKA HISTORIS

5,17% (2018); 5,02% (2019); -2,07% (2020); 3,69% (2021); 5,31% (2022)

TARGET AMIN

↑ RATA-RATA 5,5%-6,5% PER-TAHUN (2025-2029)

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (%)

FEBRUARI, BPS

ANGKA HISTORIS

5,01% (2019); 4,94% (2020); 6,26% (2021); 5,83% (2022); 5,45% (2023)

TARGET AMIN

↓ 3,5%-4,0% (2029)

TINGKAT KEMISKINAN (%)

MARET, BPS

ANGKA HISTORIS

9,41% (2019); 9,78% (2020); 10,14% (2021); 9,54% (2022); 9,36% (2023)

TARGET AMIN

↓ 4,0%-5,0% (2029)

TINGKAT KEMISKINAN EKSTREM (%)

MARET, BPS

ANGKA HISTORIS

3,63% (2019); 2,70% (2020); 2,16% (2021); 2,04% (2022); 1,12% (2023)

TARGET AMIN

↓ ~0% (2026)

TINGKAT INFLASI (%)

BPS

ANGKA HISTORIS

2,72% (2019); 1,68% (2020); 1,87% (2021); 5,51% (2022)

TARGET AMIN

↓ RATA-RATA 2,0-3,0% PER-TAHUN (2025-2029)

PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA (JUTA)

BPS

ANGKA HISTORIS

13,68 JUTA (2010-2014); 13,52 JUTA (2015-2019)

TARGET AMIN

↑ LEBIH DARI 15 JUTA (2025-29)

RASIO PEKERJA SEKTOR INFORMAL TERHADAP TOTAL PEKERJA (%)

FEBRUARI, BPS

ANGKA HISTORIS

58,22% (2018); 57,27% (2019); 56,50% (2020); 59,54% (2021); 59,31% (2022); 60,12% (2023)

TARGET AMIN

↓ 50,0% (2029)

INDEKS GINI

BPS

ANGKA HISTORIS

0,382 (2019); 0,381 (2020); 0,384 (2021); 0,384 (2022); 0,388 (2023)

TARGET AMIN

↑ 0,36-0,37 (2029)

KONTRIBUSI INDUSTRI MANUFAKTUR TERHADAP PDB (%)

BPS

ANGKA HISTORIS

19,86% (2018); 19,70% (2019); 19,87% (2020); 19,24% (2021); 18,34% (2022)

TARGET AMIN

↑ 22,0%-23,0% (2029)

TAX RATIO (%)

KEMENKEU

ANGKA HISTORIS

14% (2012); 9,77% (2019); 8,33% (2020); 9,11% (2021); 10,4% (2022)

TARGET AMIN

↑ 13,0-16,0% (2029)

LOGISTIC PERFORMANCE INDEX (LPI)

WORLD BANK

ANGKA HISTORIS

2,76 (2010); 2,94 (2012); 2,98 (2016); 3,15 (2018); 3,0 (2023) RANKING 2023: 63 DARI 139 NEGARA

TARGET AMIN

3,5 (2029)
RANKING 2029: 35-40
DARI 139 NEGARA

PREVALENSI STUNTING (%)

BPS

ANGKA HISTORIS

37,2% (2013); 27,67% (2019); 24,4% (2021); 22,6% (2022)

TARGET AMIN

↓ 11,0%-12,5% (2029)

RASIO UTANG PEMERINTAH TERHADAP PDB (%)

KEMENKEU

ANGKA HISTORIS

30,6% (2019); 39,8% (2020); 41,2% (2021); 40,9% (2022); 38,1% (2023)

TARGET AMIN

↓ KURANG DARI 30,0% (2029)

INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

BPS, BAPPENAS, DAN BERBAGAI SUMBER

ANGKA HISTORIS

4,6 (1967-1999); 4,6 (2000-2004); 4,0 (2005-2009); 4,1 (2010-2004); 6,5 (2015-2019); 7,3 (2021-2022)

TARGET AMIN

↓ 5,0 (2029)

BACKLOG KEPEMILIKAN RUMAH (JUTA UNIT)

PUPR

ANGKA HISTORIS

12,16 JT (2018); 12,14 JT (2019); 12,74 JT (2020); 12,71 JT (2021); 10,5 JT (2022)

TARGET AMIN

↓ 8,0 JUTA (2029)

ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN (AKI)

WORLD BANK

ANGKA HISTORIS

194 (2017); 181 (2018); 158 (2019); 173 (2020); 183 (2022)

TARGET AMIN

↓ 115-125 (2029)

ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KELAHIRAN SELAMAT (AKB)

BPS

ANGKA HISTORIS

19,1 (2017); 18,6 (2018); 18,1 (2019); 17,6 (2020); 17,2 (2021); 16,9 (2022)

TARGET AMIN

↓ 10,0-12,0 (2029)

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

BPS

ANGKA HISTORIS

70,81 (2017); 71,39 (2018); 71,92 (2019); 71,94 (2020); 72,29 (2021); 72,91 (2022)

TARGET AMIN

↑ 74,0-75,0 (2029)

INDEKS KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

KEMENAG

ANGKA HISTORIS

72,27 (2017); 70,9 (2018); 73,83 (2019); 67,46 (2020); 72,39 (2021)

TARGET AMIN

↑ 75,0-78,0 (2029)

ANGKA PARTISIPASI KASAR PAUD (%)

BPS

ANGKA HISTORIS

33,84 (2017); 37,92 (2018); 36,93 (2019); 37,52 (2020); 35,59 (2021); 35,28 (2022)

TARGET AMIN

↑ 70-100% (2029)

ANGKA PARTISIPASI KASAR SD/SEDERAJAT (%)

BPS

ANGKA HISTORIS

108,50 (2017); 108,61(2018); 107,46 (2019); 106,32 (2020); 106,20 (2021); 106,27 (2022)

TARGET AMIN

↑ 108%-110% (2029)

ANGKA PARTISIPASI KASAR SMP/SEDERAJAT (%)

BPS

ANGKA HISTORIS

90,23 (2017); 91,52 (2018); 90,57(2019); 92,06 (2020); 92,80 (2021); 92,11(2022)

TARGET AMIN

↑ 93%-100% (2029)

ANGKA PARTISIPASI KASAR SMA/SEDERAJAT (%)

BPS

ANGKA HISTORIS

82,84 (2017); 80,68 (2018); 83,98 (2019); 84,53 (2020); 85,23 (2021); 85,49 (2022)

TARGET AMIN

↑ 87-100% (2029)

ANGKA PARTISIPASI KASAR PENDIDIKAN TINGGI (%)

BPS

ANGKA HISTORIS

25 (2017); 25,12 (2018); 25,13 (2019); 25,5 (2020); 26,09 (2021); 26,3 (2022)

TARGET AMIN

↑ 30%-40% (2029)

HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)

BPS

ANGKA HISTORIS

12,85 (2017); 12,91 (2018); 12,95 (2019); 12,98(2020); 13,08 (2021); 13,1 (2022)

TARGET AMIN

↑ 13,4-13,8 TAHUN (2029)

ANGGARAN R&D TERHADAP PDB (%)

R&D WORLD

ANGKA HISTORIS

0,27% (2019); 0,28% (2020); 0,24% (2021);

TARGET AMIN

↑ 0,4%-0,6% (2029)

INDEKS DEMOKRASI

THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT

ANGKA HISTORIS

7,03 (2015); 6,48 (2019); 6,30 (2020); 6,71 (2021); 6,71 (2022)

TARGET AMIN

↑ 7,30-7,50 (2029)

KONTRIBUSI EBT TERHADAP TOTAL ENERGI PEMBANGKIT LISTRIK (%)

KESDM

ANGKA HISTORIS

6,7% (2017); 8,6% (2018); 9,2% (2019); 11,3% (2020); 12,2% (2021); 14,1% (2022)

TARGET AMIN

↑ 22%-25% (2029)

INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

TRANSPARENCY INTERNATIONAL

ANGKA HISTORIS

32 (2012); 40 (2019); 37 (2020); 38 (2021); 34 (2022)

TARGET AMIN

↑ 44-46 (2029)

INDEKS KEBEASAN PERS

REPORTER WITHOUT BORDERS

ANGKA HISTORIS

63,23 (2019); 63,18 (2020); 62,6 (2021); 49,27 (2022); 54,83 (2023).

CATATAN: 40-55: DIFFICULT SITUATION

TARGET AMIN

↑ 70-72 (2029)
CATATAN: 70-85: SATISFACTORY

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

KLHK

ANGKA HISTORIS

65,1 (2018); 66,55 (2019); 70,27 (2020); 71,43 (2021); 72,4 (2022)

TARGET AMIN

↑ 73-75 (2029)



Indonesia Adil Makmur Untuk Semua

ANIES RASYID BASWEDAN & ABDUL MUHAIMIN ISKANDAR



T5



PRABOWO GIBRAN 2024

BERSAMA INDONESIA MAJU



Visi, Misi dan Program

Calon Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029

**H. Prabowo Subianto
Gibran Rakabuming Raka**





“Impian kami semua rakyat Indonesia mempunyai pekerjaan yang layak,

... semua anak-anak bangsa kita bisa sekolah dan menuntut ilmu terbaik dengan lancar,



... semua kebutuhan pokok terpenuhi dengan harga-harga yang terjangkau,

... semua petani bisa tersenyum karena harga jual produk mereka bagus,



**... semua buruh bisa
tidur tenang karena
menerima penghasilan
yang cukup,**



**... semua guru tekun
mencerdaskan
bangsa dan hidupnya
dijamin pemerintah,**

**... polisi, jaksa,
prajurit berjuang
dengan gaji yang
layak dan keadaan
hidup yang baik,**



**... semua pasien
mendapatkan
pelayanan yang terbaik
di rumah sakit.”**

PRABOWO GIBRAN 2024

BERSAMA INDONESIA MAJU



Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo
dan Para Pemimpin Negara Indonesia

Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi
Tantangan Strategis Bangsa Indonesia

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila Berdasarkan UUD 1945



Daftar Isi

Daftar Isi	...	5
Pengantar	...	6
Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila	...	9
Tantangan Strategis		
Bangsa Indonesia 2024-2029	...	11
Fondasi Indonesia Maju	...	15
Visi Presiden dan Wakil Presiden	...	19
8 Misi Presiden dan Wakil Presiden	...	21
8 Program Hasil Terbaik Cepat	...	23
17 Program Prioritas	...	29
Program Kerja Asta Cita 1	...	39
Program Kerja Asta Cita 2	...	41
Program Kerja Asta Cita 3	...	49
Program Kerja Asta Cita 4	...	53
Program Kerja Asta Cita 5	...	59
Program Kerja Asta Cita 6	...	61
Program Kerja Asta Cita 7	...	65
Program Kerja Asta Cita 8	...	71
Partai Politik Pengusung	...	75
Profil Calon Presiden	...	77
Calon Wakil Presiden	...	81

Pengantar Visi, Misi dan Program Calon Presiden dan Wakil Presiden

Saudara-saudara sekalian,

Proklamator bangsa Indonesia, Ir. Soekarno dan Dr. Mohammad Hatta, mencita-citakan suatu pemerintahan negara yang:

- 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia**
- 2. Memajukan kesejahteraan umum**
- 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan**
- 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.**

Cita-cita bernegara ini dituangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945.

Untuk mencapai cita-cita abadi bangsa ini diperlukan pembangunan ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan yang berkesinambungan. Pembangunan yang dibangun atas dasar fondasi yang telah dibuat oleh para pemimpin negara Indonesia mulai dari Presiden Sukarno, Presiden Suharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan Presiden Joko Widodo.

Dalam waktu yang tidak lama lagi, Indonesia akan mencapai usia 100 tahun proklamasi kemerdekaan di tahun 2045. Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang mencita-citakan tercapainya "Indonesia Emas" di atau sebelum tahun 2045.

Adapun intisari target RPJPN 2025-2045 adalah:

- 1. Pendapatan per kapita setara negara maju.**
- 2. Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang.**
- 3. Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat.**
- 4. Daya saing sumber daya manusia meningkat.**
- 5. Intensitas Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju *Net Zero Emissions* (nol emisi GRK)**

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6% hingga 7%. Pertumbuhan ini perlu didukung dengan penguatan peran pemerintah dalam roda ekonomi dan pembangunan bangsa sesuai falsafah Ekonomi Pancasila.

Ini semua harus kita lakukan di tengah ketidakpastian ekonomi global, ketidakpastian geopolitik, dan krisis perubahan iklim yang sekarang sudah ada di tengah-tengah kita.

Atas dasar-dasar pemikiran di atas, bersama ini kami sampaikan Visi, 8 Misi (Asta Cita), 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), 17 Program Prioritas serta Program Kerja ke hadapan rakyat Indonesia di Pemilihan Umum Presiden tahun 2024.

Kebersamaan adalah hal yang mutlak untuk keberhasilan program yang dipaparkan dalam dokumen ini. Untuk itu saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk kerja bersama, secara gotong royong.

Bersama terus maju, Bersama Indonesia Maju.

Prabowo Subianto
Calon Presiden 2024-2029

Gibran Rakabuming Raka
Calon Wakil Presiden 2024-2029

PRABOWO GIBRAN 2024

BERSAMA INDONESIA MAJU



Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo
dan Para Pemimpin Negara Indonesia

Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi
Tantangan Strategis Bangsa Indonesia

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila Berdasarkan UUD 1945

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila

Prabowo dan Gibran percaya pada prinsip Ekonomi Pancasila. Ini adalah paham ekonomi yang mengambil esensi terbaik dari kapitalisme dan sosialisme.

Paham ekonomi yang membuka lebar kesempatan berinovasi dengan kebebasan pasar, tetapi juga memperhatikan dan menjamin jaring pengaman sosial (*social safety net*) untuk masyarakat yang paling lemah.

Paham Ekonomi Pancasila memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

**1**

**Ekonomi yang religius dan
Wujudkan persatuan nasional**

2

**Ekonomi yang junjung tinggi
kemanusiaan**

3

**Ekonomi yang berpihak pada
kepentingan nasional**

4

**Ekonomi yang egaliter
(sederajat) dan kerakyatan**

5

Ekonomi yang berkeadilan sosial

PRABOWO GIBRAN 2024

BERSAMA INDONESIA MAJU



Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo dan Para Pemimpin Negara Indonesia

Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi Tantangan Strategis Bangsa Indonesia

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila Berdasarkan UUD 1945

Tantangan Strategis

Bangsa Indonesia 2024-2029

Presiden Joko Widodo menyampaikan pada 7 Oktober 2023: **“Tantangan ke depan itu bukan semakin ringan, tetapi semakin berat. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ada perang, perubahan iklim, krisis pangan.”**

Karena itu, dalam menyusun visi, misi, dan program periode 2024-2029, Prabowo dan Gibran mempertimbangkan tantangan strategis yang dihadapi oleh Bangsa dan Negara Indonesia.

Berikut adalah daftar tantangan strategis yang harus kita hadapi 5 tahun ke depan dan implikasinya:

Tantangan Strategis



Perubahan Iklim

Penjelasan dan Implikasi

September 2023 adalah September terpanas dalam catatan sejarah bumi.

Perubahan iklim bisa menyebabkan kekeringan dan hujan ekstrem yang menurunkan produksi pangan, meningkatkan kerawanan pangan, meningkatkan harga pangan, serta mengancam keselamatan jiwa.



Konflik Bersenjata di Ukraina dan Palestina

Konflik berkepanjangan di Ukraina dan di Palestina bisa meningkatkan harga pangan dan harga energi karena mengganggu kelancaran rantai pasok global.

Tantangan Strategis



Potensi Konflik Bersenjata di Laut Natuna Utara



Perlambatan Ekonomi Global



Disrupsi Kecerdasan Buatan

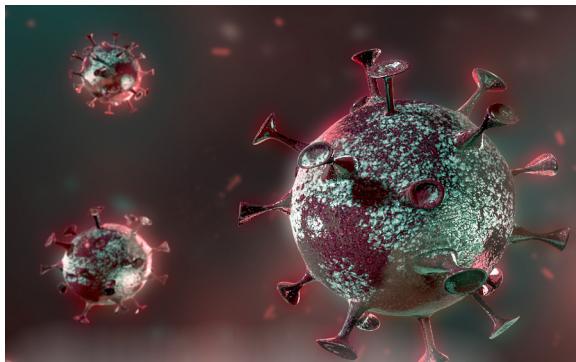
Penjelasan dan Implikasi

Rivalitas antara dua negara adikuasa atas Taiwan bisa mengancam kelancaran rantai pasok pangan, energi, dan perdagangan yang melewati Arus Lintas Laut Indonesia (mis. Selat Malaka) dan Laut Natuna Utara.

Pelemahan ekonomi dan kemungkinan resesi negara-negara maju menekan laju permintaan produk ekspor Indonesia dan meningkatkan suku bunga acuan, sehingga memberikan tekanan pada Rupiah.

Cepatnya kemajuan kecerdasan buatan dapat mengubah kebutuhan talenta di hampir semua industri dan memaksa peningkatan kemampuan tenaga kerja secara cepat.

Tantangan Strategis



Ancaman Pandemi Baru



**Terbatasnya Waktu
Bonus Demografi**



Meningkatnya Populasi

Penjelasan dan Implikasi

Meningkatnya suhu bumi membuka kemungkinan aktifnya kembali virus-virus dari masa lalu, yang dapat menyebabkan merebaknya pandemi baru untuk manusia, hewan, atau tumbuhan.

Indonesia diprediksi hanya punya 13 tahun untuk keluar dari perangkap negara menengah (*middle income trap*) atau berisiko jadi negara yang tua sebelum kaya.

Dibutuhkan tambahan 56% produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan 10 miliar populasi dunia di 2050, dengan kebutuhan luas lahan tambahan setara 2x dari luas negara India. Pemenuhan pangan untuk semua akan sangat menantang.

PRABOWO GIBRAN 2024

BERSAMA INDONESIA MAJU



Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo
dan Para Pemimpin Negara Indonesia

Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi
Tantangan Strategis Bangsa Indonesia

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila Berdasarkan UUD 1945

Fondasi Indonesia Maju

Prabowo dan Gibran membangun Visi Bersama Indonesia Maju dengan dasar fondasi ekonomi, sosial, dan politik yang kuat, yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo dan para pemimpin Negara Indonesia sebelumnya sebagai berikut:

Indikator Capaian	Capaian Era Presiden Joko Widodo
PDB Nominal	US\$ 1,4 triliun tertinggi sepanjang sejarah
GNI per Kapita	US\$ 4.580 tertinggi sepanjang sejarah
Jumlah Penduduk Miskin	9,57% terendah sepanjang sejarah
Neraca Dagang	Surplus US\$ 54,4 miliar tertinggi sepanjang sejarah
Cadangan Devisa	US\$ 137 miliar tertinggi sepanjang sejarah
Pertumbuhan Ekonomi	5,2% (Q2 2023) kedua tertinggi di G20
Tingkat Inflasi	3,3% salah satu terendah di G20
Utang Pemerintah	38% dari PDB salah satu terendah di G20
Nilai Tukar Rupiah	Menguat 2,1% (YTD Agustus 2023) keempat terbaik di G20

Seluruh capaian menggunakan angka 2022, kecuali disebutkan lain

Indikator Capaian	Capaian Era Presiden Joko Widodo
Nilai Ekspor Produk Turunan Nikel	US\$ 34,2 miliar (2023) tertinggi sepanjang sejarah, naik 11,7x dari angka 2014 di US\$ 2,9 miliar
Realisasi PMA di Luar Jawa	58% (2022) tertinggi sepanjang sejarah
Besar Belanja APBN	Rp. 3.325 triliun (2024) tertinggi sepanjang sejarah
Program Jaring Pengaman Sosial	<p>Kartu Indonesia Sehat (PBI JKN / KIS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 96,8 juta orang gratis BPJS • 236 juta layanan kesehatan gratis (2022) <p>Kartu Indonesia Pintar (KIS)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan 17,9 juta siswa + 2,2 juta siswa sekolah agama • Dukungan 908 ribu mahasiswa + 67,8 ribu mahasiswa agama <p>Kartu Sembako (BPNT)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 18,7 juta Keluarga Penerima Manfaat <p>Program Keluarga Harapan (PKH)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 10 juta Keluarga Penerima Manfaat <p>Telah terbangun:</p> <ul style="list-style-type: none"> • > 320.000 km jalan desa • > 2.000 km jalan tol • > 1,7 juta meter jembatan • Pelabuhan, bandara baru, dan infrastruktur kunci lainnya
Pembangunan Infrastruktur	

Atas capaian-capaian di atas, Pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo mendapat tingkat kepuasan 82% yang merupakan tingkat kepuasan tertinggi terhadap Pemerintah di negara G20. Ini adalah fondasi solid pembangunan ke depan.

Selain capaian Presiden Joko Widodo dan para Pemimpin Bangsa Indonesia, Prabowo dan Gibran juga membangun Visi Bersama Indonesia Maju berlandaskan potensi Bangsa dan Negara Indonesia sebagai berikut:

Indikator	Modal Potensi Indonesia Maju
Cadangan Sumber Daya Alam	<ul style="list-style-type: none"> Cadangan Nikel terbesar di dunia Cadangan Timah terbesar ke-2 dunia Cadangan Bauksit terbesar ke-6 dunia Cadangan Tembaga terbesar ke-7 dunia Potensi EBT 437 GW Potensi produksi perikanan tangkap lestari 12 juta ton per tahun Potensi produksi budidaya laut 50 juta ton per tahun
Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> Populasi nomor 4 dunia dengan usia median 29 tahun
Lokasi strategis	<ul style="list-style-type: none"> 45% perdagangan dunia melalui laut Indonesia Lajur laut utama yang menghubungkan Asia Timur, Asia Selatan, dan Oseania
Produksi Unggulan	<ul style="list-style-type: none"> Produsen kelapa sawit no-1 dunia Produsen perikanan tangkap no-2 dunia

PRABOWO GIBRAN 2024

BERSAMA INDONESIA MAJU



Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo
dan Para Pemimpin Negara Indonesia

Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi
Tantangan Strategis Bangsa Indonesia

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila Berdasarkan UUD 1945

Visi Presiden dan Wakil Presiden

Karena hanya dengan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan kita bisa berhasil sebagai negara dalam mencapai cita-cita Indonesia Emas, maka visi Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran adalah:

Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Bersama

Prabowo dan Gibran mengajak Putra Putri Terbaik Bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama

Indonesia Maju

Membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo

Menuju

Dengan tujuan yang jelas, yaitu

Indonesia Emas

Negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat

PRABOWO GIBRAN 2024

BERSAMA INDONESIA MAJU



Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo
dan Para Pemimpin Negara Indonesia

Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi
Tantangan Strategis Bangsa Indonesia

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila Berdasarkan UUD 1945

8 Misi Presiden dan Wakil Presiden

Visi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 8 Misi yang disebut Asta Cita sebagai berikut:

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| 1 | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). | 5 | Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. |
| 2 | Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. | 6 | Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. |
| 3 | Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur. | 7 | Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. |
| 4 | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. | 8 | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. |

PRABOWO GIBRAN 2024

BERSAMA INDONESIA MAJU



8 Program Hasil Terbaik Cepat

Dalam 5 tahun, fondasi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan dengan 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden:



1

Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil

Stunting (tengkes) adalah masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan massal oleh pemerintah untuk memastikan tercapainya kualitas SDM dan kualitas hidup yang baik.

Hal ini dilakukan dengan memberikan makan siang harian kepada siswa pra-sekolah, sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), dan pesantren. Bantuan gizi diberikan kepada ibu hamil dan balita di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga.

Program ini menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100% pada tahun 2029.



2

Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten

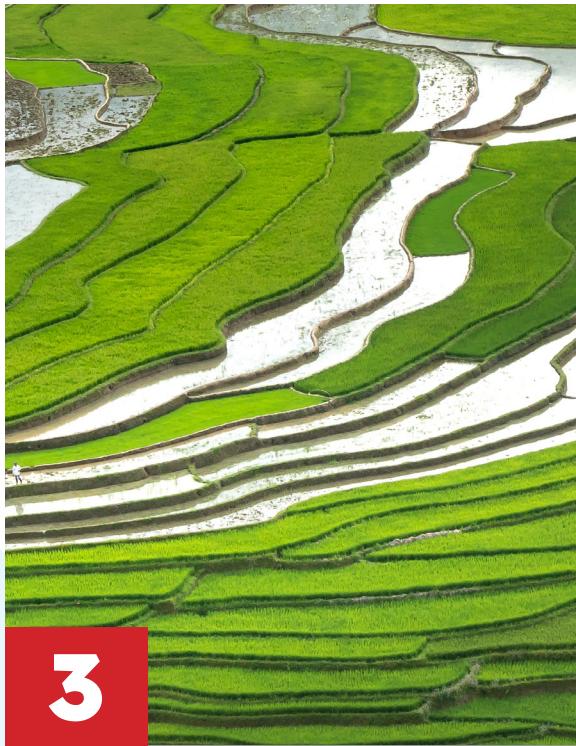
Kesehatan adalah salah satu bagian penting dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jumlah tenaga kesehatan (nakes) per populasi dan tempat tidur rumah sakit (RS) per populasi yang masih di bawah standar *World Health Organization* (WHO) harus segera dibenahi.

Akselerasi pemberantasan penyakit tuberkulosis (TBC) serta pembangunan RS menjadi prioritas utama untuk memastikan kualitas hidup manusia di Indonesia yang terjaga.

Pemeriksaan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesehatan dan pencegahan penyakit dengan pemeriksaan kesehatan tekanan darah, kadar gula darah, dan rontgen paru.

Target pemberantasan TBC adalah mengurangi kasus TBC sebanyak 50% pada tahun 2029.

Rumah sakit berkualitas akan didirikan diseluruh kabupaten dengan dukungan dan insentif yang menarik bagi dokter ahli yang akan bertugas di sana.



3

Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional

Guna mencapai swasembada pangan, dibutuhkan peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.

Kedua program tersebut dilakukan di level desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan nasional secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Ditargetkan minimal tambahan 4 juta ha luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.



4

Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan kualitas lulusan dan infrastruktur sekolah dan sarana pendukungnya, akan dibangun sekolah-sekolah unggulan di setiap kabupaten.

Sekolah unggulan yang akan dibangun mengikuti model sekolah unggulan tanpa asrama (*non-boarding school*) dan asrama, serta terintegrasi dari sekolah dasar hingga ke menengah atas.

Di samping itu, akan dilaksanakan perbaikan untuk sekolah-sekolah yang saat ini dalam kondisi kurang dan tidak layak.



5

Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut

Masih adanya kemiskinan absolut menunjukkan pembangunan ekonomi belum optimal dan belum merata. Negara wajib memberikan perlindungan sosial untuk warga miskin.

Program-program seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, MEKAR, dan Program Keluarga Harapan akan dilanjutkan dan menambahkan Kartu Anak Sehat. Selain itu program Kredit Usaha Tani -Perternakan, -Perikanan, -Perkebunan, -Produksi Pangan Rakyat, -Nelayan, -Pesisir, -Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para millenial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk menjadi garda terdepan dalam upaya peningkatan wirausaha dan sekaligus

memberantas kemiskinan serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Maka dari itu, negara harus melanjutkan program tersebut, dan ditingkatkan menjadi perlindungan sosial sepanjang hayat dengan target angka kemiskinan di bawah 6 persen serta mencapai status pembangunan manusia sangat tinggi (IPM di atas 80).



6

Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara

Pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila aparatur sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan (nakes), tentara nasional Indonesia (TNI), kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara

layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi (UMP) dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara.



7

Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan

Membangun dari desa menjadi strategi utama dalam pembangunan nasional. Untuk itu, program terkait pembangunan desa yang sudah dilaksanakan harus dilanjutkan dan ditingkatkan, termasuk membangun rumah murah dengan sanitasi baik untuk masyarakat yang membutuhkan, menyalurkan dana desa secara langsung, dan dana kelurahan. Ditargetkan untuk dapat membangun/merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun dengan total nasional mencapai 3 juta rumah mulai pada tahun kedua.



8

Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%

Sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai sebagian dari anggaran pemerintah. Anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP).

Untuk itu, negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) mencapai 23%.

PRABOWO GIBRAN 2024

BERSAMA INDONESIA MAJU



Fondasi Indonesia Maju oleh Presiden Joko Widodo
dan Para Pemimpin Negara Indonesia

Keberlanjutan Pembangunan Menghadapi
Tantangan Strategis Bangsa Indonesia

Prinsip-Prinsip Ekonomi Pancasila Berdasarkan UUD 1945

17 Program Prioritas

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan program prioritas sebagai berikut:



1

Mencapai swasembada pangan, energi, dan air

Pangan, energi, dan air merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara. Untuk itu, maka pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dilakukan secara cepat dan seksama.

Untuk program pangan di antaranya dengan pengembangan program food estate, terutama untuk padi, jagung, singkong, dan kedelai, dan tebu. Ditargetkan minimal 4 juta ha tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029.

Untuk energi, Indonesia berpeluang bisa menjadi raja energi hijau dunia melalui pengembangan produk biodiesel dan bio-avtur dari sawit, bio-ethanol dari tebu dan singkong, serta energi hijau lainnya dari angin, matahari, dan panas bumi. Pada tahun 2029 dengan sumber daya alam yang ada, sangat optimis program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 akan dapat tercapai.

Kekurangan air akan dijamin melalui manajemen air yang baik sehingga tersedia pada saat kemarau dan tidak menyebabkan bencana saat musim hujan.



2

Penyempurnaan sistem penerimaan negara

Pemerintah akan melaksanakan amanah konstitusi UUD 1945 pasal 23A secara taat atas sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara.

Diharapkan lembaga ini mampu memberikan kontribusi positif terhadap upaya mendapatkan sumber pembiayaan pembangunan berkelanjutan.



Reformasi politik, hukum, dan birokrasi

Politik adalah unsur penting dari **kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa** agar peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat diakomodasi dengan baik.

Untuk itu, diperlukan upaya meminimalisasi sistem politik uang serta meningkatkan kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik. Kesamaan hak setiap orang di mata hukum dan kepastian penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi dan demokrasi. Birokrasi yang efisien, profesional, dan berintegritas merupakan penunjang yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. **Digitalisasi dengan satu data terpadu dipastikan akan sangat membantu efisiensi dan kesatuan pengelolaan, serta pembinaan karir.**



4

Pencegahan dan pemberantasan korupsi

Korupsi menyebabkan kebocoran diberbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara dan mengakibatkan rusaknya perekonomian negara serta sendi sendi kehidupan sosial masyarakat.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi seimbang antara pencegahan dan penindakan perlu secara terstruktur dilakukan. Pemberantasan korupsi seimbang menitik beratkan pada menghilangkan keuntungan pada pelaku sekaligus mengupayakan pemulihan kerugian keuangan negara. Bila kebijakan ini dapat dilakukan dengan seksama, maka akan diperoleh manfaat ekonomi yang merata dan efisien, tambahan pembiayaan pemerintah serta percepatan kemajuan negara.



5

Pemberantasan kemiskinan

Kemiskinan merupakan cerminan dari kurangnya akses terhadap hasil pembangunan bagi masyarakat. Kemiskinan juga menjadi akar masalah dari tumbuhnya berbagai tindak kriminal dan permasalahan sosial, termasuk lahirnya generasi yang kurang berkualitas.

Untuk itu, pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah. Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrim menuju 0% perlu dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama pemerintahan. Sementara untuk kemiskinan relatif ditargetkan di bawah 6% di akhir 2029.



6

Pencegahan dan pemberantasan narkoba

Penggunaan narkoba adalah salah satu penyakit sosial masyarakat yang dapat menghancurkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.

Untuk itu, langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba harus dilakukan secara tepat sasaran dan menyeluruh dimulai dari kesadaran dalam keluarga.



Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat

Akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas akan sangat membantu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Program BPJS Kesehatan yang sedang diselenggarakan saat ini perlu ditingkatkan dan didukung dengan penyediaan obat bagi seluruh rakyat.

Untuk itu, peningkatan program BPJS Kesehatan dan ketersediaan obat menjadi perhatian utama pemerintah.



8

Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi

Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan, serta penguasaan sains dan teknologi. Inovasi akan lahir seiring dengan kemajuan di bidang tersebut. **Untuk itu, dana riset dan inovasi akan diupayakan mencapai 1.5-2.0% dari PDB dalam 5 tahun.**

Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam berinvestasi yang mendukung pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi merupakan suatu keharusan dalam memperkuat kemandirian bangsa.

Ini dilakukan diantaranya melalui pengembangan dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren, dana abadi kebudayaan, dan dana abadi lembaga swadaya masyarakat (LSM).



9

Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif

Kemakmuran dan kehidupan yang damai akan tercipta dalam keadaan negara yang kondusif dan aman. Negara yang kuat mampu melakukan dan menciptakan apapun yang dicita-citakan dan akan disegani dalam hubungan antarbangsa yang bermartabat



10

Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas

Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, negara memiliki peran utama dalam penguatan kesetaraan gender, dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.

Dengan mendorong kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak perempuan dan kaum penyandang disabilitas, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik, pemerintah dapat meniadakan diskriminasi gender dalam berkontribusi penuh terhadap pembangunan negara.

Pemerintah juga perlu lebih intensif dalam memberikan perlindungan yang cukup untuk tumbuh kembang anak-anak, termasuk kecukupan gizi.



11

Menjamin pelestarian lingkungan hidup

Dalam upaya pembangunan dan peningkatan ekonomi negara, kepastian keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas utama untuk menjamin generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman.

Oleh karena itu, percepatan pencapaian komitmen terhadap target pembangunan berkelanjutan termasuk percepatan pencapaian target Net Zero emisi GRK akan dilaksanakan.

Diantaranya juga dengan mengupayakan penurunan jejak karbon (*carbon footprint*) dan jejak air (*water footprint*) untuk berbagai produk. Selain itu, pemanfaatan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari perlu diupayakan sesegera mungkin.



12

Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani

Swasembada pangan ditentukan oleh tercapainya produksi dan produktivitas yang berkelanjutan dari komoditas pangan. Produksi dan produktivitas pangan akan sangat ditentukan oleh tersedianya dan akses yang menyeluruh petani pada pupuk, benih unggul, dan pestisida.

Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan termasuk akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani.



13

Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan

Tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus hadir memberikan perumahan yang terjangkau dan sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan target membangun atau merenovasi sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak 3 juta rumah mulai tahun kedua.



14

Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Penguatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan merupakan langkah-langkah penting dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi. **Penguatan program Kredit Usaha Tani -Perternakan, -Perikanan, -Perkebunan, -Produksi Pangan Rakyat, -Nelayan, -Pesisir, -Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para millenial akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk dapat menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru, terutama di kalangan anak muda.**

Pembangunan Indonesia harus lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).



15

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi

Upaya hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA akan meningkatkan nilai tambah, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya. Tidak saja secara ekonomi, tetapi juga efek pengganda sosial. Upaya hilirisasi dilakukan dengan memastikan terjadinya transfer teknologi, mengembangkan SDM lokal, dan, menjaga lingkungan.

Hilirisasi terbukti telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan di wilayah yang memiliki SDA dan mendorong pemerataan ekonomi serta industrialisasi di wilayah timur Indonesia.

Hilirisasi yang sudah dilaksanakan seperti hilirisasi produk nikel akan dilanjutkan dan akan ditambah dengan hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk agro, serta produk maritim. Pemanfaatan sektor maritim juga perlu diperkuat untuk dapat menunjang proses industrialisasi dan pengembangan ekonomi biru.



Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah

Menjaga kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerukunan yang tercipta akan membuat negara kuat, aman, dan harmonis



Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

Budaya adalah bagian integral dari identitas bangsa, dan pelestariannya membantu melindungi warisan budaya yang berharga. **Penyediaan dana abadi kebudayaan akan menjamin pelestarian budaya secara berkelanjutan.**

Program pelestarian budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga akan mengangkat citra Indonesia di tingkat internasional.

Peningkatan ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga dapat menciptakan lapangan kerja **baru** dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.

PRABOWO GIBRAN 2024

BERSAMA INDONESIA MAJU



**“Pancasila adalah pemersatu bangsa,
ideologi dan falsafah bangsa yang harus
kita jaga ke depan” Prabowo Subianto**

Program Kerja

Asta Cita 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

Di tengah era global yang sarat dengan berbagai tantangan, penguatan Pancasila sebagai fondasi bangsa Indonesia menjadi hal yang krusial.

Pancasila tidak sekadar mencerminkan jati diri bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman etika dalam menentukan setiap kebijakan dan langkah negara.

Prinsip demokrasi memastikan semua warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan memengaruhi arah perkembangan negara.

Pelengkap dari kedua prinsip tersebut adalah pemenuhan hak asasi manusia (HAM) yang menegaskan perlindungan dan penghargaan terhadap hak setiap individu.

Pancasila, demokrasi, dan HAM secara bersama-sama membentuk sinergi yang harmonis, menjamin Indonesia tetap di jalur yang tepat menuju ke masa depan yang lebih baik dan inklusif.

Kami, Prabowo dan Gibran memiliki komitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi utama negara dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM, dengan cara:



Memperkokoh Ideologi Pancasila

1. Menguatkan wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara.
2. Mengembangkan wawasan kebangsaan Indonesia sebagai masyarakat plural melalui praktik pembelajaran multikulturalisme
3. Mengembangkan aplikasi teknologi informasi yang mempererat kohesivitas sosial dan menjadikan Pancasila menjadi semakin relevan di kalangan kaum muda (*life style*).



Penguatan Demokrasi

4. Mengembalikan dan menjamin kebebasan pers yang bertanggung jawab dan berintegritas dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.
5. Menegakkan kembali kebebasan mimbar akademik sebagai sarana tidak hanya pengembangan budaya ilmiah, tetapi juga perwujudan proses demokrasi yang taat asas.
6. Menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat di muka umum.



Penegakan HAM (Hak Asasi Manusia)

7. Melindungi hak asasi manusia (HAM) seluruh warga negara dan menghapus praktik diskriminasi sesuai dengan tata aturan yang berlaku.
8. Memastikan setiap kebijakan bersifat inklusif, berperspektif gender, serta memprioritaskan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
9. Memprioritaskan pembuatan undang-undang yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak serta memperkuat penegakan hukum.
10. Memberikan jaminan pemenuhan hak dasar masyarakat bagi fakir miskin, anak terlantar, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
11. Memperkuat perlindungan tenaga kerja Indonesia, terutama di luar negeri.

Program Kerja

Asta Cita 2

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru

Negara yang kuat adalah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan negara yang baik yang dapat melindungi dan menjamin kedamaian di dalam wilayah negara kesatuan. Sementara itu Kemandirian bangsa mencerminkan kapabilitas sebuah bangsa untuk berdiri tanpa bergantung pada negara lain.

Khusus untuk kemandirian bangsa, Indonesia perlu fokus pada yang mencapai swasembada dalam berbagai sektor krusial yang mencakup sektor pangan sebagai pilar kehidupan bangsa; sektor energi sebagai pendorong inovasi dan kemajuan; sektor air sebagai fondasi kehidupan yang berkelanjutan; dan sektor ekonomi kreatif yang memperlihatkan keunikan dan kekayaan budaya.

Dengan sumber daya alam yang melimpah, ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan berkelanjutan tanpa merusak lingkungan dan ekonomi biru akan menekankan nilai penting dari kekayaan kelautan kita.

Dengan mengoptimalkan kesempatan di setiap sektor tersebut secara berkelanjutan, Indonesia mempertegas posisinya sebagai negara yang berdaulat.

Atas dasar hal tersebut, Kami, Prabowo dan Gibran berkomitmen untuk menghadirkan kemandirian dan kedaulatan negara dalam swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif dengan berlandaskan ekonomi hijau dan ekonomi biru, melalui berbagai program dan rencana, termasuk peta jalannya (*road map*).

Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara

1. Meningkatkan jumlah anggaran pertahanan secara bertahap untuk memenuhi kekuatan optimal dan melakukan modernisasi Alat Utama Sistem Senjata TNI.
2. Mempercepat peningkatan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata bagi TNI/Polri.

3. Memperkuat konsep dan praktik wawasan Nusantara bagi seluruh rakyat Indonesia dan memperkuat Komponen Cadangan.
4. Melakukan sinergi pendekatan sejarah, budaya, kearifan lokal, dan sosial ekonomi di daerah-daerah yang rawan konflik serta rentan isu separatisme.
5. Meningkatkan konektivitas dan keamanan teknologi informasi telekomunikasi dari ancaman siber dengan memperkuat kapabilitas badan pertahanan siber.
6. Melanjutkan program penguatan postur pertahanan dengan konsep optimum *essential force* dalam rangka meningkatkan efektivitas menjaga kedaulatan NKRI.
7. Mencegah aksi terorisme dan radikalisme dengan reformasi sektor keamanan, pemberian regulasi keamanan, reorientasi pendidikan aparatur penegak hukum, dan melakukan kampanye sosial-kultural secara menyeluruh.
8. Memperkuat sinergi antar instrumen pertahanan dan keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan aksi terorisme.
9. Memperkuat kehadiran TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar.
10. Meningkatkan profesionalisme pengadaan, kemampuan transfer teknologi, profesionalisme prajurit dengan mendayagunakan sebesar mungkin kapasitas industri strategis dalam negeri.
11. Memastikan frekuensi publik dimanfaatkan sebagai akses informasi yang objektif dan kredibel untuk meningkatkan kesatuan antar warga.
12. Mengembalikan wibawa politik luar negeri Indonesia sebagai negara yang besar dan berdaulat di mata masyarakat internasional.
13. Menjalankan strategi *smart diplomacy* dalam menjamin kebutuhan dan kesatuan negara Republik Indonesia.
14. Meningkatkan layanan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia di luar negeri.
15. Memperkuat strategi diplomasi maritim untuk meneguhkan kedaulatan dan meningkatkan keamanan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
16. Memperkuat dukungan diplomasi terhadap upaya kemerdekaan dan kedaulatan Palestina antara lain dengan memperjuangkan pembukaan KBRI di Palestina.

17. Melanjutkan peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral maupun multilateral sesuai amanat konstitusi.
18. Memantapkan supremasi dan kepemimpinan Indonesia di tingkat global di tengah dinamika geopolitik internasional melalui diplomasi yang berdasarkan atas dasar bebas-aktif.



Swasembada Pangan

19. Menjalankan agenda Reformasi Agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan., dan kelautan.
20. Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak dan tidak termanfaatkan menjadi lahan untuk aren, ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorghum, kelapa, dan bahan baku bioetanol lainnya dengan sistem tumpang sari untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional dan menciptakan jutaan lapangan kerja baru.
21. Menjamin ketersediaan pangan pokok yang berkelanjutan melalui BUMN *holding* pangan ID FOOD, menjamin harga pangan

yang menguntungkan petani, peternak, dan nelayan, sekaligus terjangkau bagi konsumen.

22. Menjamin ketersediaan dan akses pupuk bagi petani untuk meningkatkan produksi, produktivitas panen dan hasil pertanian, serta pendapatan dan kesejahteraan petani.
23. Mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian.
24. Memperpendek rantai distribusi hasil-hasil pertanian.
25. Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (*digital farming*), dan memperbaiki tata kelola rantai nilai hasil pertanian.
26. Memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mendorong pengembangan industri pupuk bio.
27. Menjadikan pengendalian hama terpadu (PHT) sebagai kebijakan utama dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT), serta mendorong pemanfaatan pestisida nabati dan bio.

28. Memperkuat tata kelola impor pangan pokok dan utama agar lebih efektif dan optimal sehingga tetap mampu menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya.
29. Memperkuat program program di BUMN, universitas, dan lembaga penelitian di bidang pemuliaan tanaman dan teknologi benih.
30. Merevitalisasi jutaan hektar lahan yang rusak menjadi lahan produktif bagi peningkatan produksi pangan untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional.
31. Merehabilitasi hutan rusak menjadi hutan alam, Hutan Tanaman Industri (HTI), dan hutan produksi dengan menerapkan skema PPPP (*Public Private People Partnership*) dimana manfaat terbesar akan dirasakan oleh masyarakat.
32. Memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi BAPANAS, BULOG, bersama BUMN *holding* pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya.
33. Mendirikan lembaga pembiayaan untuk usaha tani rakyat untuk memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, dan pengembangan usaha.
34. Memodernisasi model bisnis pertanian, tata niaga agribisnis, dan sistem pemasaran sektor pertanian melalui inovasi teknologi.
35. Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau *food estate* secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu.
36. Memastikan kedaulatan pangan berbasis protein hasil laut melalui program perikanan budidaya laut (*marine aquaculture*) dan perikanan budidaya pantai (*coastal aquaculture*) serta perikanan laut dalam (*deep sea fishing*).



Swasembada Air

37. Menjaga pengelolaan dan pengembangan sumber daya air tetap di tangan pemerintah dengan memperkuat kapabilitas BUMN dan BUMD dalam pengelolaannya.
38. Menghentikan semua rencana reklama yang tidak sesuai dengan tata aturan, merusak kualitas ekosistem, dan lingkungan hidup, serta kehidupan ekonomi, sosial, dan masyarakat.
39. Memberikan bantuan langsung untuk pencarian serta pengeboran sumber air.
40. Meningkatkan kualitas air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) minimal setara dengan produk air mineral.
41. Melaksanakan pipanisasi air bersih.
42. Melakukan pembersihan sungai-sungai.
43. Meningkatkan program resapan air dan membangun embung-embung air sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau.



Swasembada Energi

44. Mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (*super power*) dalam bidang energi baru dan terbarukan (*renewables*) dan energi berbasis bahan baku nabati (*bioenergy*).
45. Mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat Konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945.
46. Memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional.
47. Merevisi semua tata aturan yang menghambat untuk meningkatkan investasi baru di sektor energi baru dan terbarukan (EBT).
48. Mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh BUMN atau swasta.
49. MemperluaskonversiBBMkepada gas dan listrik untuk kendaraan bermotor. Meningkatkan dan menambah porsi energi baru dan terbarukan dalam bauran listrik PLN.

50. Melanjutkan dan mengevaluasi pengembangankawasanekonomi khusus yang terspesialisasi dengan mengedepankan ekonomi hijau dan/atau ekonomi biru.

Ekonomi Hijau

- 51. Mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan.
- 52. Melindungi keanekaragaman hayati floradanfauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa.
- 53. Menindak tegas praktik pertambangan yang merusak lingkungan dan mendorong upaya restorasi, rehabilitasi, dan pemulihan lingkungan terdegradasi untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan produktif.
- 54. Memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pemilik perusahaan yang terlibat dalam pembalakan liar, kebakaran hutan, dan pembunuhan hewan langka yang dilindungi.
- 55. Mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa didaur ulang.

56. Meningkatkan perlindungan satwa dan tumbuhan langka, endemik, dan terancam punah melalui penghentian perdagangan satwa liar dan tumbuhan langka, upaya konservasi dan perlindungan genetik, habitat, serta ekosistemnya.

- 57. Meningkatkan anggaran untuk memperkuat riset dan kompetensi peneliti di bidang pelestarian satwa/tumbuhan liar, langka, dan terancam punah.
- 58. Mencegah deforestasi melalui pemanfaatan areal kurang produktif/lahan terdegradasi dan meningkatkan peran serta multipihak dalam pengawasan potensi kebakaran dan perambahan hutan.
- 59. Menerapkan standar pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui sistem sertifikasi produk yang dihasilkan dari praktik pengelolaan sumber daya ramah lingkungan.
- 60. Akselerasi rencana dekarbonisasi untuk mencapai target *net zero emission*.
- 61. Mengembangkan ekosistem yang terus mengakselerasi pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam yang berkaitan dengan *carbon sink* dan *carbon offset* untuk mengakselerasi target *net zero emission* dan memanfaatkan kesempatan dari ekonomi hijau.

- 62. Melanjutkan program memensiunkan pembangkit listrik tenaga uap (*coal-fired power plant retirement*) dengan berdasarkan pada asas keadilan dan keberimbangan.
- 63. Melanjutkan program biodiesel dan bio-avtur dari kelapa sawit.
- 64. Mengembangkan bioetanol dari singkong dan tebu, sekaligus menuju kemandirian komoditas gula.
- 65. Mengembangkan sumber energi hijau alternatif, terutama energi air, angin, matahari, dan panas bumi.
- 68. Membangun armada perikanan untuk melayani laut dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan skema PPPP (*Public Private People Partnership*) sehingga nelayan bisa mendapatkan modal dan kapal yang lebih besar.
- 69. Membangun armada transportasi laut rakyat untuk melayani pulau-pulau terpencil dan terluar dengan harga terjangkau.
- 70. Pengembangan pelabuhan simpul *transhipment* sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik.
- 71. Memperkuat kelembagaan dan regulasi pengelolaan pelabuhan dan logistik.
- 72. Mendorong aktivitas inovasi dan penelitian untuk mendukung teknik budidaya perikanan darat, pengadaan benih, teknologi pakan, pengadaan benih ikan, dan teknik pengendalian penyakit.
- 73. Meningkatkan akses keuangan, terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor perikanan dan kemaritiman.
- 74. Menyederhanakan perizinan agar lebih berpihak kepada nelayan.
- 75. Mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga.



Ekonomi Biru

- 66. Meningkatkan nilai tambah setiap potensi sumber daya pesisir seperti perikanan tangkap, budidaya udang, budidaya garam, budidaya rumput laut, dan budidaya lobster untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat melalui proses industrialisasi yang berkelanjutan.
- 67. Meningkatkan produktivitas hasil perikanan dan kemaritiman melalui penyediaan infrastruktur pendukung, kelembagaan berbasis komunitas, peningkatan kompetensi dan kapabilitas, alat tangkap, dan sarana-prasarana lainnya.

76. Membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi maritim berbasis pulau-pulau kecil, pulau terluar, dan kawasan pesisir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan.
77. Mengembalikan kedaulatan Indonesia sebagai poros maritim dengan meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang bergerak dan menggeluti bidang tersebut. Memastikan sarana dan prasarana tersedia bagi nelayan dan pembudidaya perikanan untuk memperbaiki produktivitas dan menjamin kualitas produk yang dihasilkan.
78. Mempercepat penyelesaian perjanjian batas maritim Indonesia dengan 10 negara tetangga dan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan dan kesejahteraan rakyat dalam skema *good neighbour policy*.
79. Mensinergikan pembangunan jaringan transportasi (darat, laut, dan udara) dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu. Pembentukan kelembagaan integrator dari arus barang untuk mengkoordinasi layanan transportasi multimoda dan distribusi logistik.
80. Melakukan pembangunan infrastruktur yang tepat guna untuk menopang industri berbasis pendekatan partisipatif.



Program Kerja

Asta Cita 3

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

Keberlanjutan dan inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk penyediaan pekerjaan yang layak.

Salah satunya mendorong generasi muda perlu masuk dunia kewirausahaan, menghadirkan inovasi, dan memberikan kesempatan pekerjaan bagi banyak orang.

Inovasi juga diperlukan dalam pengembangan industri kreatif nasional. Dengan keunikan budaya dan kekayaan sumber daya lokal, industri kreatif berpotensi menjadi pendorong utama ekonomi dan sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang terencana, bukan hanya memperkuat jaringan dan mobilitas, tetapi juga menawarkan peluang pekerjaan, mendukung pertumbuhan sektor-sektor lain, dan memastikan kesempatan yang adil bagi setiap warga.

Melalui strategi terintegrasi ini, kita bergerak menuju sebuah masa depan yang lebih memberikan manfaat bagi semua elemen masyarakat.

Kami, Prabowo dan Gibran mempunyai komitmen untuk memastikan lapangan kerja yang berkualitas hadir untuk masyarakat luas, pengembangan kewirausahaan dan industri kreatif, serta melanjutkan pembangunan infrastruktur, dengan cara:



Mendorong Kewirausahaan untuk Menciptakan Lapangan Kerja yang Berkualitas

1. Mendorong perusahaan untuk menempatkan angkatan kerja berusia 18-24 tahun sebagai karyawan tetap melalui subsidi premi asuransi untuk pekerja selama 12 bulan.
2. Menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan mengutamakan tenaga kerja lokal untuk mengurangi tingkat pengangguran.

3. Memperketat masuknya tenaga kerja asing (TKA) melalui pembentukan Satgas Pengawasan TKA untuk melindungi tenaga kerja dalam negeri.
4. Memberikan bantuan dan insentif untuk membuka usaha melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan dengan membangun pusat kewirausahaan di tingkat kabupaten untuk memperkuat produk-produk UMKM.
5. Melindungi dan merevitalisasi pasar tradisional dan menjaga ekosistem pasar rakyat.
6. Mendorong digitalisasi UMKM sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio-ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat.
7. Mengembangkan sistem pembiayaan alternatif UMKM melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro (UMi).
8. Mendorong pertumbuhan usaha dengan menghapus birokrasi dan regulasi yang menghambat serta melakukan pendampingan bagi wirausaha pemula.



Mendorong Industri Kreatif

9. Meluncurkan Kartu Usaha Startup untuk pengembangan bisnis baru berbasis teknologi dan inovasi.
10. Menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru, termasuk pariwisata, ekonomi kreatif, ekonomi digital, usaha rintisan, industri syariah, dan maritim berbasis komunitas.
11. Memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat.
12. Merevitalisasi dan memperkuat peran Koperasi Unit Desa (KUD), pasar rakyat, dan penguatan kelembagaan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, peternakan, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif.
13. Menjadikan BUMN sebagai alat negara untuk benteng pertahanan ekonomi nasional, penyediaan layanan dasar dan strategis, meningkatkan daya saing nasional, sekaligus sebagai salah satu motor pemberdayaan sektor UMKM.
14. Mendorong Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah melalui penguatan lembaga keuangan syariah, memperluas ekosistem usaha syariah, pendidikan dan

- penelitian, serta optimalisasi pemanfaatan dana sosial (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) sesuai peruntukannya.
15. Membentuk Bank Wakaf sebagai pendorong ekonomi berbasiskan syariah dengan dasar uji akademik, kajian menyeluruh, dan uji kelayakan yang komprehensif dan valid serta penyiapan perundangan dan peraturan terkait Bank Wakaf.
 16. Mendorong pertumbuhan usaha rintisan berbasis inovasi digital yang membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Tujuannya untuk membangun industri berbasis digital yang berorientasi global, yang akan dicapai dengan memberikan insentif dan modal kepada para pelakunya, termasuk juga memberikan jaminan dan kepastian hukum atas inovasi-inovasi yang dihasilkan.
 17. Mendorong perbankan nasional untuk membuat produk-produk pembiayaan yang khusus bagi industri digital, industri kreatif, dan seni budaya.
 18. Menguatkan BUMN dan swasta nasional yang berbisnis maupun memiliki jasa di industri syariah dan pariwisata.
 19. Memberikan insentif bagi pengembangan destinasi wisata tematik yang memiliki pasar wisatawan global.
 20. Memperbaiki manajemen promosi pariwisata Indonesia.
 21. Menguatkan ekosistem industri halal dan memberikan insentif yang diperlukan.
 22. Menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Hak Cipta dan Hak Intelektual lainnya sehingga para artis, musisi, seniman, pekerja seni, penulis buku, dan peneliti lebih dihargai secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
 23. Mendukung terlaksananya UU Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017 demi kesejahteraan para pelaku industri kreatif di Indonesia.



Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur

24. Melanjutkan dan memperluas pembangunan jalur irigasi dan bendungan untuk air baku, pencegahan banjir, dan irigasi.
25. Membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah.
26. Membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah.

27. Mengembangkan pelabuhan simpul transhipment sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan balik.
28. Mengembangkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang, dan informasi.
29. Mensinergikan pembangunan jaringan transportasi (darat, laut, dan udara) dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu.



“Pertahanan sebuah negara di abad 21 ditentukan oleh sains dan teknologi. Bangsa Indonesia harus merebut sains dan teknologi” Prabowo Subianto

Program Kerja

Asta Cita 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas

Pembangunan bangsa yang berkualitas terletak pada kemajuan setiap warganya. Dengan menempatkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas utama, kita membangun dasar yang kuat untuk generasi mendatang.

Hal tersebut diwujudkan melalui komitmen terhadap pendidikan yang bermutu, inovasi dalam sains dan teknologi, serta peningkatan kesehatan publik.

Salah satu tujuannya adalah menghadirkan prestasi di bidang olahraga yang tidak hanya menjadi simbol kebanggaan, tetapi juga mencerminkan ketangguhan, spirit, dan dedikasi bangsa.

Di samping itu, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, generasi muda, serta penyandang disabilitas menegaskan tekad kita dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, di mana setiap orang diberi

peluang yang sama untuk berkembang dan meraih keunggulan. Setiap aspek ini bersatu, menciptakan gambaran dari visi bangsa yang berkembang, berkeadilan, dan berbudaya.

Kami, Prabowo & Gibran mempunyai komitmen untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dari sisi pendidikan dan kesehatan, serta inklusi terhadap perempuan, usia muda, dan penyandang disabilitas, melalui:

Penguatan Sistem Peningkatan Kualitas SDM

1. Meningkatkan kerja sama antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan pihak industri guna peningkatan pemanfaatan digital dan teknologi.
2. Memperluas cakupan alokasi dana abadi untuk program beasiswa dan peningkatan kapabilitas SDM di bidang pendidikan ke pesantren dan LSM.

3. Meluncurkan program Dana Abadi Pesantren sebagai implementasi UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
4. Membentuk lembaga pengelola Dana Abadi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mendukung kualitas demokrasi.
5. Memperbesar alokasi anggaran dan memperluas program pertukaran budaya di tingkat internasional dalam rangka semakin menguatkan jaringan, kolaborasi wawasan, kapasitas, dan keterampilan para pekerja seni.
6. Memperluas program pendidikan baik formal maupun non-formal dan pendampingan kepada para pekerja dan komunitas seni akan pentingnya kewirausahaan di bidang seni, budaya, dan kreatif untuk menghasilkan seniman yang berjiwa *entrepreneurship*.
7. Memperkuat manajemen dan peningkatan kualitas SDM para pengelola program kesejahteraan sosial.
8. Menguatkan peran, fungsi, kelembagaan, dan anggaran yang terkait dengan upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
9. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja yang bersertifikasi.
10. Melakukan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) dengan penerapan berbasis kompetensi kriya dan seni kreatif guna meningkatkan kualitas tenaga kerja agar produktif dan berdaya saing.

Memperkuat Sistem Kesehatan Nasional

11. Memperkuat Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan memperjuangkan seluruh penduduk memiliki jaminan kesehatan (*universal health coverage*).
12. Menambahkan Kartu Anak Sehat yang dimasukkan dalam program perlindungan sosial dan kesehatan sebagai penanggulangan *stunting*.
13. Mencegah terjadinya *stunting* pada anak Indonesia dengan Program Gizi Seimbang dan Gerakan EMAS (Emak-Emak dan Anak-Anak Minum Susu).
14. Memperkuat program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat untuk mencegah penyakit, baik penyakit menular (TBC, HIV, dll) dan penyakit tidak menular (jantung, stroke, dll).
15. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata melalui peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan.

16. Memperjuangkan kemandirian industri obat dan vaksin nasional secara bertahap. Meningkatkan industri obat tradisional untuk mewujudkan harga obat yang terjangkau dan berbiaya murah serta vaksin yang halal untuk masyarakat melalui kekuatan lokal.
17. Menurunkan dan bahkan menghapuskan bea masuk sejumlah alat kesehatan yang masih belum mampu diproduksi di dalam negeri melalui perubahan kategori dari barang mewah.
18. Memastikan ketersediaan obat dan penggunaan obat rasional (POR) di fasilitas pelayanan kesehatan, baik di rumah sakit maupun di Puskesmas.
19. Memperbaiki tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk mencegah defisit dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan memprioritaskan upaya promotif dan preventif, dan perumusan kebijakan BPJS yang lebih pro-rakyat, pro-tenaga kesehatan, pro-fasilitas kesehatan, dan pro-pengadaan farmasi.
20. Memperkuat program pemberdayaan masyarakat (gotong royong) untuk hidup sehat seperti revitalisasi Posyandu (pos pelayanan terpadu), revitalisasi Posbindu (pos pembinaan terpadu), UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), Poskesdes (pos kesehatan desa), dan Poskestren (pos kesehatan pesantren).
21. Memperbaiki kualitas gizi, air bersih, dan sanitasi masyarakat dalam mengatasi ancaman *stunting* (gizi buruk).
22. Memperkuat kelembagaan dan meningkatkan anggaran Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKPK) untuk meningkatkan ketahanan keluarga Indonesia dan mencapai bonus demografi.
23. Memperbaiki program kependudukan termasuk hak dan kesehatan reproduksi demi peningkatan kualitas dan produktivitas penduduk.
24. Memperbaiki program kesehatan jiwa yang lebih responsif menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.



Memperkuat Pendidikan, Sains, dan Teknologi

25. Melanjutkan program Kartu Indonesia Pintar dan memperluas cakupan program hingga ke pesantren dan perguruan tinggi.
26. Penguatan sistem Pendidikan Nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing global.

27. Membenahi kurikulum Perguruan Tinggi, Pendidikan Vokasi dan Politeknik berbasis riset, inovatif, aplikatif, dan inkubasi yang terhubung dengan industri.
28. Meningkatkan dana riset dan inovasi sehingga dapat mencapai 1.5-2.0% dari PDB dalam 5 tahun.
29. Menyediakan beasiswa bagi putra-putri petani, nelayan, guru, dan buruh, untuk melanjutkan jenjang pendidikan S1 hingga S3.
30. Membangun perpustakaan dan taman-taman bacaan untuk mendorong gerakan literasi masyarakat.
31. Mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital pada berbagai tingkat pendidikan untuk mendukung digitalisasi ekonomi.
32. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sekolah-sekolah kejuruan dalam segala bidang keahlian teknis, melakukan revitalisasi balai-balai latihan kerja.
33. Memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, madrasah, dan yayasan.
34. Meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren dan memberikan beasiswa bagi para santri untuk melanjutkan pendidikan baik di tingkat nasional maupun internasional.
35. Menggandeng perusahaan swasta bermitra dengan BUMN untuk membuka program beasiswa dan magang bagi lulusan di perguruan tinggi dan sekolah kejuruan.
36. Meningkatkan kesejahteraan dosen, peneliti, dan penyuluh, serta memberikan akses yang mudah bagi generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan dengan meningkatkan ketersediaan daya tampung perguruan tinggi, standarisasi kualitas, dan mempermudah akses masuk perguruan tinggi.
37. Membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan karakter bangsa dengan melaksanakan program pengembangan budi pekerti sejak dini.
38. Mendorong perguruan tinggi dalam pengembangan riset dan ilmu pengetahuan yang mendukung strategi pembangunan dan berkolaborasi dengan dunia usaha.
39. Membangun sistem pendidikan nasional yang mengedepankan pembentukan delapan karakter utama bangsa seperti religius, bermoral, sehat, cerdas dan kreatif, kerja keras, disiplin dan tertib, mandiri dan bermanfaat.
40. Mengembangkan budaya bahari dalam sistem pendidikan nasional.

41. Mengangkat guru honorer secepatnya secara berkala dan tenaga honorer K2 menjadi ASN.
42. Meningkatkan kualitas sistem pendidikan di seluruh Indonesia yang salah satunya menitikberatkan luaran individu-individu yang kreatif dan inovatif serta berkualifikasi global
43. Membangun lebih banyak ruang pameran dan ruang pertunjukan seni di seluruh Indonesia sebagai sarana pengembangan diri seniman-seniwati Indonesia.
44. Meningkatkan kualitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang berorientasi kepada industri kreatif dan seni budaya.
47. Mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum.
48. Memperluas program pendidikan formal maupun non-formal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan.
49. Meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat.
50. Mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
51. Membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas.
52. Memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk stereotype, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat.



Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

45. Mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana (juklak), dan petunjuk teknis (juknis) dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
46. Mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarjinalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas.



Meningkatkan Prestasi Olahraga

53. Mendorong gerakan untuk menggiatkan olahraga masyarakat dan menghidupkan kompetisi olahraga antardesa, antar sekolah, dan antarinstansi untuk meningkatkan kesehatan, kekeluargaan, dan produktivitas masyarakat.
54. Memberikan insentif dan kemudahan perizinan bagi kompetisi olahraga dan kesenian.
55. Membangun ribuan lapangan sepak bola dan infrastruktur olahraga yang dikelola dengan skema PPPP (*Public Private People Partnership*) sehingga lebih besar manfaatnya bagi komunitas olahraga lokal.
56. Memberikan keringanan pajak bagi klub-klub olahraga.
57. Memberikan jaminan hari tua bagi atlet yang berprestasi di tingkat dunia.
58. Mewajibkan sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri untuk memberikan beasiswa kepada atlet, minimal 5 persen dari total daya tampung.
59. Meningkatkan dukungan dalam bentuk infrastruktur dan finansial di dunia olahraga demi peningkatan prestasi kontingen Indonesia di ajang bergengsi seperti Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia.
60. Menyusun program *scouting* terstruktur dan berjenjang yang dilakukan sejak level sekolah dasar.



Program Kerja

Asta Cita 5

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Sebuah negara yang maju harus mampu memaksimalkan potensi sumber daya alamnya untuk kemajuan perekonomian nasional dan rakyat.

Melalui hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia dapat mengonversi komoditas dasar menjadi produk berdaya saing tinggi, yang juga dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan yang berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Dengan demikian, tidak hanya menjadi negara penghasil bahan mentah, Indonesia dapat menjadi produsen dan manufaktur atas produk yang berkualitas dan dapat bersaing di kancah internasional.

Misi ini dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif, dan juga menegaskan kedaulatan ekonomi Indonesia, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan menjamin pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Kami, Prabowo dan Gibran berkomitmen untuk melanjutkan dan mengembangkan program industrialisasi dan hilirisasi melalui berbagai program dan rencana:

Mengembangkan Hilirisasi untuk Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru

1. Melakukan pendalaman hilirisasi dan industrialisasi dalam pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.
2. Membangun infrastruktur secara berkeadilan, dengan mengutamakan akses terhadap kawasan industri, lahan produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan, dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.
3. Pembangunan kembali industri rakyat, dasar, dan strategis nasional yang mampu memproduksi barang-barang modal untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan nilai tambah komoditas dalam negeri.

4. Meningkatkan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk industri-industri komoditas yang mendorong hilirisasi.
5. Melanjutkan program industrialisasi dan hilirisasi di berbagai sektor melalui pembangunan pabrik, *smelter*, dll.
6. Mengembangkan program-program pembiayaan inovatif (*innovative financing*) untuk menarik investasi ke dalam negeri sebagai bagian dari program industrialisasi dan hilirisasi.



Melanjutkan Infrastruktur Penunjang Hilirisasi dan Industrialisasi

7. Mengembangkan infrastruktur dan jaringan jalan pada koridor utama dan koridor penghubung serta mendukung akses ke kawasan ekonomi dan simpul transportasi.
8. Mengembangkan konektivitas kereta api pada koridor logistik untuk angkutan barang.
9. Mendorong standarisasi infrastruktur dan fasilitas di seluruh pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama.
10. Membangun pelabuhan gerbang ekspor-impor serta pusat alih muatan (*transhipment hub*) internasional, terutama pada pelabuhan-pelabuhan dengan pangsa angkutan ekspor-impor yang signifikan.

Program Kerja

Asta Cita 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan

Kemajuan suatu bangsa, salah satunya dipengaruhi oleh keseimbangan pengembangan yang konkret di setiap wilayah, yang dimulai dari komunitas desa.

Dengan mengedepankan pembangunan dari desa dan dari bawah, kita menghargai peran esensial komunitas desa sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Membangun dari desa tidak hanya dalam bentuk infrastruktur fisik, tetapi juga dalam pemberdayaan komunitas lokal melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan aksesibilitas ke berbagai sumber daya.

Melalui strategi yang berfokus pada pendekatan dari desa dan dari bawah kita berupaya agar seluruh masyarakat mendapatkan dampak positif dari pembangunan menyeluruh, penurunan disparitas ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Hal ini akan mencerminkan dedikasi bangsa dalam memastikan sebuah masa depan yang lebih baik dan setara bagi setiap anggota masyarakat.

Karena itu Prabowo dan Gibran berkomitmen untuk melakukan pemerataan ekonomi dan memberantas kemiskinan dengan membangun dari desa dan daerah, dengan cara:

Membangun Desa dan Membangun dari Desa

1. Melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH), dana desa, subsidi pupuk, MEKAR, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa.
2. Memastikan agar hasil kekayaan Indonesia bisa digunakan kembali untuk membangun Indonesia.
3. Memperbaiki sistem tata kelola dan pemanfaatan dana desa secara transparan, profesional, dan akuntabel untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat di desa.
4. Menambah cakupan transfer dana daerah ke kelurahan dengan penambahan program Dana Kelurahan.



Pemerataan Ekonomi

5. MKebijakan subsidi yang efektif dalam mendorong peningkatan produksi, daya saing, dan yang menjadikan harga terjangkau dan terkendali.
6. Melanjutkan program subsidi energi (subsidi BBM, LPG, listrik) yang tepat guna untuk masyarakat yang membutuhkan.
7. Meningkatkan daya beli masyarakat dengan mengendalikan tarif listrik dan harga BBM, serta mengendalikan pengenaan pajak.
8. Mempercepat penyediaan perumahan bagi rakyat Indonesia yang belum memiliki tempat tinggal.
9. Meningkatkan daya beli buruh dan menyediakan kebutuhan dasar untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.
10. Menyelenggarakan politik pembangunan yang memprioritaskan partisipasi rakyat banyak melalui penyusunan anggaran pro-rakyat, kebijakan ekonomi pro-penciptaan lapangan kerja, dan kebijakan fiskal yang pro-daya beli masyarakat.
11. Memperkuat dan memperluas program pembiayaan UMKM melalui holding pembiayaan ultra mikro seperti program PNM Mekaar.
12. Melanjutkan penataan desentralisasi dan otonomi daerah menjadi instrumen kebijakan yang penting untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah daerah.
13. Melanjutkan penataan desentralisasi administrasi dan keuangan daerah.
14. Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru secara berkelanjutan.



Memberantas Kemiskinan

15. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui penguatan sinergi program kesejahteraan sosial yang saat ini masih tersebar di sejumlah kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan inisiatif dunia usaha dengan penggunaan Basis Data Terpadu (BDT).
16. Pemberlakuan Nomor Identitas Tunggal sebagaimana amanat UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
17. Meningkatkan kuantitas dan kualitas program bantuan sosial seperti program pangan, sandang, papan, pendidikan, dan pelayanan dasar bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
18. Mendorong kemandirian bagi masyarakat miskin dan kurang mampu agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya melalui program bantuan, pemberdayaan, dan kemitraan.
19. Menjamin akses akan air bersih, terutama bagi kelompok masyarakat miskin, baik di perkotaan maupun di pedesaan, pulau terluar, dan pulau terpencil.
20. Membina dan meningkatkan kualitas penyediaan layanan panti-panti sosial, baik milik pemerintah maupun milik masyarakat, serta mengembangkan program asistensi sosial lanjut usia (ASLUT).
21. Menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja dan rakyat tidak mampu.



PRABOWO GIBRAN 2024

BERSAMA INDONESIA MAJU



**“Mau tidak mau kalau Indonesia mau
merdeka dan makmur, menjadi negara maju,
kita harus punya TNI yang sangat kuat”**
Prabowo Subianto

Program Kerja

Asta Cita 7

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba

Aspek yang krusial dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab adalah reformasi dalam bidang politik, hukum, dan birokrasi.

Reformasi ini bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindakan yang merugikan masyarakat, seperti korupsi dan pemakaian narkoba.

Tindakan pencegahan dan penanggulangan terhadap korupsi dan narkoba harus dilaksanakan dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Hal ini tidak hanya mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjunjung nilai integritas dan keadilan, tetapi juga untuk melindungi generasi penerus dari ancaman yang bisa menghambat potensinya.

Sebagai respons terhadap dinamika dan evolusi suatu bangsa, struktur pemerintahan harus senantiasa dinamis dan berinovasi untuk tetap sesuai dengan aspirasi rakyat. Langkah-langkah ini diharapkan bisa

menjamin kondisi yang mendukung perkembangan serta kemajuan bangsa dalam berbagai bidang.

Kami, Prabowo dan Gibran mempunyai komitmen untuk mereformasi sistem politik, hukum, serta birokrasi guna mencegah dan memberantas korupsi dan penggunaan narkoba, dengan cara:

Reformasi Politik

1. Mengatur sistem pendanaan dan pembiayaan politik yang menjamin independensi, transparansi, mencegah korupsi, dan menjaga keberlangsungan demokrasi.
2. Membangun *Single Identity Number* (SIN) dan Sistem Informasi Administrasi dan Data Base Kependudukan untuk mencegah identitas ganda, mencegah penyalahgunaannya, dan memudahkan pelacakan aset, pajak, maupun persoalan NIK Ganda pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di dalam Pemilu.

3. Menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk memperbaiki manajemen pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.
4. Menjamin hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada, terutama dengan memperbaiki data pemilih menggunakan sistem yang terintegrasi dengan sistem kependudukan yang telah diperbaiki.



Reformasi Hukum

5. Memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman.
6. Menjadikan KPK sebagai *center of excellence* dalam upaya pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui kerja sama untuk melakukan edukasi langsung dengan sektor pendidikan dasar, menengah dan tinggi.
7. Membuat bank tanah sebagai dasar kebijakan untuk meningkatkan kemanfaatan

tanah, di antaranya dengan moratorium HGU dan HGB yang sudah habis masa berlakunya.

8. Meninjau kembali peraturan tentang zona hunian tempat tinggal perkotaan sehingga tercipta pembangunan yang berkeadilan.
9. Mencabut PP Nomor 78 Tahun 2016 dan menambah jenis barang dan jasa kebutuhan hidup layak sebagai dasar penetapan upah minimum untuk meningkatkan daya beli pekerja.
10. Menjamin untuk tidak mengintervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi.
11. Memperkuat program edukasi anti-korupsi bagi generasi muda, serta bekerja sama dengan swasta untuk menguatkan sinergi gerakan anti-korupsi di sektor swasta dan publik.
12. Memberikan prioritas pemberantasan korupsi pada sektor yang punya korelasi dengan peningkatan hajat hidup orang banyak dan perlindungan sumber daya publik, seperti pertanian, perdesaan, perikanan, pendidikan, kesehatan, kehutanan, SDA, dan perburuhan.

13. Melakukan revitalisasi fungsi pengawasan melalui pembangunan inspektorat (independen dan akuntabel) dan pengawasan kebocoran penerimaan perpajakan yang dikombinasikan sistem transaksi keuangan yang bersifat *bankable* dan pembayaran non-tunai.
14. Membangun pengendalian korupsi pada Sistem Logistik Nasional yang mengintegrasikan sektor perhubungan, perdagangan dengan pertanian, perikanan, kelautan dan pedesaan sehingga tidak saja mendorong *ease of doing business*, tetapi juga efisiensi pada biaya produksi.
15. Melakukan revisi jaminan pensiun PP Nomor 45 Tahun 2015 berupa besaran iuran dan manfaat bulanan yang diterima oleh pekerja.
16. Memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum, termasuk menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek *online* dan taksi *online* yang bermitra dengan perusahaan aplikasi, serta hak atas perjanjian kemitraan yang adil dan berkekuatan hukum.
17. Menjamin dan menegakkan proses penanganan masalah hukum secara profesional, transparan, dan berintegritas serta mencegah hukum dijadikan sebagai alat politik kekuasaan.
18. Memperbaiki sistem *outsourcing* sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
19. Memastikan tata kelola Migas dan Pertambangan Nasional sesuai amanat Konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945.
20. Menegakkan supremasi hukum tanpa diskriminasi, adil, dan transparan, serta mencegah pemanfaatan hukum sebagai alat politik kekuasaan.
21. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
22. Melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional dengan memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI yang menetap atau bekerja di luar negeri.
23. Memperluas dan memperkuat penggunaan *e-catalogue* dan *e-procurement* di pemerintahan dan BUMN.

24. Mendorong kewajiban pengadaan barang dan jasa melalui sistem dan pipeline yang sudah dirumuskan LKPP (30-40% APBN untuk pengadaan barang dan modal), serta mengintegrasikan sistem belanja modal dan barang tersebut ke dalam *e-planning hingga e-monitoring, e-budgeting hingga e-catalog, dan e-vendor.*



Reformasi Tata Kelola Pemerintahan

25. Meninjau dan membahas kembali pemekaran daerah administrasi didasarkan pada penelitian mendalam tentang rentang kendali optimal bagi negara kepulauan yang sangat luas.
26. Meningkatkan pendapatan negara baik dari pajak maupun bukan pajak untuk mendukung pertumbuhan anggaran pemerintah dalam implementasi kebijakan fiskal yang mampu melipatgandakan program peningkatan kualitas sumber daya manusia baik kesehatan, pendidikan, sains dan teknologi, serta kesejahteraan sosial.
27. Mendirikan Badan Penerimaan Negara yang baru.
28. Menaikkan batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan menurunkan tarif PPh 21 untuk mendorong aktivitas ekonomi dalam rangka menaikkan rasio pajak (*tax ratio*).

29. Mencegah kebocoran pendapatan negara dan pajak di bidang sumber daya alam dan komoditas bahan mentah.
30. Menghentikan praktik manipulasi (*misinvoicing*) dalam pelaporan kegiatan ekspor, serta mewajibkan pengolahan bahan mentah di dalam negeri (*smelter*, kilang minyak, dan industri pengolahan lainnya).
31. Memperbaiki birokrasi dan manajemen ekspor-impor nasional, serta mewajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor di bank-bank dalam negeri dalam waktu yang optimal.
32. Menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien.
33. Pembebasan pajak selama dua tahun pertama untuk UMKM yang baru berdiri dan terdaftar secara resmi.
34. Ekstensifikasi dan intensifikasi reformasi perpajakan agar menjadi stimulan lebih bagi dunia usaha untuk meningkatkan daya saing dan investasi di sektor riil.
35. Memberikan insentif bagi industri buku dengan menghapus PPN untuk semua jenis buku dan menjadikan pajak royalti buku bersifat final.

36. Memperbaiki produktivitas perekonomian dengan tujuan memperbaiki angka ICOR (*Incremental Capital to Output Ratio*).
37. Memperbaiki tata kelola utang pemerintah dengan menggunakan hanya untuk sektor-sektor produktif.
38. Meningkatkan harmonisasi kebijakan sektor moneter (Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan), sektor fiskal, dan sektor riil sebagai stabilisator perekonomian sekaligus juga sebagai stimulator pembangunan dan ekonomi Indonesia.
39. Menguatkan manajemen BUMN yang profesional dan berintegritas serta bebas dari kepentingan politik praktis.
40. Membenahi iklim investasi dengan kepastian regulasi yang ramah, transparan, dan kompetitif dengan negara lain.
41. Membangun *database* aset dan kekayaan kementerian, lembaga negara, dan pemerintahan daerah, serta peta potensi kekayaan SDA.
42. Membangun Sistem Integritas Nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan *soft* kompetensi ASN maupun APH.
43. Menegakkan kembali sistem meritokrasi dalam penunjukan pimpinan nasional seperti pejabat di kementerian, lembaga setingkat kementerian, TNI, POLRI, dan lembaga lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
44. Membangun paradigma bahwa ASN adalah pelayan masyarakat, bukan sebaliknya.
45. Menyusun birokrasi yang berdasarkan atas strategi pembangunan dan menerapkan manajemen kinerja ASN.
46. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur negara.
47. Meningkatkan sinergi antarlembaga birokrasi dan antardaerah.
48. Mendorong akses pendidikan seluas-luasnya bagi ASN yang telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan demi terciptanya regenerasi birokrasi.
49. Mengembangkan sistem *smart government* untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
50. Menyempurnakan program *talent pool* dengan merekrut calon ASN terbaik, langsung dari lembaga pendidikan dan menyediakan area karier baru bagi pensiunan ASN yang masih ingin berkarya di luar pemerintahan.

PRABOWO GIBRAN 2024

BERSAMA INDONESIA MAJU



"Sekarang adalah momen yang baik bagi UMKM kebudayaan Indonesia menembus pasar dunia" Gibran

Program Kerja

Asta Cita 8

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati dan menjaga toleransi antarumat beragama, keberlanjutan alam, sekaligus melestarikan warisan budaya yang menjadi identitas bangsa yang besar.

Toleransi antarumat beragama bukan hanya menjadi semboyan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, memastikan setiap warga negara merasa dihargai dan dilindungi hak-haknya dalam menjalankan ibadah.

Alam yang makmur juga harus dijaga untuk memberikan keberlanjutan pembangunan. Budaya yang kuat dan bermartabat membuat ciri khas Indonesia tidak luntur sebagai bangsa yang besar.

Dengan pendekatan holistik ini, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakangnya, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam membangun masa depan yang lebih cerah.

Kami, Prabowo dan Gibran mempunyai komitmen untuk memberikan jaminan keamanan untuk beribadah, pengutamaan lingkungan alam, dan melestarikan budaya, dengan cara:



Masyarakat Adil, Makmur dan Harmonis

1. Mengedepankan semangat Tunggal Ika yang tidak terpisahkan di masyarakat yang ber-Kebhinekaan untuk memperkuat rasa persaudaraan, toleransi, persatuan, dan kesatuan antar umat beragama serta sesama anak-bangsa.
2. Mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui jalan demokrasi yang sesungguhnya, yaitu demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD Tahun 1945.
3. Mengaktifkan kembali kegiatan kolektif kemasyarakatan yang bersifat gotong royong agar bisa menjalin kembali jalinan persatuan antar elemen masyarakat sejak dulu.

4. Mereaktualisasi dan menghidupkan kembali nilai-nilai kearifan lokal bagi generasi saat ini dalam aktivitas pendidikan dan pengajaran, baik yang bersifat formal maupun non-formal.
5. Menghentikan ancaman persekusi terhadap tiap individu, organisasi, dan kelompok masyarakat terlepas dari latar belakangnya.
6. Menjamin kebebasan beribadah dan menjalankan kewajiban sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
7. Mendirikan Lembaga Tabung Haji demi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas.
10. Membangun dan revitalisasi sentra kebudayaan termasuk bioskop rakyat dan gedung kesenian rakyat di seluruh Indonesia
11. Revitalisasi bangunan kuno dan cagar budaya di seluruh Indonesia sebagai wahana pembelajaran nilai-nilai luhur bangsa bagi generasi muda.
12. Membangun kembali taman-taman budaya sebagai wadah perlindungan, pengembangan, dan pemajuan seni-seni tradisional Indonesia.
13. Memperluas program-program afirmasi bagi peningkatan kesejahteraan, perlindungan kesenian tradisional yang terancam punah akibat kurangnya regenerasi, rendahnya frekuensi pertunjukan, dan kurangnya sarana prasarana pendukungnya.



Melestarikan Budaya

8. Meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pelestarian situs budaya dan sejarah, termasuk menyiapkan dana abadi kebudayaan.
9. Menghidupkan kembali cerita-cerita rakyat yang hampir hilang dan asing bagi generasi muda melalui aktivitas kreatif, inovatif, dan berbasis digital.
14. Mengalokasikan dana budaya dan memperbesar dukungan pendanaan untuk mendorong kemandirian komunitas-komunitas seni budaya di seluruh Indonesia.
15. Melengkapi dan pemutakhiran pendataan, inventarisasi, dan dokumentasi seni tradisional Indonesia.

16. Membangun kesadaran akan pentingnya pelestarian warisan budaya dan seni tradisional dengan meningkatkan partisipasi publik melalui pelibatan masyarakat, media, institusi perguruan tinggi, perusahaan swasta, dan BUMN.
17. Memperluas dan mengintensifkan kerja sama dengan masyarakat dan komunitas dalam pengembangan kampung seni dan wisata budaya.
18. Melengkapi dan memodernisasi tata kelembagaan dalam program nasional perlindungan warisan budaya (*cultural heritage*) baik yang bersifat *intangible* (tak benda) seperti cerita-cerita tradisional (*folklore*), bahasa ibu, peribahasa lokal, kearifan lokal dan lagu tradisional, dan tangible (berwujud) seperti motif batik, seni ukir, alat musik, keris, prasasti, tugu kerajaan, candi serta keraton, dan istana.
19. Menjamin keberlangsungan serta memajukan ekosistem seni tradisional Indonesia agar Indonesia terhindar sebagai negara konsumen budaya dunia.
20. Mengintensifkan dan memperluas diplomasi budaya di forum internasional untuk memperjuangkan warisan budaya nasional menjadi warisan budaya dunia.
21. Mendorong penyelenggaraan festival budaya di seluruh Indonesia agar tidak hanya apresiasi seni masyarakat semakin meningkat, tetapi juga semakin mengasah keterampilan di bidang seni, budaya, dan kreativitas.
22. Menjamin kebebasan para seniman serta pelaku budaya untuk berkarya, menyampaikan pendapat, dan berkreasi di muka umum.



Penanganan Bencana

23. Meningkatkan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk memutakhirkan sistem peringatan dini bencana.
24. Meningkatkan anggaran penanganan bencana untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terdampak bencana dan mengembalikan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut.
25. Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana.
26. Menata koordinasi antar lembaga terkait untuk mempercepat penanggulangan dan penanganan bencana.

27. Mencegah penguasaan dan pengurasan sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab yang berpotensi mengakibatkan timbulnya bencana.
28. Menata sinergi antara pemerintah dengan swasta, kelompok masyarakat, dan lembaga donor asing dalam penanganan dan penanggulangan bencana.



Partai Politik Pengusung

Koalisi Indonesia Maju pengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Gibran terdiri dari partai politik berikut:



**PARTAI
GERINDRA**



**PARTAI
GOLONGAN
KARYA**



**PARTAI
AMANAT
NASIONAL**



**PARTAI
DEMOKRAT**



**PARTAI
BULAN
BINTANG**



**PARTAI
GELORA
INDONESIA**



**PARTAI
GARDA
REPUBLIK
INDONESIA**



**PARTAI
SOLIDARITAS
INDONESIA**



**PARTAI
PRIMA**

PRABOWO GIBRAN 2024

BERSAMA INDONESIA MAJU



Prabowo Subianto, lahir 17 Oktober 1951



Fakta Prabowo Subianto

Profil Calon Presiden

1

Di 1996, Prabowo selamatkan 20 sandera (8 WNA) dari OPM di Mapenduma, Papua.

2

Di 1997, Prabowo pimpin tim Indonesia yang jadi pendaki Muslim pertama capai puncak Everest.

3

Sebagai Ketua Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI), Prabowo pastikan prestasi timnas pencak silat gemilang.

4

Prabowo dikenal sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HAKTI) yang sejahterakan petani.

5

Prabowo juga adalah Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) yang bela pedagang pasar.

6

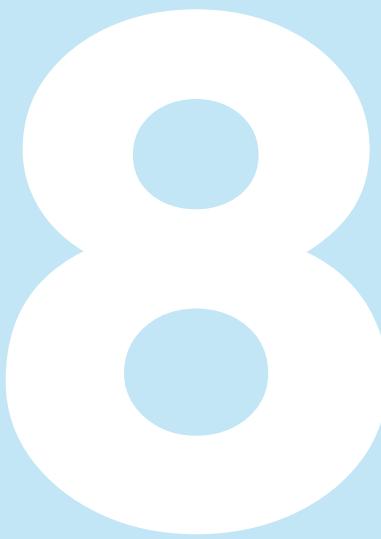
Prabowo membina Kelompok Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) yang perjuangkan harkat petani nelayan.

7

Prabowo adalah Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, partai kedua terbesar di Indonesia di Pemilu 2019

8

Prabowo diakui dunia internasional sebagai tokoh persatuan Indonesia yang memiliki wawasan strategi kedaulatan bangsa.



Prestasi Prabowo Sebagai Menteri Pertahanan Sejak 2019

Prestasi Calon Presiden



- 1** Menhan Prabowo berhasil buat Indonesia punya komponen cadangan (KOMCAD)
- 2** Menhan Prabowo perkuat industri pertahanan dalam negeri, perkuat PINDAD dan wujudkan produksi MAUNG (kendaraan taktis) di Bandung
- 3** Menhan Prabowo perbaiki dan tingkatkan kualitas SMA Taruna Nusantara, membangun 5 (lima) sekolah baru di Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, dan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan membangun 2 politeknik baru
- 4** Menhan Prabowo buka 4 fakultas baru, perbaiki kampus dan bangun Politeknik Universitas Pertahanan (UNHAN) di Atambua, NTT
- 5** Menhan Prabowo bentuk Satgas Air yang temukan 100+ sumber air untuk atasi kekeringan di berbagai daerah
- 6** Menhan Prabowo bangun 25 RS TNI baru, perbaiki Pusrehab Kemhan jadi RS Jend. Sudirman berfasilitas lengkap, dan perkuat industri alkes dalam negeri
- 7** Menhan Prabowo dapatkan alutsista terbaik seperti pesawat tempur F 15-EX dan Rafale untuk TNI AU, kapal selam untuk TNI AL
- 8** Menhan Prabowo tampil memukau di forum-forum internasional dan buat Indonesia disegani

Tanda Kemampuan dan Penghargaan Prabowo



Brevet Kualifikasi
Komando Kpussus



Brevet Free Fall
TNI AD



Brevet Free Fall
US Army



Brevet Penerbang
TNI AD



Brevet
Jump Master



Brevet Sat-81
Anti Terror



Brevet Pandu Udara
US Army



Brevet GSG9
Germany

TANDA JASA PRABOWO

Bintang Kartika Eka Paksi Naraya

Bintang Yudha Dharma Naraya

Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun

Satya Lencana Seraja Ulangan III

Satya Lencana Raksa Dharma

Satya Lencana Dwija Sistha

Satya Lencana Wira Karya

Paladin Medal of Honor (Kamboja)

Commandeur de l'Ordre National du Mérite (Perancis)

PRABOWO GIBRAN 2024

BERSAMA INDONESIA MAJU



Gibran Rakabuming Raka, lahir 1 Oktober 1987

Calon Wakil Presiden

Gibran Rakabuming Raka

Solo di Bawah Kepemimpinan Gibran

- 1. Solo dinobatkan sebagai kota ternyaman di Indonesia:** Dalam penilaian yang dilakukan oleh situs akademi Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) pada 2022. Kota Solo meraih peringkat pertama kota ternyaman di Indonesia dengan poin rata-rata sebesar 77.
- 2. Solo memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi untuk kategori kota di Jawa Tengah:** Pertumbuhan ekonomi Solo melejit hingga 6,25 persen pada tahun 2023 jauh di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang hanya 5,31 persen.
- 3. Solo menjadi kota dengan peringkat ke-4 tertinggi dalam laporan Indeks Kota Toleran (IKT) 2022:** Kota Solo terus menunjukkan tren positif sebagai kota toleran akibat kebijakan pemberian ruang untuk merayakan hari besar keagamaan di kawasan Balai Kota Solo.
- 4. Kawasan kumuh Solo berkurang 70% dalam 4 tahun:** Luasan kawasan kumuh di Solo berkurang hampir 70% dari tahun 2017 dari semula 359,55 hektar pada 2017 menjadi 118 hektar pada 2021.
- 5. 96% masyarakat Solo puas dengan kinerja Gibran:** dengan jumlah score 1.709 diambil dari 560 responden, 96% masyarakat Solo puas dengan kinerja Gibran terutama dalam sektor pembangunan infrastruktur dan ekonomi.



**BERSAMA
INDONESIA
MAJU**







**BERSAMA
INDONESIA
MAJU**





PRABOWO GIBRAN 2024

BERSAMA INDONESIA MAJU







BERSAMA
INDONESIA
MAJU



**PRABOWO
GIBRAN** 2024

BERSAMA INDONESIA MAJU

 @prabowo

 @gibran_rakabuming



VISI DAN MISI

CALON PRESIDEN & CALON WAKIL PRESIDEN

GANJAR PRANOWO & MAHFUD MD

2024-2029

MENUJU INDONESIA UNGGUL

GERAK CEPAT MEWUJUDKAN NEGARA MARITIM
YANG ADIL DAN LESTARI



MENUJU INDONESIA

Gerak Cepat Mewujudkan Negara

**MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA UNGGUL
YANG BERKUALITAS, PRODUKTIF, DAN BERKEPribADIAN**

**MEMPERCEPAT PENGUASAAN SAINS DAN TEKNOLOGI MELALUI
PERCEPATAN RISET DAN INOVASI (R & I) BERDIKARI**

**MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERDIKARI
BERBASIS PENGETAHUAN DAN NILAI TAMBAH**

MEMPERCEPAT PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

KETERSEDIAAN ANGGARAN

PEMBERANTASAN KORUPSI

INDONESIA UNGGUL

Maritim yang Adil dan Lestari



MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN SISTEM DIGITAL NASIONAL

MEMPERCEPAT PERWUJUDAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN MELALUI EKONOMI HIJAU DAN BIRU

MEMPERCEPAT PELAKSANAAN DEMOKRASI SUBSTANTIF, PENGHORMATAN HAM, SUPREMASI HUKUM YANG BERKEADILAN, DAN KEAMANAN YANG PROFESIONAL

MEMPERCEPAT PENINGKATAN PERAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN TATA DUNIA BARU YANG LEBIH BERKEADILAN MELALUI POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF DAN MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA

SAN KORUPSI

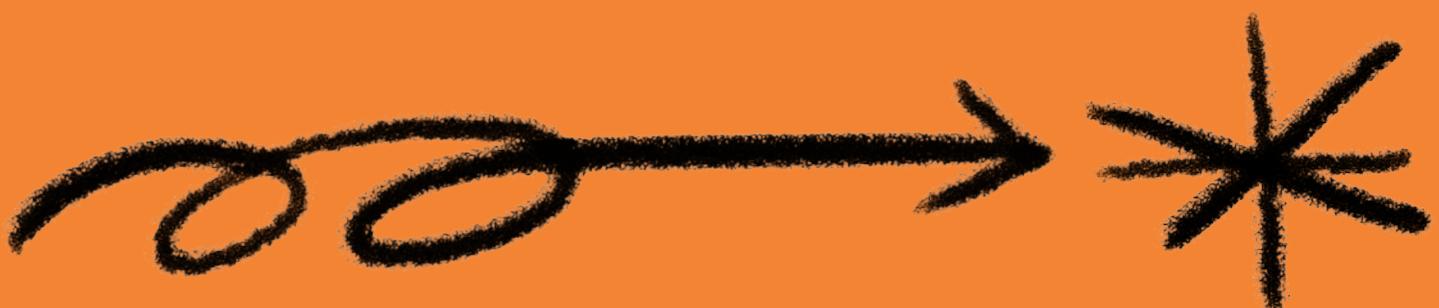
DIGITALISASI BIROKRASI

"...PANCASILA DALAM KONSEP PEMBANGUNAN DI SEGALA BIDANG KEHIDUPAN, BAIK POLITIK, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA, MAUPUN MENTAL DAN SPIRITUAL. KONSEP INI MERUPAKAN SUATU CETAK BIRU AGAR INDONESIA DAPAT MENJADI NEGARA INDUSTRI MAJU, YANG MENEMPATKAN RAKYAT SEBAGAI SUBJEK SEKALIGUS TUJUAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL."

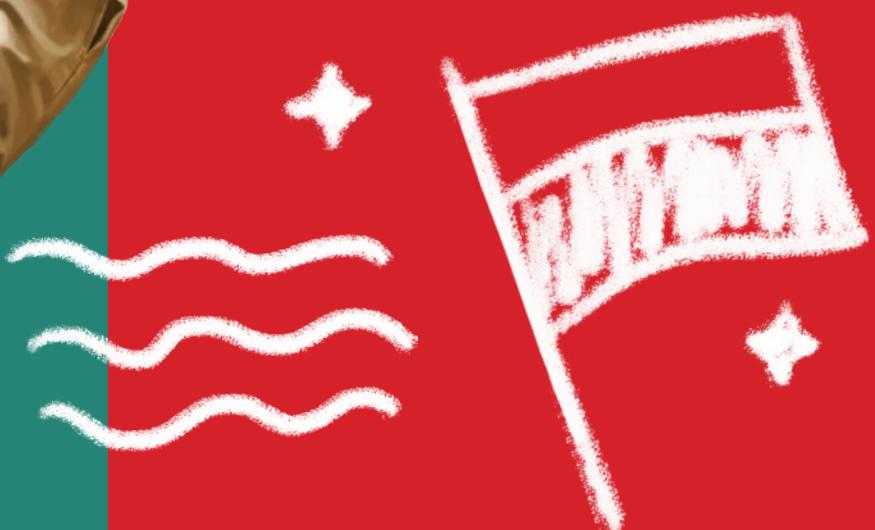
Pidato **Megawati Soekarnoputri** dalam HUT ke-46
PDI Perjuangan tanggal 10 Januari 2019



"KEMBALILAH MENJADI



BANGSA SAMUDRA!"





Daftar Isi

Pendahuluan.....	10
Visi.....	14
Misi.....	16

01 MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA UNGGUL YANG BERKUALITAS, PRODUKTIF, DAN BERKEPRIBADIAN

20

1.1. Kesehatan Jiwa dan Raga	21
1.1.1. 1 Desa – 1 Puskesmas/Pustu – 1 Dokter/Nakes	21
1.1.2. Layanan Konsul Keliling (KOLING)	21
1.1.3. Ibu Sehat, Anak Sehat	21
1.1.4. Penguatan Kesehatan Mental.....	21
1.1.5. Perluasan & Kemudahan Layanan Kesehatan.....	21
1.2. Pendidikan Berkualitas dan Merata	21
1.2.1. Wajib Belajar 12 Tahun Gratis: Pintar Tanpa Biaya.....	21
1.2.2. 1 Keluarga Miskin, 1 Sarjana.....	21
1.2.3. Guru dan Dosen Sejahtera, Berkualitas, dan Kompeten Sejajar Negara Maju .	22
1.2.4. Santri dan Pesantren Unggul	22
1.2.5. Integrasi Pendidikan & Pelatihan Vokasi – Dunia Usaha	22
1.3. Negara Hadir dan Perlindungan Sosial Adaptif	23
1.3.1. Tingkat Kemiskinan 2,5% dan Kemiskinan Ekstrem 0%	23
1.3.2. PKH 15 Juta Keluarga Penerima Manfaat	23
1.3.3. Cukup Pakai NIK	23
1.3.4. Penguatan Sistem SATU DATA INDONESIA.....	23
1.3.5. Dana Abadi Kesejahteraan Sosial	23
1.4. Budaya Maju dan Sportif.....	23
1.4.1. Berkepribadian Nasional.....	23
1.4.2. Seni Budaya Indonesia Kebanggaan Dunia.....	23
1.4.3. Seniman Aman Nyaman	23
1.4.4. Budayawan Berkarya.....	24
1.4.5. Atlet Sejahtera Prestasi Mendunia.....	24
1.4.6. Sumber Pengetahuan yang Inklusif dan Hebat	24
1.4.7. 1 Desa – 1 Lapangan	24
1.5. Perempuan Maju dan Anak Sejahtera	24
1.5.1. Kartini Maju	24
1.5.2. Jaga Teman	24
1.5.3. Memperbanyak Tempat Penitipan Anak	24

02 MEMPERCEPAT PENGUSAAN SAINS DAN TEKNOLOGI MELALUI PERCEPATAN RISET DAN INOVASI (R & I) BERDIKARI

28

2.1. Riset dan Inovasi Sebagai Fondasi	29
2.1.1. Lipat Gandakan Anggaran Riset dan Inovasi.....	29
2.1.2. Membangun Ekosistem Riset dan Inovasi.....	29
2.2. Lompatan Menjemput Kemajuan	29
2.2.1. GP Project	29
2.2.2. Beasiswa yang Masif dan Terarah	29
03 MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERDIKARI BERBASIS PENGETAHUAN DAN NILAI TAMBAH	32
 3.1. Ekonomi Unggul Berdaya Saing	33
3.1.1. Cepat Kerja – 17 Juta Lapangan Kerja Baru	33
3.1.2. Mudah Berusaha	33
3.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Mencapai 7%	33
3.1.4. Percepatan Penyelesaian IKN	33
3.1.5. <i>Made in Indonesia</i>	33
3.1.6. Industrialisasi 5.0: Karena Semua Ada di Kita	34
3.1.7. Ekonomi Kreatif Makin Melaju	34
3.1.8. Indonesia Tujuan Utama Pariwisata Dunia.....	34
3.1.9. Fiskal Tangguh.....	34
3.1.10. Infrastruktur dan Simpul Konektivitas Indonesia.....	34
3.1.11. Logistik Murah.....	34
3.1.12. BUMN Unggul	34
 3.2. Kedaulatan Pangan	35
3.2.1. Pangan Terjamin, Terjaga, Terjangkau, dan Terdiversifikasi	35
3.2.2. Alsintan Modern dan Dukungan Sarana Prasarana	35
3.2.3. Industri Pangan Berkelanjutan	35
3.2.4. Lahan Subur untuk Petani	35
3.2.5. Petani, Peternak, dan Nelayan Sejahtera	35
 3.3. Indonesia Pusat Ekonomi Syariah dan Industri Halal	35
3.3.1. Pusat Industri Keuangan Syariah	35
3.3.2. Pusat Industri Halal Global	35
04 MEMPERCEPAT PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI.....	38
 4.1. Pembangunan Adil dan Merata.....	39
4.1.1. Desa Naik Kelas	39
4.1.2. Saham untuk Rakyat.....	39
4.1.3. Koperasi (Kemitraan) sebagai Corak Perekonomian Nasional.....	39
4.1.4. Gandakan dan Garap Pasar Bersih	39
4.1.5. 4T Terintegrasi (Tempat Tinggal-Tempat Kerja-Trotoar-Transportasi Publik) .	39
4.1.6. Desa – Kota Tumbuh Bersama.....	39
4.1.7. Reforma Agraria Tuntas.....	39
4.1.8. Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Asimetris untuk Papua.....	40
4.1.9. Masyarakat Hukum Adat Sejahtera.....	40
4.1.10. Perbatasan dan 3T sebagai Koridor Strategis.....	40
4.1.11. Anak Muda Berusaha.....	40
 4.2. Bahagia dan Sejahtera.....	40
4.2.1. Rumah Kita – 10 Juta Hunian.....	40
4.2.2. Buruh Sejahtera.....	41



4.2.3. Lansia Bahagia	41
4.2.4. Disabilitas Maju dan Produktif	41
4.2.5. Kampung Sehat	41

05 MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN SISTEM DIGITAL NASIONAL 44

5.1. Infrastruktur Digital Hebat dan SDM Digital Andal.....	45
5.1.1. Zero Blank Spot.....	45
5.1.2. Internet Kuat, Cepat, Murah	45
5.1.3. Program CERAH Digital – Cerdas dan Ahli Digital.....	45
5.2. Ekosistem Digital Berdaya Saing	45
5.2.1. Data Aman.....	45
5.2.2. Dukung Rintisan Usaha Digital (<i>Start Up</i>)	45
5.2.3. Regulasi Platform Digital yang Berkeadilan.....	45
5.2.4. Kemandirian Industri Digital	45
5.2.5. Digital Berdaulat	45

06 MEMPERCEPAT PERWUJUDAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN MELALUI EKONOMI HIJAU DAN BIRU 48

6.1. Lingkungan Hidup Berkelanjutan.....	49
6.1.1. Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca	49
6.1.2. Harmoni Hutan untuk Keseimbangan	49
6.1.3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan	49
6.1.4. Air untuk Rakyat	49
6.1.5. Adaptasi dan Mitigasi Krisis Iklim	49
6.1.6. Penerapan ESG	49
6.1.7. KadarKlim – Kampung Sadar Iklim	49
6.2. Ekonomi Hijau	50
6.2.1. Transisi Energi	50
6.2.2. Desa Mandiri Energi	50
6.2.3. Limbah Jadi Berkah	50
6.2.4. Ekonomi Sirkuler	50
6.3. Ekonomi Biru	50
6.3.1. Tata Kelola Laut yang Inklusif dan Berkelanjutan	50
6.3.2. Akselerasi 11 Potensi Maritim	50
6.3.3. Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zonasi	50
6.3.4. Perikanan Budi Daya Berkelanjutan	51
6.3.5. Maritim Unggul (MU).....	51
6.3.6. Industri Maritim Jaya	51
6.3.7. Wisata Maritim Mendunia	51
6.3.8. Mengatasi Pencemaran Laut.....	51

07 MEMPERCEPAT PELAKSANAAN DEMOKRASI SUBSTANTIF, PENGHORMATAN HAM, SUPREMASI HUKUM YANG BERKEADILAN, DAN KEAMANAN YANG PROFESIONAL 54

7.1. Demokrasi Substantif	55
7.1.1. Menjamin Kebebasan Sipil	55
7.1.2. Galang Supremasi Sipil	55



7.1.3. Gerak Pemantapan Lembaga Politik.....	55
7.1.4. Kemerdekaan Pers dan Media	55
7.2. Pemerintahan yang Bersih dan Tulus Melayani Rakyat.....	55
7.2.1. Lapor Presiden	55
7.2.2. Mal Pelayanan Publik.....	55
7.2.3. Nomor Darurat Nasional.....	55
7.2.4. Digitalisasi Pemerintahan.....	55
7.2.5. ASN Sejahtera.....	56
7.3. Hukum Adil untuk Semua	56
7.3.1. Membasmi Korupsi.....	56
7.3.2. Jaminan Hukum bagi Semua.....	56
7.3.3. Keadilan Restoratif.....	56
7.3.4. Supremasi Hukum Progresif dan Menjamin HAM	56
7.3.5. Pelanggaran HAM Diselesaikan.....	56
7.3.6. Hukum Tegas Kejahatan Luar Biasa	56
7.3.7. Yudikatif Adil, Berintegritas, dan Independen	57
7.3.8. Legislasi Partisipatif	57
7.3.9. Aparat Penegak Hukum Sejahtera dan Profesional	57
7.4. Polisi Profesional Tepercaya	57
7.4.1. Kesesuaian Tindakan Hukum.....	57
7.4.2. Kepatuhan terhadap Standar dan HAM.....	57
7.4.3. Tanggap terhadap Kebutuhan Warga Biasa	57
7.4.4. Bhayangkara Sejahtera.....	57
08 MEMPERCEPAT PENINGKATAN PERAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN TATA DUNIA BARU YANG LEBIH BERKEADILAN MELALUI POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF DAN MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA.....	60
8.1. Berperan Sentral dalam Menata Dunia Baru.....	60
8.1.1. Koeksistensi Geopolitik Progresif	60
8.1.2. Perjanjian Internasional 100% untuk Kepentingan Nasional.....	61
8.1.3. Kedutaan Besar Ujung Tombak Pelayanan WNI	61
8.2. Kedaulatan NKRI dengan Sistem Pertahanan 5.0	61
8.2.1. Modernisasi Pertahanan SAKTI.....	61
8.2.2. Prajurit Sejahtera.....	61
8.2.3. Industri Pertahanan Keamanan Kelas Dunia	61
8.2.4. Benteng Pertahanan Nusantara	61
8.2.5. Perisai Siber Nusantara	61
FONDASI	62
PENUTUP	64



Pendahuluan

Kami, GANJAR PRANOWO dan MAHFUD MAHMODIN, telah ditetapkan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2024 oleh gabungan Partai Politik yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Persatuan Indonesia (PERINDO), dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA).

Kami sepenuhnya setia pada Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan berkomitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa, dasar, dan tujuan bernegara, serta landasan kebijakan pemerintahan negara menjadi spirit bagi kepemimpinan Indonesia di dalam membangun persaudaraan dunia. Kami berkomitmen untuk mempercepat keadilan dan kemakmuran rakyat Indonesia, dengan menaruh perhatian terpenting bagi fakir miskin dan anak telantar untuk dipelihara negara. Hal tersebut menjadi pijakan bagi tekad kami di dalam mewujudkan kemiskinan ekstrem nol persen, dan secara bertahap mengurangi kemiskinan hingga 2,5% pada tahun 2029.

Dedikasi kami ditujukan pada rakyat, bangsa, dan negara Indonesia guna melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berkaitan dengan hal itu, kami bertekad untuk memerdekakan rakyat miskin melalui pemenuhan hak pendidikan untuk semua, kesehatan tanpa diskriminasi, sistem jaminan sosial, dan penyediaan kebutuhan pangan, papan, dan pekerjaan yang layak. Memerdekakan rakyat miskin menjadi awal bagi pelaksanaan konsepsi Pembangunan Indonesia Sentris sebagai negara kepulauan-maritim.

Kami mengapresiasi berbagai kemajuan yang telah diletakkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo, dan dengan berbagai capaian tersebut kami bertekad untuk memajukan dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote.

Strategi pembangunan nasional yang kami rancang ditujukan guna mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Strategi Berdaulat dalam Politik, kami akan menjalankan pemerintahan yang BERGERAK CEPAT dengan spirit “tuanku adalah rakyat, jabatan hanya mandat” untuk melindungi rakyat dalam kehidupan yang demokratis serta bertekad untuk memajukan hak-hak sosial ekonomi dan budaya rakyat.



Strategi Berdikari dalam Ekonomi, kami akan memastikan roda perekonomian BERGERAK CEPAT, adil, dan merata dengan mengutamakan pembangunan SDM yang unggul, produktif, dan berdaya guna bagi peningkatan nilai tambah perekonomian nasional.

Strategi Berkepribadian dalam Kebudayaan, kami akan BERGERAK CEPAT memajukan seluruh aspek kehidupan berdasarkan jati diri dan kebudayaan bangsa, dan membangun disiplin nasional disertai cara pikir, cara kerja, cara hidup yang unggul serta semangat gotong royong untuk membawa kemajuan peradaban Indonesia.

PERSOALAN POKOK DAN TANTANGAN KE DEPAN

Tugas membangun bangsa dan negara ke depan membutuhkan gerak cepat dalam menyelesaikan berbagai persoalan dan menjawab berbagai tantangan.

Kami sangat memahami perubahan dan tantangan global seperti geopolitik, geoekonomi, perkembangan kependudukan dunia, disrupti teknologi dan informasi, perubahan iklim, serta globalisasi, telah memicu kesenjangan antara negara maju, berkembang, dan miskin. Struktur geopolitik, ketidakadilan sistem internasional, dan pertarungan hegemoni antar negara tersebut mengakibatkan berbagai krisis mulai dari energi, pangan, kemiskinan, ketimpangan, hingga berbagai pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan.

Di tengah berbagai persoalan geopolitik global, bangsa Indonesia masih menghadapi beberapa persoalan pokok, di antaranya adalah:

Pertama, kualitas sumber daya manusia Indonesia. Struktur tenaga kerja Indonesia tahun 2022 mayoritas atau 56,33% adalah lulusan SMP ke bawah, kemudian 31,34% lulusan SMA, dan hanya 12,32% lulusan perguruan tinggi. Dengan kondisi tersebut, produktivitas tenaga kerja Indonesia tahun 2021 menurut ILO hanya memiliki *output* sebesar US\$13 per jam atau masih di bawah Singapura US\$74, Brunei Darussalam US\$56, Malaysia US\$26, dan Thailand US\$15.

Kedua, kohesivitas sosial menurun. Ketidakadilan dalam mendapatkan pekerjaan yang berkualitas, pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber daya serta berbagai konflik agraria menjadi pemicu terbesar menurunnya kohesivitas sosial. Selain itu, masih merebaknya berbagai persoalan sosial seperti intoleransi dan radikalisme di beberapa tempat telah memicu terorisme. Menurunnya kohesivitas sosial juga disebabkan oleh tekanan modernisasi yang memungkinkan rakyat dari lingkungan sosialnya sehingga berujung pada terjadinya berbagai konflik sosial.

Ketiga, struktur perekonomian nasional dan lingkungan. Meski persentase penduduk miskin terus berkurang hingga hanya 9,36% dari populasi pada Maret 2023. Namun, jebakan kemiskinan masih hantui terus menjerat penduduk bila tidak memiliki kesempatan untuk mengubah hidupnya dengan pekerjaan yang layak dan berkualitas. Di samping itu, struktur pembangunan nasional relatif masih terkonsentrasi di beberapa wilayah,



sektor, dan kelompok. Krisis iklim juga menjadi persoalan yang dampaknya telah nyata dirasakan dan mengancam keselamatan, kesehatan masyarakat, meningkatkan risiko bencana alam, serta mempengaruhi produksi pertanian dan perikanan.

Keempat, sistem politik dan tata pemerintahan negara yang bercorak korporatis dan hanya berbasis elektoral menyebabkan mahalnya biaya demokrasi. Struktur tersebut juga telah menjauhkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan dari sirkuit kekuasaan. Sementara itu, ego sektoral masih terus menjadi penghambat pembangunan nasional yang holistik.

Kelima, ketidakadilan hukum. Budaya tertib hukum, kesetaraan dan keadilan di mata hukum, kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, dan ketidakpastian proses hukum, bermuara pada ketidakpastian hukum. Hukum masih dirasakan tajam ke bawah dan tumpul ke atas sehingga keadilan dalam hukum belum banyak dirasakan oleh masyarakat luas.

Ke depan, Indonesia harus mampu menyelesaikan berbagai tantangan yang muncul, yang di antaranya adalah:

Bonus demografi akan menjadi bencana demografi apabila tidak diikuti dengan peningkatan kualitas manusia Indonesia dan penguasaan sains dan teknologi. Dengan jumlah penduduk tahun 2022 lebih dari 278 juta jiwa atau terbesar keempat di dunia dapat menjadi potensi sekaligus kekuatan besar bagi Indonesia untuk melompat menjadi negara maju.

Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dapat menjadi “kutukan sumber daya alam” jika tidak dikelola secara optimal. Potensi sumber daya alam seperti energi, mineral, pertanian, perkebunan, perikanan, serta keanekaragaman hayati adalah kunci bagi Indonesia dalam bersaing di dunia internasional dan menghadirkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, distribusi akses dan hasil dari pengolahan sumber daya alam juga menjadi tantangan bagi Indonesia untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Indonesia tercatat sebagai negara pengguna internet yang besar, mulai dari media sosial, mesin pencari, e-commerce, dan produk digital lainnya. Potensi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai US\$146 miliar tahun 2025 dan US\$220 - US\$360 miliar tahun 2030 harus dimanfaatkan dengan bersandar pada kekuatan dan sumber daya nasional.

Perubahan iklim yang telah bergeser menjadi krisis iklim mengharuskan adanya pergeseran paradigma dalam pembangunan. Lingkungan hidup atau *planetary boundaries* harus menjadi batasan bagi seluruh aktivitas, utamanya aktivitas ekonomi. Keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan menjadi titik krusial.



Demokrasi yang telah berjalan selama 25 tahun sejak reformasi, bukanlah suatu hal yang datang dengan sendirinya. Atas dasar itu, demokrasi harus terus dikawal dengan menutup pintu pada otoritarianisme. Di saat yang sama, hak asasi, keadilan hukum, dan pemerintah yang efektif harus dikedepankan sebagai esensi demokrasi.

Tatanan global yang terus bergerak menjadi dunia multipolar menuntut adanya peran Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal tersebut memiliki konsekuensi pada bangunan pertahanan dan keamanan yang mendukung solidaritas internasional.



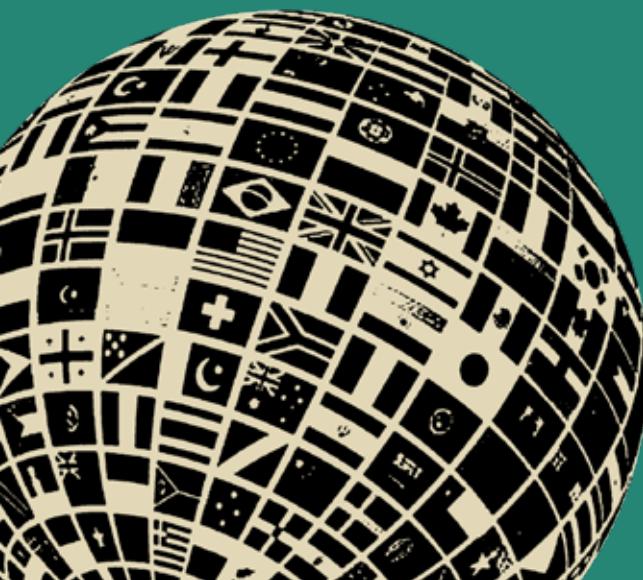


Visi

Kami menyadari pentingnya kesinambungan pemerintahan negara Republik Indonesia yang diawali oleh Presiden Soekarno sebagai pembuka gerbang kemerdekaan, Presiden Soeharto dengan gerbang pembangunan, dilanjutkan dengan kepemimpinan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang secara bersama-sama telah membuka gerbang demokrasi, hingga Presiden Joko Widodo yang meletakkan gerbang kemajuan Indonesia Raya. Guna melanjutkan kesinambungan tersebut, maka kami mengusung visi sebagai berikut:

Menuju Indonesia Unggul

Gerak Cepat Mewujudkan Negara Maritim yang Adil dan Lestari





INDONESIA UNGGUL

merupakan kehendak bahwa Indonesia tidak hanya sekadar menjadi negara maju, tidak sekadar menjadi kuat, tidak sekadar berdaya saing, tetapi peningkatan kemajuan, kekuatan, dan daya saing yang dicapai melebihi atau melampaui apa yang dicapai oleh negara lain. Unggul menggambarkan kondisi pencapaian yang lebih nyata serta tidak berasumsi dan menganggap hal lain diam atau tetap.

GERAK CEPAT

merupakan suatu penegasan bahwa berbagai proses untuk menjadi unggul dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Momentum percepatan mendasarkan diri pada bonus demografi yang segera berakhir. Gerak Cepat dilakukan secara bersama-sama, bergotong royong, dengan mengandalkan kekuatan kolektif rakyat melalui perencanaan matang, serta target dan tahapan yang jelas dan terukur yang dituangkan dalam konsepsi pola pembangunan semesta dan berencana.

NEGARA MARITIM

merupakan kesadaran terhadap kekuatan dan posisi Indonesia yang akan membentuk paradigma baru, bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu. Laut adalah jalan masa depan sekaligus kekuatan ekonomi, konektivitas, diplomasi, serta pertahanan dan keamanan. Laut dapat dimanfaatkan, dijaga, dan dirawat secara berkelanjutan agar bermuara pada kedaulatan negara dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

ADIL DAN LESTARI

adalah muara dari langkah yang ditempuh seluruh elemen bangsa dalam membangun negeri. Rakyat hidupnya sejahtera, merasakan keadilan sosial terlaksana, dan hidup dalam alam Indonesia yang lestari. Sehingga, tiap-tiap manusia Indonesia betul-betul merasa dipangku oleh Ibu Pertiwi.



Misi

Upaya mencapai visi Menuju Indonesia Unggul, ditempuh dengan **8 GERAK CEPAT GANJAR & MAHFUD** sebagai berikut:

- 1. Mempercepat Pembangunan Manusia Indonesia Unggul yang Berkualitas, Produktif, dan Berkepribadian**
- 2. Mempercepat Penguasaan Sains dan Teknologi melalui Percepatan Riset dan Inovasi (R & I) Berdikari**
- 3. Mempercepat Pembangunan Ekonomi Berdikari Berbasis Pengetahuan dan Nilai Tambah**
- 4. Mempercepat Pemerataan Pembangunan Ekonomi**





- 5. Mempercepat Pembangunan Sistem Digital Nasional**
- 6. Mempercepat Perwujudan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Ekonomi Hijau dan Biru**
- 7. Mempercepat Pelaksanaan Demokrasi Substantif, Penghormatan HAM, Supremasi Hukum yang Berkeadilan, dan Keamanan yang Profesional**
- 8. Mempercepat Peningkatan Peran Indonesia dalam Mewujudkan Tata Dunia Baru yang Lebih Berkeadilan melalui Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan Memperkuat Pertahanan Negara**

8 GERAK CEPAT ini merupakan langkah cepat yang terencana dan terukur dengan rincian program aksi sebagai berikut:



MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA UNGGUL YANG BERKUALITAS, PRODUKTIF, DAN BERKEPribadian





MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA UNGGUL YANG BERKUALITAS, PRODUKTIF, DAN BERKEPRIBADIAN

01





1.1. Kesehatan Jiwa dan Raga

1.1.1. 1 Desa – 1 Puskesmas/Pustu – 1 Dokter/Nakes

Rakyat harus mudah mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Pemetaan kebutuhan penyediaan ataupun revitalisasi puskesmas di setiap desa. Disertai dengan ketersediaan dokter, tenaga kesehatan, dan obat esensial, serta percepatan digitalisasi layanan kesehatan (*telemedicine*).

1.1.2. Layanan Konsul Keliling (KOLING)

Tenaga kesehatan berkeliling dari pintu ke pintu rakyat untuk memberikan pelayanan dan pendataan status kesehatan serta asistensi rujukan.

1.1.3. Ibu Sehat, Anak Sehat

Dukungan gizi dan akses layanan kesehatan selama masa kehamilan dan menyusui. Program 1.000 hari pertama serta pasokan gizi untuk anak hingga usia lima tahun. Target prevalensi tengkes (*stunting*) di bawah 9% serta ibu dan ayah menjadi penjaga kesehatan keluarga.

1.1.4. Penguatan Kesehatan Mental

Penyediaan nomor darurat 24 jam 7 hari seminggu bebas biaya dan membentuk lembaga komunikasi krisis untuk menangani masalah kesehatan mental secara responsif dan holistik, dengan membangun pos-pos konseling di semua kampus, layanan kesehatan jiwa di semua puskesmas, dan fasilitas layanan jiwa di seluruh rumah sakit umum.

1.1.5. Perluasan & Kemudahan Layanan Kesehatan

Menetapkan standar waktu pelayanan pasien BPJS Kesehatan mulai dari pendaftaran, pemeriksaan oleh dokter, hingga penebusan obat baik di posyandu, puskesmas, dan rumah sakit.

1.2. Pendidikan Berkualitas dan Merata

1.2.1. Wajib Belajar 12 Tahun Gratis: Pintar Tanpa Biaya

Transformasi pendidikan termasuk penggunaan *tele-education* bagi anak Indonesia secara merata, berkualitas, dan produktif, di sekolah negeri dan swasta yang memenuhi persyaratan bantuan dari pemerintah, termasuk bagi santri dan pesantren.

1.2.2. 1 Keluarga Miskin, 1 Sarjana

Memastikan setiap keluarga miskin menyekolahkan minimal 1 orang anaknya hingga sarjana untuk memutus rantai kemiskinan.



1.2.3. Guru dan Dosen Sejahtera, Berkualitas, dan Kompeten Sejajar Negara Maju

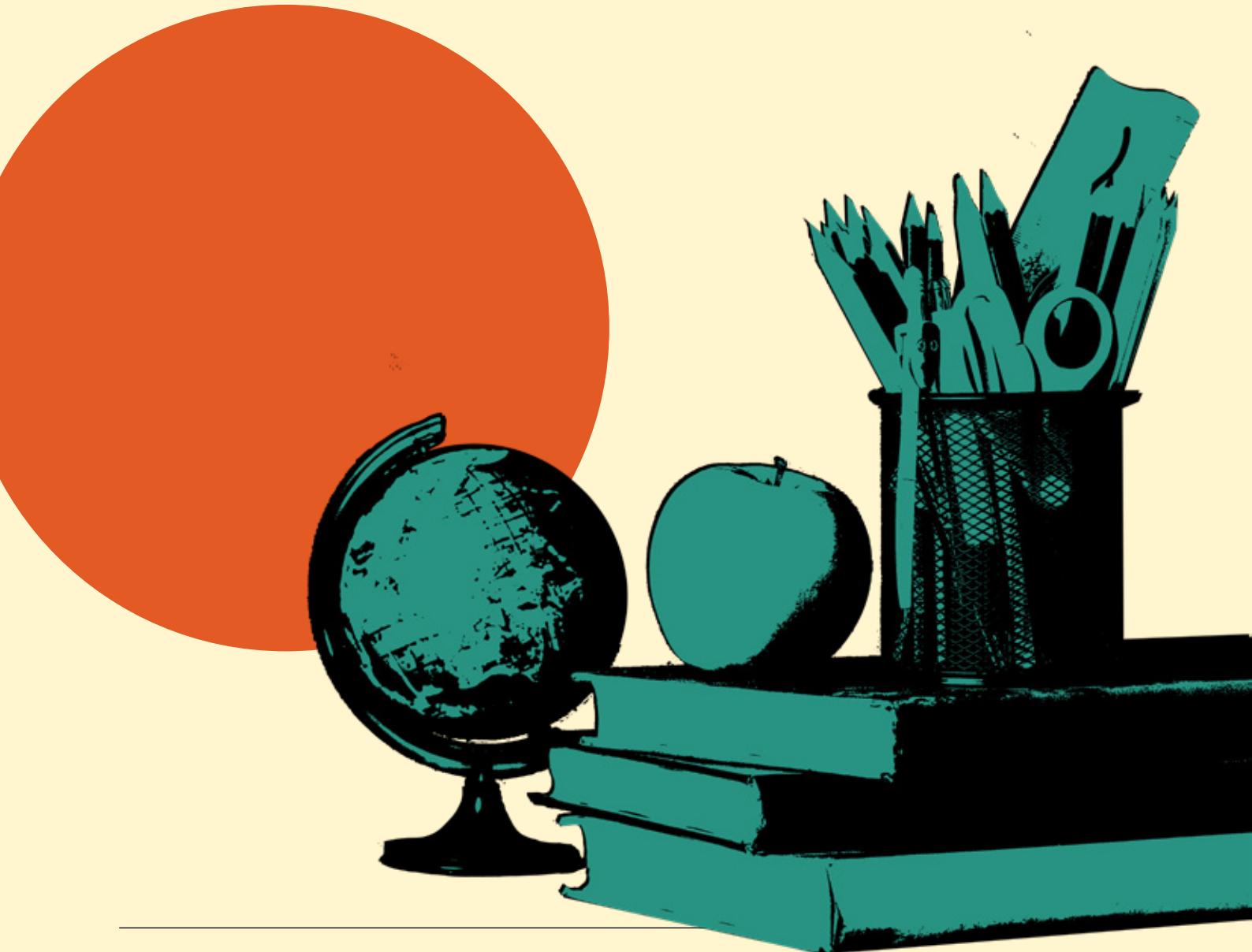
Pendapatan guru dan dosen harus meningkat dan harus sejahtera, melalui penyempurnaan sertifikasi guru dan dosen secara lebih sederhana.

1.2.4. Santri dan Pesantren Unggul

Beasiswa afirmasi, dukungan terhadap pendidikan keagamaan baik untuk Kiai maupun tenaga kependidikan pesantren, permodalan khusus untuk *santripreneur*, akses teknologi, serta menghadirkan inovator-inovator internasional ke pesantren.

1.2.5. Integrasi Pendidikan & Pelatihan Vokasi – Dunia Usaha

Menyambungkan kebutuhan dunia usaha dengan kurikulum pendidikan, pelatihan disertai dengan dukungan pemagangan yang nyata terhadap sekolah vokasi.





1.3.

Negara Hadir dan Perlindungan Sosial Adaptif

1.3.1. Tingkat Kemiskinan 2,5% dan Kemiskinan Ekstrem 0%

Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara adalah amanat konstitusi. Kami bertekad menjalankan amanat tersebut dengan target pengurangan kemiskinan yang jelas dan progresif. Percepatan penghapusan kemiskinan dilakukan dengan konvergensi program pusat dan daerah, serta optimalisasi dana non-APBN.

1.3.2. PKH 15 Juta Keluarga Penerima Manfaat

Program Keluarga Harapan (PKH) akan kami tingkatkan dari 10 juta penerima menjadi 15 juta penerima, sebagai komitmen kami untuk terus membantu rakyat.

1.3.3. Cukup Pakai NIK

Cukup menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal yang mengintegrasikan seluruh pemberian jaminan sosial, bantuan, dan layanan dari pemerintah.

1.3.4. Penguatan Sistem SATU DATA INDONESIA

Sistem data dan basis data yang aman, valid, dan akurat dengan pengelolaan data yang bisa berbagi pakai dan mendukung pertukaran data untuk pengambilan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran.

1.3.5. Dana Abadi Kesejahteraan Sosial

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat harus berkelanjutan. Sehingga, dana abadi akan menjadi salah satu opsi kami untuk pembiayaan program-program kesejahteraan sosial, termasuk membantu warga difabel.

1.4.

Budaya Maju dan Sportif

1.4.1. Berkepribadian Nasional

Kebudayaan yang mengabdi pada rakyat, mengikis feudalisme, dan mengedepankan persatuan nasional dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika.

1.4.2. Seni Budaya Indonesia Kebanggaan Dunia

Dukungan nyata untuk seluruh karya seni dan warisan budaya Indonesia agar dapat mendunia melalui integrasi data, pemasaran yang tajam, dan membantu jenama/merek lokal bermitra dengan jenama besar dunia.

1.4.3. Seniman Aman Nyaman

Perlindungan hak cipta, termasuk hak cipta komunal, dukungan pembiayaan, dan apresiasi karya lokal tradisional.



1.4.4. Budayawan Berkarya

Memberikan dukungan sumber daya, penghargaan, dan apresiasi nyata kepada budayawan untuk terus berkarya secara kreatif.

1.4.5. Atlet Sejahtera Prestasi Mendunia

Penataan sistem rekrutmen, pembinaan, kompetisi, penghargaan, dan fokus pada kesejahteraan atlet, pelatih, dan tenaga keolahragaan. Kami bertekad untuk mewujudkan olahraga unggulan sebagai lambang supremasi Indonesia seperti bulu tangkis, sepak bola, panjat tebing, dan angkat besi.

1.4.6. Sumber Pengetahuan yang Inklusif dan Hebat

Memperbanyak dan merevitalisasi perpustakaan, museum, gedung kesenian, dan pusat kebudayaan, terutama di daerah dengan kerja sama dunia usaha dan dunia internasional.

1.4.7. 1 Desa – 1 Lapangan

Menumbuhkan budaya sportif dengan revitalisasi infrastruktur olahraga sekurang-kurangnya 1 lapangan olahraga setiap desa yang ditingkatkan fungsinya secara bertahap hingga menjadi gelanggang olahraga.

1.5. Perempuan Maju dan Anak Sejahtera

1.5.1. Kartini Maju

Dukungan penuh terhadap pilihan perempuan di seluruh bidang disertai memperkuat posisi perempuan dalam relasi kerja dan menambah cuti melahirkan bagi ibu dan ayah dengan upah dan tunjangan tetap 100%. Jaminan kesetaraan kepada perempuan maupun laki-laki untuk menjalankan peran pengasuhan dalam keluarga.

1.5.2. Jaga Teman

Memberikan pemahaman pentingnya berpihak pada korban serta dukungan anggaran yang nyata kepada Satuan Tugas (Satgas) anti kekerasan berbasis gender dan perundungan di seluruh lembaga.

1.5.3. Memperbanyak Tempat Penitipan Anak

Memperbanyak tempat penitipan anak yang berkualitas, baik di sektor formal maupun di sektor informal sehingga orang tua tidak perlu khawatir.





MEMPERCEPAT PENGUASAAN SAINS DAN TEKNOLOGI MELALUI PERCEPATAN RISET DAN INOVASI (R & I) BERDIKARI





MEMPERCEPAT PENGUASAAN SAINS DAN TEKNOLOGI MELALUI PERCEPATAN RISET DAN INOVASI (R & I) BERDIKARI

02





2.1. Riset dan Inovasi Sebagai Fondasi

2.1.1. Lipat Gandakan Anggaran Riset dan Inovasi

Meningkatkan investasi riset dan inovasi industri unggulan melalui peningkatan anggaran riset dan inovasi (*Gross Domestic Expenditure on Research and Development*) mencapai 1% dari PDB pada tahun 2029 dengan mendorong sinergi pendanaan pemerintah dan swasta melalui efisiensi pagu anggaran dan penyederhanaan regulasi pendanaan filantropi maupun insentif pajak atau subsidi bagi swasta.

2.1.2. Membangun Ekosistem Riset dan Inovasi

Optimalisasi pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam negeri untuk penyusunan kebijakan dan industrialisasi.

2.2. Lompatan Menjemput Kemajuan

2.2.1. GP Project

Karantina produktif dengan mengumpulkan ilmuwan dan teknisi untuk menghasilkan dan menguasai teknologi yang bermanfaat bagi orang banyak. Mulai dari teknologi sederhana yang murah hingga teknologi tinggi yang mampu menjadi *game changer* bagi Indonesia ke depan.

2.2.2. Beasiswa yang Masif dan Terarah

Beasiswa akan kami tingkatkan dan perluas bagi anak-anak muda Indonesia yang siap menjawab tantangan Indonesia ke depan sejalan dengan strategi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.



MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERDIKARI BERBASIS PENGETAHUAN DAN NILAI TAMBAH





MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN EKONOMI BERDIKARI BERBASIS PENGETAHUAN DAN NILAI TAMBAH

03





3.1. Ekonomi Unggul Berdaya Saing

3.1.1. Cepat Kerja – 17 Juta Lapangan Kerja Baru

Memastikan penyerapan angkatan kerja baru setiap tahun dan mengurangi jumlah pengangguran hingga mencapai tingkat penyerapan tenaga kerja optimal, agar semua rakyat cepat dapat kerja.

3.1.2. Mudah Berusaha

Menciptakan lingkungan usaha yang mendukung pertumbuhan usaha ultra mikro dan UMKM serta usaha-usaha yang mampu naik kelas secara konsisten melalui penataan dan implementasi regulasi untuk menjamin kepastian hukum serta menempatkan rakyat sebagai pusat dalam kegiatan berusaha. Memastikan alokasi kredit perbankan minimal 35% untuk koperasi, UMKM, dan perusahaan rintisan diikuti dengan pelatihan serta fasilitasi akses pasar.

3.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Rata-Rata Mencapai 7%

Strategi untuk keluar dari *middle income trap* secara inklusif, dengan meningkatkan peran koperasi dan UMKM, dukungan usaha baru di seluruh wilayah Indonesia, pemanfaatan infrastruktur, ekonomi digital, pengelolaan ekonomi hijau-biru, serta pertumbuhan industri manufaktur di 7,5-8%. Optimalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk mempercepat industrialisasi dan investasi.

3.1.4. Percepatan Penyelesaian IKN

Komitmen melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) secara bertahap hingga IKN menjadi titik keseimbangan baru keadilan pembangunan sekaligus simbol Indonesia yang futuristik.

3.1.5. Made in Indonesia

Meningkatkan kapasitas produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik dan pertumbuhan industri nasional, serta menempatkan Indonesia pada posisi daya saing strategis di pasar global.





3.1.6. Industrialisasi 5.0: Karena Semua Ada di Kita

Industrialisasi yang digerakkan oleh inovasi dan kreativitas. Indonesia memiliki rantai pasok yang lengkap, dari mulai bahan mentah, tenaga kerja terampil, dan pasar yang besar. Hilirisasi sumber daya alam pertambangan, perkebunan, pertanian, serta perikanan dan kelautan dilakukan secara menyeluruh hingga menciptakan produk akhir bernilai tinggi dengan fondasi industri hulu dan kebijakan TKDN. Hilirisasi difokuskan pada SDA dan mineral di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan menggunakan pilihan teknologi yang berkelanjutan dengan cakupan pasar seluas-luasnya.

3.1.7. Ekonomi Kreatif Makin Melaju

Menjadikan pelaku ekonomi kreatif jago kandang dan jago tandang melalui pendampingan profesional, bahan baku, teknologi, permodalan, hak cipta, pasar, koneksi industri, dan ruang publik serta memperbanyak infrastruktur *creative hub* di setiap daerah.

3.1.8. Indonesia Tujuan Utama Pariwisata Dunia

Pembangunan pariwisata yang terintegrasi, berkualitas, berbasis masyarakat lokal, dan berkelanjutan. Melipatgandakan destinasi pariwisata super prioritas dan memperluas promosi destinasi wisata khas Indonesia untuk mencapai target jumlah wisatawan mancanegara sebesar 30 juta pada tahun 2029.

3.1.9. Fiskal Tangguh

Anggaran negara yang memadai, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien dengan optimalisasi sumber pendapatan, reformasi kelembagaan, dan efektivitas belanja negara melalui penataan dan penguatan kelembagaan, kekayaan negara, penerimaan negara, serta perbendaharaan negara.

3.1.10. Infrastruktur dan Simpul Konektivitas Indonesia

Melanjutkan pemerataan dan meningkatkan nilai tambah dari infrastruktur yang telah terbangun dengan menggerakkan ekonomi rakyat di seluruh simpul konektivitas di Indonesia yang sudah terhubung satu sama lain.

3.1.11. Logistik Murah

Mengintegrasikan peta jalan industri dan logistik, mengharmonisasikan pelaksanaan sistem logistik nasional hingga ke tingkat desa, serta optimalisasi *Sea Lines of Communication* (SLOC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai jalur perdagangan internasional. Diharapkan biaya logistik turun menjadi 15-17% terhadap PDB.

3.1.12. BUMN Unggul

Mendorong lebih banyak BUMN unggulan untuk bersaing di pasar global dan regional.



3.2. Kedaulatan Pangan

3.2.1. Pangan Terjamin, Terjaga, Terjangkau, dan Terdiversifikasi

Menjamin ketersediaan pangan dari dalam negeri, aman, berkualitas, murah, dan terdiversifikasi berbasis kearifan lokal serta mendukung Desa Mandiri Pangan. Selain itu, kepastian pangan murah melalui stabilisasi harga pangan juga akan dijaga.

3.2.2. Alsintan Modern dan Dukungan Sarana Prasarana

Mendukung petani, peternak, dan nelayan dengan alat modern, benih unggul, pupuk berkualitas, murah, dan tepat waktu. Memperbanyak sistem pengairan (waduk, bendungan, embung, dan irigasi), jalan usaha tani yang memadai, fasilitas *cold storage*, serta pengolahan dan pemasaran hasil tani, ikan, maupun ternak terintegrasi.

3.2.3. Industri Pangan Berkelanjutan

Membangun industri pangan berdaya saing dengan mengutamakan sumber pangan lokal untuk mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah melalui fasilitasi penelitian dan teknologi pangan ramah lingkungan.

3.2.4. Lahan Subur untuk Petani

Menghentikan alih guna lahan untuk memastikan lahan subur dan lahan produktif diberikan kepada petani kecil dan buruh tani, serta diperkuat dengan pengelolaan tata ruang yang adil dan berkelanjutan.

3.2.5. Petani, Peternak, dan Nelayan Sejahtera

Meningkatkan nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan kesejahteraan peternak disertai dengan kebijakan perdagangan yang pro produksi dalam negeri.

3.3. Indonesia Pusat Ekonomi Syariah dan Industri Halal

3.3.1. Pusat Industri Keuangan Syariah

Mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah serta penguatan sistem pelayanan jasa keuangan syariah termasuk digitalisasi maupun dukungan untuk ekspansi dan keamanan industri keuangan syariah.

3.3.2. Pusat Industri Halal Global

Optimalisasi pasar halal nasional yang terintegrasi dan berstandar internasional sekaligus mendorong ekspor produk halal dengan melibatkan UMKM dalam rantai pasok industri halal.



MEMPERCEPAT PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI





MEMPERCEPAT PEMERATAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

04



4.1. Pembangunan Adil dan Merata

4.1.1. Desa Naik Kelas

Melipatgandakan Dana Desa berkualitas untuk memastikan 50% dari total jumlah desa menjadi desa mandiri yang sejahtera dan unggul.

4.1.2. Saham untuk Rakyat

Melaksanakan pengelolaan sumber daya alam demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dengan menerapkan kebijakan alokasi porsi kepemilikan saham dalam pengusahaan sumber daya alam bagi BUMDes setempat di sekitar lokasi sumber daya alam.

4.1.3. Koperasi (Kemitraan) sebagai Corak Perekonomian Nasional

Menyediakan 40% tempat usaha bagi usaha mikro dan kecil di lingkungan infrastruktur publik. Mengalokasikan 50% anggaran belanja barang/jasa pemerintah dan BUMN/D untuk koperasi dan UMKM. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dengan koperasi dan UMKM serta kapasitas UMKM melalui digitalisasi, termasuk akses pembiayaan dan pemasaran.

4.1.4. Gandakan dan Garap Pasar Bersih

Memperbanyak pasar baru dan merevitalisasi pasar tradisional sebagai pusat aktivitas ekonomi rakyat yang bersih dan nyaman.

4.1.5. 4T Terintegrasi (Tempat Tinggal-Tempat Kerja-Trotoar-Transportasi Publik)

Menghubungkan tempat tinggal dan tempat kerja dengan sarana transportasi yang masif, nyaman, murah, dan tepat waktu disertai penyediaan trotoar yang ramah pejalan kaki.

4.1.6. Desa – Kota Tumbuh Bersama

Menjadikan kota sebagai sentra pertumbuhan ekonomi yang dapat menarik dan mendorong desa untuk tumbuh bersama. Desa menjadi penyedia sumber daya yang dibutuhkan serta penopang kebutuhan perkotaan yang dapat diandalkan dan berkesinambungan.

4.1.7. Reforma Agraria Tuntas

Penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah untuk memastikan proses administrasi dan dokumentasi lahan yang transparan, cepat, akurat, dan murah.



4.1.8. Kebijakan Fiskal dan Pembangunan Asimetris untuk Papua

Mengurangi kesenjangan ekonomi-sosial karena perbedaan dalam pertumbuhan, pengembangan, dan akses terhadap sumber daya antar daerah melalui redistribusi sumber daya, investasi infrastruktur, insentif pajak, atau dukungan keuangan khusus untuk Papua dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki taraf hidup warga hingga yang paling membutuhkan.

4.1.9. Masyarakat Hukum Adat Sejahtera

Pengakuan masyarakat adat atas hak ulayat, hutan, tanah, dan sumber daya lainnya sebagai satu kesatuan ekosistem untuk menyejahterakan masyarakat adat.

4.1.10. Perbatasan dan 3T sebagai Koridor Strategis

Memperkuat SDM, program afirmasi, akselerasi infrastruktur, energi, pangan, air bersih, serta menjadikan wilayah perbatasan dan 3T (tertinggal, terpencil, terluar) sebagai koridor strategis pembangunan nasional.

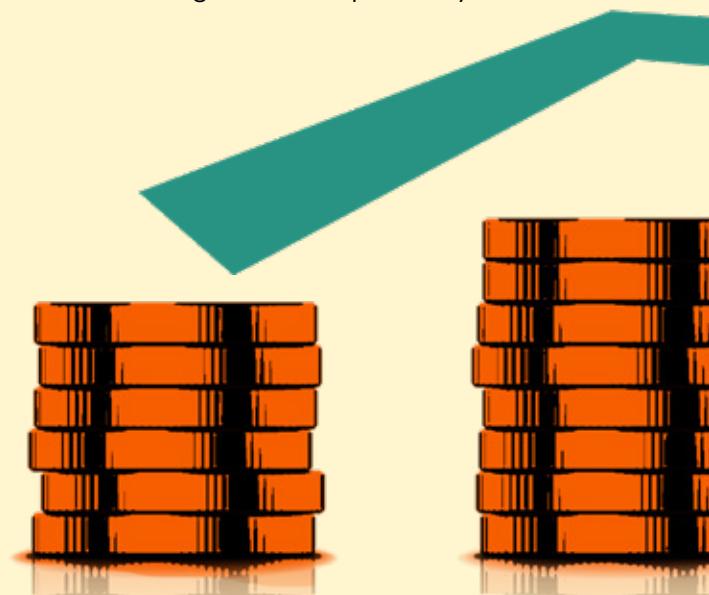
4.1.11. Anak Muda Berusaha

Seluruh kelompok anak muda mendapatkan kebijakan afirmasi untuk mendapatkan kemudahan memulai dan mengembangkan usaha.

4.2. Bahagia dan Sejahtera

4.2.1. Rumah Kita – 10 Juta Hunian

Pembangunan hunian baru atau renovasi seperti rumah sederhana, rusunami, rusunawa, disertai ketersediaan lahan yang strategis dan terjangkau dari pusat perekonomian serta transportasi umum, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah, pekerja sektor informal, buruh, dan anak muda dengan skema pembiayaan yang mudah dan murah.





4.2.2. Buruh Sejahtera

Meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja melalui kesempatan kerja yang produktif, pekerjaan yang layak, serta perlindungan ketenagakerjaan.

4.2.3. Lansia Bahagia

Membentuk program kesejahteraan (*workfare*) opsional berupa pekerjaan ringan dan sederhana bagi lansia yang masih ingin bekerja dan program tunjangan yang memadai bagi terjaminnya kehidupan lansia.

4.2.4. Disabilitas Maju dan Produktif

Kesetaraan akses pekerjaan dan upah, pendidikan, pelayanan publik, serta memastikan seluruh infrastruktur publik ramah penyandang disabilitas.

4.2.5. Kampung Sehat

Memperbaiki kampung kumuh di desa dan kota, dengan hunian layak, sanitasi sehat, air minum dan air bersih, fasilitas umum dan sosial memadai, dan ruang terbuka hijau yang mencukupi.



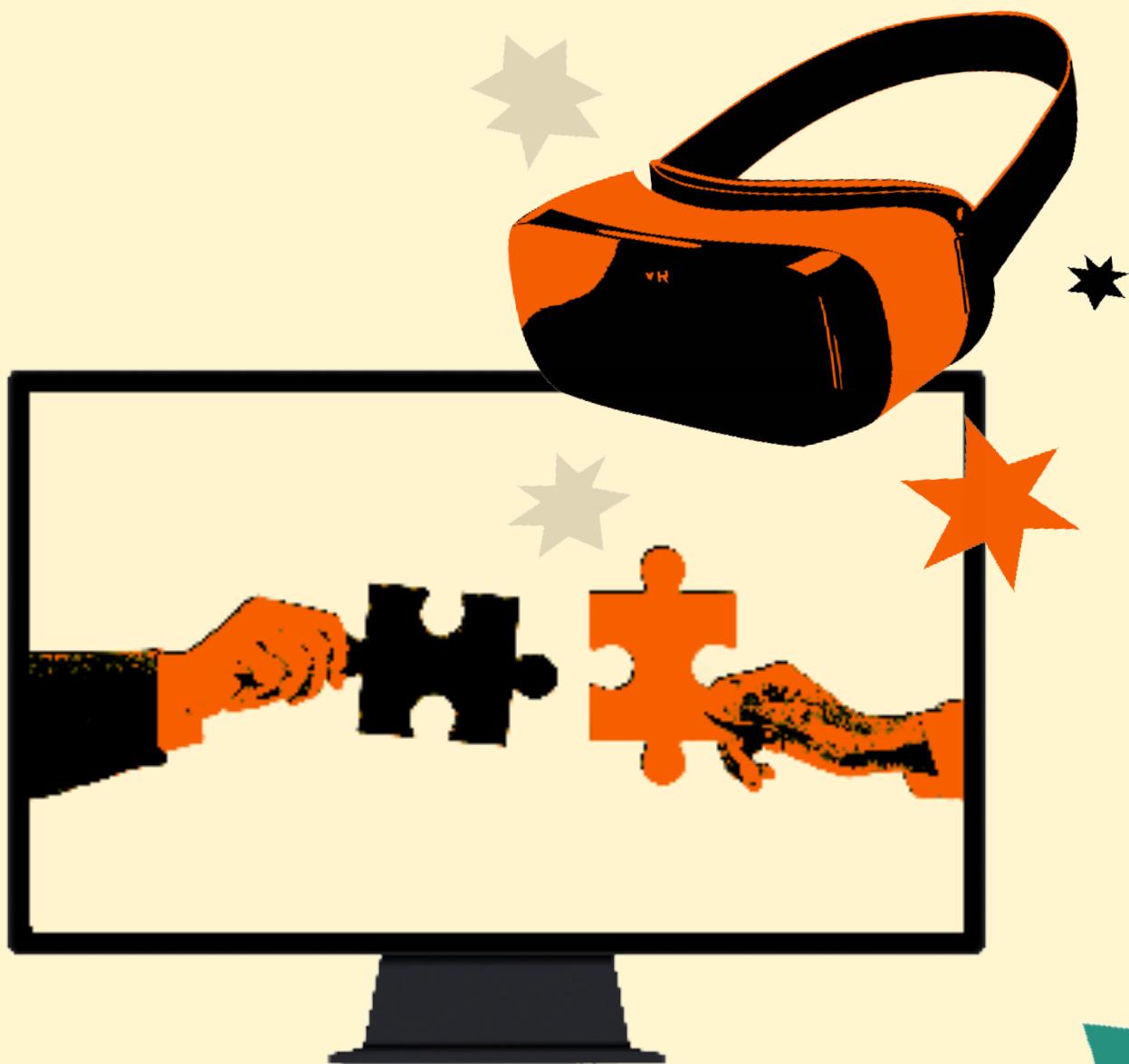


MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN SISTEM DIGITAL NASIONAL



MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN SISTEM DIGITAL NASIONAL

05





5.1. Infrastruktur Digital Hebat dan SDM Digital Andal

5.1.1. Zero Blank Spot

Semua bisa terhubung internet untuk memastikan akses digital bagi seluruh rakyat di setiap pelosok tanah air.

5.1.2. Internet Kuat, Cepat, Murah

Koneksi internet kuat, cepat, dan murah akan mendorong aktivitas digital berkembang, produktif, dan memiliki daya saing di tingkat internasional.

5.1.3. Program CERAH Digital – Cerdas dan Ahli Digital

Program pendidikan dan beasiswa yang mendukung peningkatan SDM digital yang berdaya saing dan peningkatan literasi digital bagi aparatur pemerintah dan seluruh rakyat.

5.2. Ekosistem Digital Berdaya Saing

5.2.1. Data Aman

Memastikan negara hadir di ruang digital melalui penerapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi secara menyeluruh, termasuk pembentukan lembaga pengawasan independen.

5.2.2. Dukung Rintisan Usaha Digital (*Start Up*)

Mewujudkan Indonesia yang subur digital melalui dukungan nyata terhadap rintisan usaha digital, melalui kemudahan pembiayaan, insentif pajak, dan inkubasi bisnis.

5.2.3. Regulasi Platform Digital yang Berkeadilan

Meregulasi platform digital, baik nasional maupun multinasional, untuk kepentingan nasional yang dilandasi kepribadian bangsa.

5.2.4. Kemandirian Industri Digital

Meningkatkan porsi industri digital domestik dalam proses digitalisasi, termasuk penciptaan aplikasi nasional. Meningkatkan peran pelaku usaha dan produk domestik dalam aktivitas ekonomi digital termasuk e-commerce untuk mendukung perkembangan UMKM lokal.

5.2.5. Digital Berdaulat

Memastikan kedaulatan digital dengan mengedepankan perlindungan setiap warga negara di ruang digital, baik melalui penjaminan hak-hak digital serta proteksi terhadap ancaman seperti judi *online* dan penyebaran misinformasi.



MEMPERCEPAT PERWUJUDAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN MELALUI EKONOMI HIJAU DAN BIRU





MEMPERCEPAT PERWUJUDAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN MELALUI EKONOMI HIJAU DAN BIRU

06



6.1. Lingkungan Hidup Berkelanjutan

6.1.1. Kurangi Emisi Gas Rumah Kaca

Pemeliharaan hutan, pemangkasan polusi udara dari emisi kendaraan dan industri, pembatasan penggunaan plastik, serta transisi energi menuju *net zero emission* (NZE).

6.1.2. Harmoni Hutan untuk Keseimbangan

Moratorium deforestasi dan mempercepat reforestasi, reboisasi, restorasi, dan rehabilitasi. Meningkatkan konservasi kawasan hutan sebagai sumber pangan lokal, obat-obatan herbal, air, oksigen, fungsi klimatologis, dan layanan alam bagi kehidupan masyarakat di sekitar hutan.

6.1.3. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan

Revitalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS), danau, pengembangan kota hijau, industri hijau, dan gerakan kesadaran gaya hidup bebas sampah, serta penerapan regulasi ketat terhadap perusakan lingkungan. Sehingga, indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) berada pada kisaran 74-76.

6.1.4. Air untuk Rakyat

Mempercepat penyediaan air bersih yang merata di seluruh pelosok negeri melalui percepatan penyediaan sarana dan prasarana dasar air bersih/minum, penerapan teknologi pemurnian dan desalinasi, pengelolaan konservasi sumber daya air, dan penguatan infrastruktur daya tampung air serta pemanfaatan daur ulang air.

6.1.5. Adaptasi dan Mitigasi Krisis Iklim

Penghijauan wilayah pesisir, ruang terbuka hijau memadai, mitigasi bencana, serta transportasi umum yang nyaman, aman, dan ramah lingkungan diikuti penerapan teknologi digital bagi petani dan nelayan.

6.1.6. Penerapan ESG

Pengintegrasian penilaian risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, Governance/ESG*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem ekonomi dan sistem keuangan.

6.1.7. KadarKlim – Kampung Sadar Iklim

Program promotif di tingkat kampung untuk menahan laju perubahan iklim, dengan fasilitas sanitasi dan drainase yang baik, ruang terbuka hijau, kawasan pejalan kaki, fasilitas publik, dan pengelolaan sampah yang terintegrasi.



6.2. Ekonomi Hijau

6.2.1. Transisi Energi

Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai generator pembaharuan yang potensinya sekitar 3.700 GW secara bertahap untuk kebutuhan energi dalam negeri sehingga porsi EBT di dalam bauran energi menjadi 25-30% hingga tahun 2029.

6.2.2. Desa Mandiri Energi

Desa mampu mendayagunakan sumber energi lokal berbasis energi baru terbarukan untuk memasok kebutuhan energinya sehingga menjadi bagian dari gugus penghijauan ekonomi Indonesia.

6.2.3. Limbah Jadi Berkah

Pengelolaan sampah dan limbah yang terintegrasi dan ramah lingkungan agar berkah ekologi dapat terwujud. Sampah akan diubah menjadi peluang tambahan penghasilan alternatif bagi rakyat alias berkah ekonomi (*waste to cash*).

6.2.4. Ekonomi Sirkuler

Meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan dengan ganyang plastik dan gebrak polusi melalui pendekatan *reduce, reuse, recycle, repair, and refabricate* (5Rs).

6.3. Ekonomi Biru

6.3.1. Tata Kelola Laut yang Inklusif dan Berkelanjutan

Mengoptimalkan pemanfaatan sektor kelautan dengan potensi 1,4 triliun dolar AS per tahun secara inklusif untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan laut. Dilakukan demi menjaga gelombang potensi ekonomi biru Indonesia.

6.3.2. Akselerasi 11 Potensi Maritim

(1) perikanan tangkap; (2) perikanan budi daya; (3) industri pengolahan hasil perikanan; (4) industri bioteknologi kelautan; (5) pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM); (6) pariwisata bahari; (7) hutan bakau; (8) perhubungan laut; (9) sumber daya wilayah pulau-pulau kecil; (10) industri dan jasa maritim; dan (11) SDA nonkonvensional.

6.3.3. Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota dan Zonasi

Penangkapan ikan terkendali untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta melakukan pemerataan distribusi pertumbuhan ekonomi nasional. Penangkapan ikan terukur dibagi dalam beberapa zonasi di mana seluruh kegiatan penangkapan ikan di laut melalui satelit didukung penggunaan aplikasi digital.



6.3.4. Perikanan Budi Daya Berkelanjutan

Meningkatkan produktivitas budi daya melalui penetapan dan penataan kawasan budi daya, bahan pakan lokal berkualitas dan peningkatan nilai tambah produk dan pasar dengan berfokus pada 5 produk budi daya unggulan yaitu udang, kepiting, lobster, tilapia, dan rumput laut.

6.3.5. Maritim Unggul (MU)

Penguatan kapasitas konektivitas maritim melalui peningkatan kualitas SDM maritim, sarana dan prasarana transportasi laut, pengoptimalan pemanfaatan alur laut dan titik sempit (*choke points*) dengan didukung oleh sistem manajemen transportasi laut yang terintegrasi dengan jalur perdagangan regional dan internasional.

6.3.6. Industri Maritim Jaya

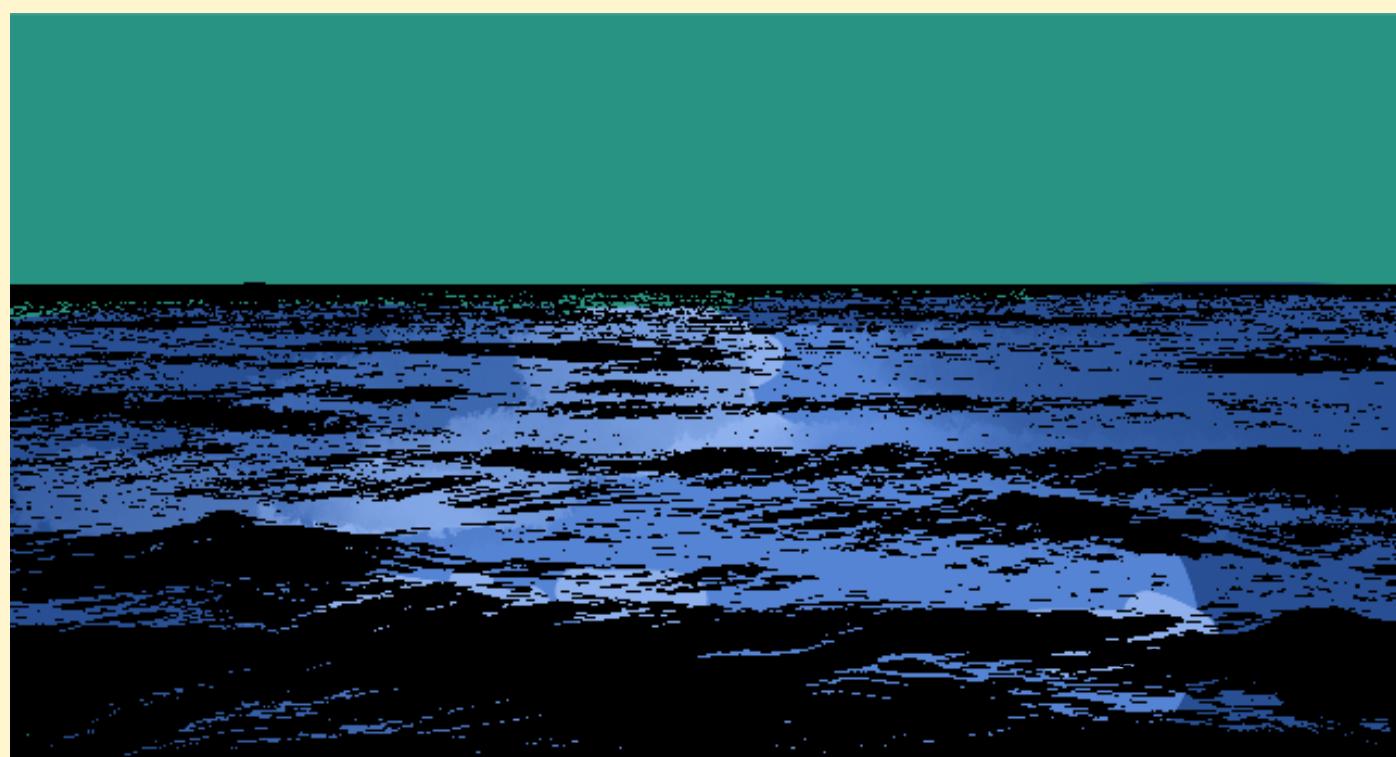
Penguatan industri galangan, industri perikanan dan hasil laut, pengelolaan kampung pesisir, konservasi laut dan terumbu karang, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan sumbangsih ekonomi maritim terhadap PDB. Industrialisasi kelautan dilakukan demi gemilangkan pesisir yang dapat mendukung kesejahteraan masyarakat pesisir.

6.3.7. Wisata Maritim Mendunia

Pengembangan kawasan wisata bahari, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) wisata bahari, serta meningkatkan daya tarik investasi maritim.

6.3.8. Mengatasi Pencemaran Laut

Menerapkan regulasi yang ketat untuk mengatasi pencemaran laut termasuk pencemaran yang bersifat lintas batas negara.





MEMPERCEPAT PELAKSANAAN DEMOKRASI SUBSTANTIF, PENGHORMATAN HAM, SUPREMASI HUKUM YANG BERKEADILAN, DAN KEAMANAN YANG PROFESIONAL





**MEMPERCEPAT
PELAKSANAAN
DEMOKRASI SUBSTANTIF,
PENGHORMATAN HAM,
SUPREMASI HUKUM
YANG BERKEADILAN,
DAN KEAMANAN YANG
PROFESIONAL**

07





7.1. Demokrasi Substantif

7.1.1. Menjamin Kebebasan Sipil

Menjamin kebebasan berpendapat, berekspresi, berserikat, dan menyebarkan informasi untuk dapat mewujudkan kehidupan sipil yang bebas dan bertanggung jawab. Sehingga, indeks demokrasi meningkat menjadi 7,4-7,6.

7.1.2. Galang Supremasi Sipil

Memperkuat hak-hak politik rakyat dan kaum minoritas dengan menjamin hak ikut serta dalam pemerintahan, hak dipilih dan memilih, serta terlibat dalam partai politik.

7.1.3. Gerak Pemantapan Lembaga Politik

Memperlancar konsultasi-dialog antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta mengembalikan khitah parpol sebagai perangkat demokrasi dengan meningkatkan pendanaan negara terhadap partai politik.

7.1.4. Kemerdekaan Pers dan Media

Menjamin pers yang BERGEMA (Bebas, Bergerak, dan Bermartabat) dengan memastikan regulasi tidak digunakan untuk membatasi kebebasan pers. Meningkatkan literasi media sosial serta mendorong aktivitas media sosial yang bersih dan bertanggung jawab. Sehingga, indeks kebebasan pers ditargetkan menjadi 72-74.

7.2. Pemerintahan yang Bersih dan Tulus Melayani Rakyat

7.2.1. Lapor Presiden

Penyediaan akses penyampaian informasi, keluhan, usulan yang bebas biaya (bebas kuota dan bebas pulsa), dan menjamin keamanan pelapor.

7.2.2. Mal Pelayanan Publik

Memperluas pelayanan dan ketersediaan mal pelayanan, baik fisik dan digital, di seluruh wilayah yang disertai dengan nomor yang bisa dilacak progres penyelesaiannya (seperti nomor resi).

7.2.3. Nomor Darurat Nasional

Pengintegrasian nomor darurat nasional untuk layanan emergency, seperti kesehatan, pemadam kebakaran, kepolisian, dan kelistrikan.

7.2.4. Digitalisasi Pemerintahan

Memastikan pelayanan pemerintahan sat-set dengan digitalisasi seluruh aspek pemerintahan.



7.2.5. ASN Sejahtera

Menjamin adanya sistem kerja yang jelas, kenaikan jabatan yang transparan akuntabel, remunerasi yang konkret, dan sistem pindah yang padu padan bagi ASN, serta memastikan pelayanan prima ASN.

7.3. Hukum Adil untuk Semua

7.3.1. Membasmi Korupsi

Mempercepat dukungan teknologi informasi dan penguatan KPK bersama dengan kejaksaan dan POLRI secara sinergis dan harmonis, serta mengamankan aset negara dari tangan koruptor, dengan fokus di tiga aspek utama yakni regulasi, sistem, dan aktor.

7.3.2. Jaminan Hukum bagi Semua

Memberikan jaminan hukum seluas-luasnya bagi rakyat dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya dengan bantuan hukum pengacara publik, termasuk dengan mendorong pembentukan badan-badan bantuan hukum di setiap kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

7.3.3. Keadilan Restoratif

Mempercepat pengembangan dan penerapan alternatif pemidanaan dengan pendekatan seimbang antara korban dan pelaku melalui keadilan restoratif dan penerapan hukum sosial (kerja sosial, denda, serta bentuk sanksi hukum lainnya) atau jalur non-yudisial atas pelanggaran hukum ringan.

7.3.4. Supremasi Hukum Progresif dan Menjamin HAM

Memastikan hukum berkeadilan dengan penegak hukum yang bersih, serta menegaskan komitmen untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM (audit HAM dan perlindungan pembela HAM) diikuti regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

7.3.5. Pelanggaran HAM Diselesaikan

Terus berupaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara berkeadilan. Utamanya terhadap kasus pelanggaran HAM yang menjadi beban peradaban bagi bangsa dan negara.

7.3.6. Hukum Tegas Kejahatan Luar Biasa

Menegakkan hukum secara tegas dan menghukum dengan sanksi maksimal bagi tindak kejahatan luar biasa, seperti korupsi, bandar narkoba, terorisme, kekerasan seksual, perdagangan manusia, kejahatan lingkungan hidup, dan pelanggaran HAM berat.



7.3.7. Yudikatif Adil, Berintegritas, dan Independen

Pembentahan mahkamah konstitusi dan lembaga peradilan lainnya melalui penguatan sistem seleksi dengan melibatkan ahli dan masyarakat sipil, beasiswa unggulan untuk SDM peradilan, dan regulasi yang mengatur hubungan afiliasi.

7.3.8. Legislasi Partisipatif

Gencarkan partisipasi dan gagas pendapat publik melalui penyediaan ruang bagi partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Menyiapkan mekanisme yang dapat memastikan respons yang semestinya atas setiap partisipasi publik.

7.3.9. Aparat Penegak Hukum Sejahtera dan Profesional

Meningkatkan kesejahteraan bagi aparat penegak hukum dan menyediakan insentif untuk peningkatan kinerja. Menyediakan saluran pengaduan yang aman dan terjamin untuk melaporkan perilaku penyalahgunaan kekuasaan.

7.4. Polisi Profesional Tepercaya

7.4.1. Kesesuaian Tindakan Hukum

POLRI harus memastikan setiap tindakan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan bersifat humanis.

7.4.2. Kepatuhan terhadap Standar dan HAM

Senantiasa mematuhi setiap aturan dan bisa menjadi teladan bagi masyarakat, termasuk dalam penegakkan HAM.

7.4.3. Tanggap terhadap Kebutuhan Warga Biasa

Melakukan tugas kamtibmas, menegakkan hukum yang berkeadilan, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan sungguh-sungguh dan profesional. Memberikan saluran informasi bagi seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan laporan yang disampaikan.

7.4.4. Bhayangkara Sejahtera

Meningkatkan kesejahteraan bhayangkara sejalan dengan tugas, tanggung jawab, dan capaian. Fasilitasi layanan konseling psikologis untuk mengatasi tekanan pekerjaan.





**MEMPERCEPAT PENINGKATAN
PERAN INDONESIA DALAM
MEWUJUDKAN TATA DUNIA
BARU YANG LEBIH BERKEADILAN
MELALUI POLITIK LUAR NEGERI
BEBAS AKTIF DAN MEMPERKUAT
PERTAHANAN NEGARA**





MEMPERCEPAT PENINGKATAN PERAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN TATA DUNIA BARU YANG LEBIH BERKEADILAN MELALUI POLITIK LUAR NEGERI BEBAS AKTIF DAN MEMPERKUAT PERTAHANAN NEGARA



8.1

Berperan Sentral dalam Menata Dunia Baru

8.1.1. Koeksistensi Geopolitik Progresif

Menjalankan politik bebas aktif dengan prinsip Dasasila Bandung untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Memperkuat pelibatan global Indonesia yang otonom dalam forum bilateral dan multilateral dalam memperjuangkan perdamaian dunia. Memperkuat komitmen untuk mendukung perjuangan pergerakan rakyat Palestina.



8.1.2. Perjanjian Internasional 100% untuk Kepentingan Nasional

Memastikan bahwa seluruh perjanjian yang dibuat harus mengutamakan produk dalam negeri, meningkatkan daya saing perekonomian nasional, mengedepankan isu-isu strategis dan kekinian, serta memastikan perlindungan segenap rakyat Indonesia.

8.1.3. Kedutaan Besar Ujung Tombak Pelayanan WNI

Memperkuat diplomasi dan kedutaan besar sebagai ujung tombak ekspor, perlindungan PMI, dan pelayanan WNI di luar negeri yang responsif.

8.2. Kedaulatan NKRI dengan Sistem Pertahanan 5.0

8.2.1. Modernisasi Pertahanan SAKTI

Transformasi pertahanan berdasarkan doktrin Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (SISHANRATA) untuk membentuk Kekuatan Pertahanan Indonesia yang berdaya gentar dan dilengkapi dengan alutsista SAKTI (Perkasa dengan Keunggulan Teknologi 5.0), serta memperkuat kemampuan untuk melindungi tanah air NKRI dengan modernisasi alutsista dan memperkuat kemampuan dalam menghadapi ancaman dan tantangan.

8.2.2. Prajurit Sejahtera

Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar prajurit dan keluarga yang ditopang dengan rawatan dan layanan kedinasan yang berkualitas di seluruh penjuru Nusantara.

8.2.3. Industri Pertahanan Keamanan Kelas Dunia

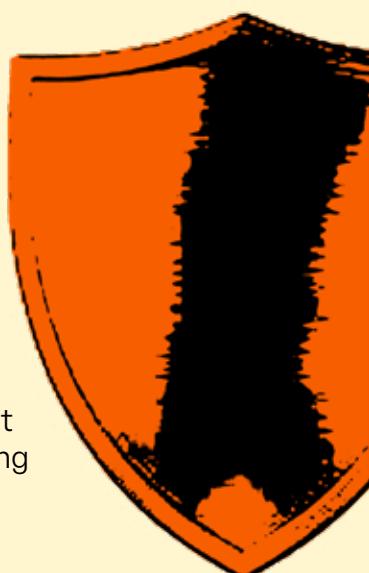
Mendorong kemandirian sebagai bagian dari rantai pasok global untuk memenuhi kebutuhan pertahanan dan keamanan yang akan memperkuat proses alih teknologi, pembangunan kekuatan pertahanan, konektivitas nasional, dan penguatan daya gentar.

8.2.4. Benteng Pertahanan Nusantara

Mengembangkan kemampuan proyeksi strategis dengan mengembangkan strategi anti akses dan penangkalan wilayah untuk mengamankan kedaulatan teritorial dan pelaksanaan hak berdaulat di ZEE, terutama di koridor navigasi maritim dan landas kontinen, ruang dirgantara, dan antariksa Indonesia.

8.2.5. Perisai Siber Nusantara

Meningkatkan kemampuan siber pada era komputer kuantum dan perkembangan kecerdasan buatan dengan memperkuat BSSN sebagai lembaga utama keamanan siber serta mendorong pembentukan Angkatan Siber TNI.





FONDASI

Kami sangat menyadari bahwa pelaksanaan Misi 8 Gerak Cepat untuk mewujudkan Visi Menuju Indonesia Unggul, memerlukan **3 Fondasi** yang kuat untuk menopang seluruh program aksi. Fondasi tersebut akan menjadi prasyarat tercapainya tujuan mulia dalam mempercepat terwujudnya negara maritim yang adil dan lestari.

Ketigafondasiyangdimaksudyakni**(i) ketersediaan anggaran** yang memadai dengan kualitas belanja yang baik, **(ii) pemberantasan korupsi** yang tegas untuk pemerintah yang bersih dan dipercaya rakyat, serta **(iii) digitalisasi birokrasi** yang mempercepat dan mempermudah layanan publik. Ketigafondasitersebut secara lebih sederhana dan taktis, kami singkat dengan akronim “**GASPOL**”, yang bermakna Gandakan Anggaran, Sikat korupsi, dan POles birokrasi dengan digitalisasi.

Anggaran yang meningkat, jelas, rinci, dan dikelola dengan baik mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sehingga, seluruh agenda dan program pembangunan yang sangat dibutuhkan rakyat, dapat terlaksana dengan dukungan anggaran yang kuat. Namun, tentu saja bukan hanya jumlah anggaran yang menjadi penentu, melainkan juga bagaimana dana tersebut dikelola dan dipergunakan.



Bebas dari korupsi merupakan salah satu ciri utama pemerintahan yang bersih. Korupsi bukan hanya mengurangi dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Padahal kepercayaan adalah hal yang sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terakhir, era digital yang terus bergerak saat ini telah memungkinkan pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, murah, dan transparan kepada masyarakat. Dengan digitalisasi, birokrasi dapat dipangkas, dan layanan pemerintah menjadi lebih efisien. Penerapan sistem digital dalam pelayanan pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas serta memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan layanan.



PENUTUP

GERAK CEPAT GANJAR - MAHFUD

GERAK CEPAT harus dilakukan agar bonus demografi yang akan segera berakhir, dapat kita peroleh untuk Menuju Indonesia Unggul. Dengan semangat kerja keras dan gotong royong oleh seluruh anak bangsa, kami yakin apa yang menjadi tujuan bersama ini akan dapat kita raih. Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi GERAK CEPAT kita bersama.

Calon Presiden
2024 – 2029

H. Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P.



Calon Wakil Presiden
2024 – 2029

Prof. Dr. H. Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P.



GERAK CEPAT
INDONESIA UNGGUL

The text "GERAK CEPAT" is positioned above "INDONESIA UNGGUL". The word "GERAK" has a horizontal bar consisting of three parallel lines above it. The word "CEPAT" has a circular arrow symbol inside the letter "C". The entire slogan is in a bold, sans-serif font.

GANJAR PRANOWO - MAHFUD MD
INDONESIA 2024